



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KONSEP NASIONALISME CHINA DI ERA
GLOBALISASI TERHADAP ETNIK MINORITAS UIGHUR DI
XINJIANG PADA TAHUN 2001-2010**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional**

**NASRULLAH NOOR EDIKRESNHA
0806352334**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Nasrullah Noor Edikresnha
NPM : 0806352334
Tanda Tangan : 

Tanggal : 24 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Nasrullah Noor Edikresnha
NPM : 0806352334
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Implementasi Konsep Nasionalisme China di Era
Globalisasi terhadap Etnik Minoritas Uighur di Xinjiang
pada Tahun 2001-2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ani Soetjipto, M.A.

(.....)

Penguji : Dwi Ardhanariswari, M.Phil.

(.....)

Ketua Sidang : Andi Widjajanto, M.Sc., M.A.

(.....)

Sekretaris Sidang: Aninda Tirtawinata, M.Litt.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Apabila ada seseorang yang bertanya kepada penulis, “apakah satu fenomena yang menurut Anda merupakan bagian yang paling menarik untuk dikaji dalam ilmu hubungan internasional di abad ke-21 ini?”, maka penulis pun tanpa ragu akan menjawab, “globalisasi”. Memang, tidak dapat disangkal bahwa globalisasi adalah fenomena yang luar biasa. Di satu sisi, globalisasi membawa begitu banyak dampak positif bagi kehidupan umat manusia. Namun di sisi lain, banyak juga di antara kita yang protes terhadap globalisasi dan bahkan membentuk gerakan antiglobalisasi sendiri. Penulis sendiri pun percaya bahwa akan ada dua sisi tiap koin. Baik dampak positif maupun dampak negatif pasti dapat ditimbulkan melalui globalisasi. Terlepas dari itu semua, penulis sendiri pun percaya bahwa dunia tanpa globalisasi bagaikan sayur tanpa garam, hambar rasanya. Globalisasi telah membuat dunia semakin unik, globalisasi membuat orang-orang melihat dunia dengan lebih bulat.

China adalah salah satu negara yang paling sering disebut, dibahas, dan didiskusikan selama empat tahun penulis menimba ilmu di Departemen HI FISIP UI. Negara ini memang sangat unik baik dari segi pemerintahannya, karakteristik masyarakatnya, budayanya, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan fenomena kebangkitan China dewasa ini, penulis melihat untuk ke depannya China akan tetap “menghegemoni” studi HI, mungkin suatu saat nanti hegemoninya melebihi Amerika Serikat.

Kepopuleran China ini pun membuat penulis tertarik untuk mengkajinya secara lebih mendalam. Karena penulis lebih senang dengan isu-isu yang lebih *soft*, penulis pun tertarik untuk mengkaji isu HAM yang selama ini menjadi perdebatan hangat soal China. Karena pada saat yang bersamaan penulis juga tertarik dengan isu-isu kelompok minoritas, penulis pun memutuskan untuk mengkaji mengenai Uighur di China mengingat kelompok ini adalah kelompok minoritas dan beragama Islam pula sesuai dengan agama dan ketertarikan penulis.

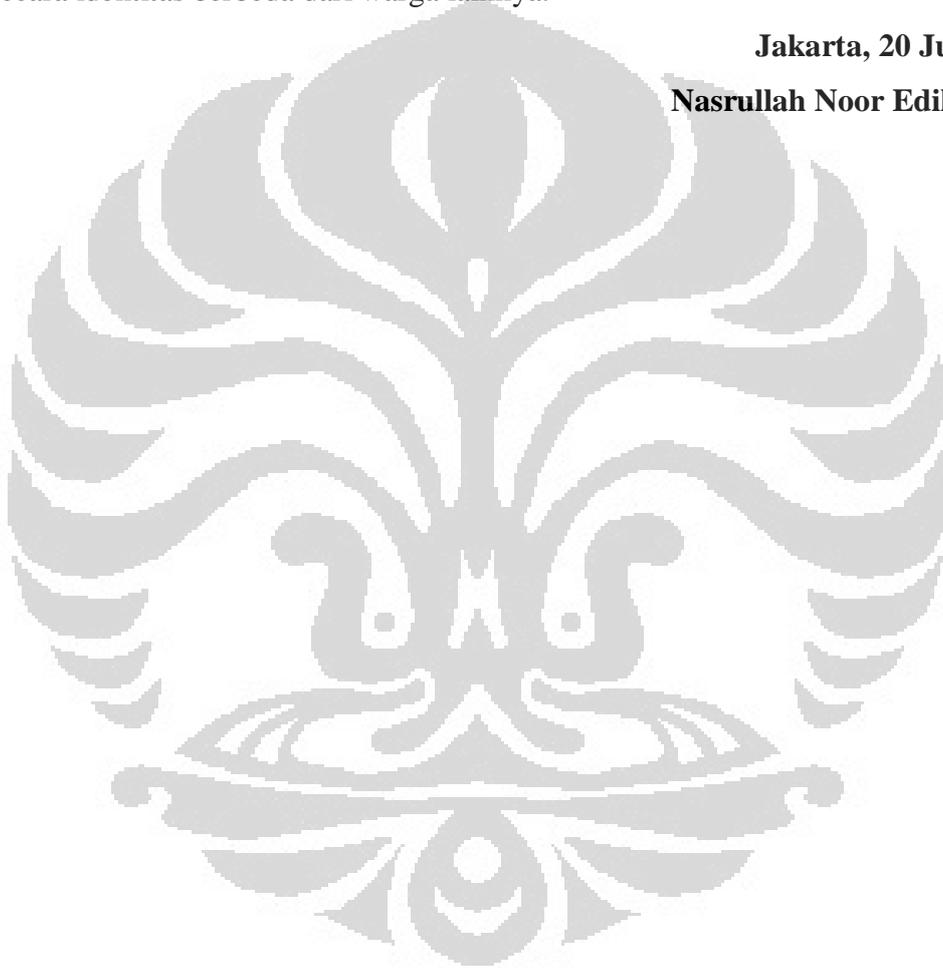
Setelah berdiskusi panjang lebar dengan Mbak Ani, akhirnya penulis pun memutuskan untuk membuat skripsi mengenai “nasionalisme China” dan

“Uighur”, tentu saja keduanya dibalut dengan “globalisasi” sebagai konteks sekaligus sebagai faktor yang memberikan pengaruh kuat.

Mudah-mudahan melalui penelitian ini penulis dapat lebih banyak berkontribusi terhadap kajian ilmu hubungan internasional mengenai dampak yang diberikan oleh globalisasi terhadap pembentukan nasionalisme negara tertentu dan bagaimana negara tertentu tersebut mengimplementasikan nasionalismenya terhadap warganya, terutama warga minoritas yang mungkin secara identitas berbeda dari warga lainnya.

Jakarta, 20 Juni 2012

Nasrullah Noor Edikresnha



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada penulis. Hanya karena pertolongan dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dia-lah Zat yang penuh misteri, yang hingga saat ini masih kucari. Mudah-mudahan suatu hari nanti penulis akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Apabila tidak penulis temukan jawabannya selama hidup penulis, mungkin di akhirat nanti keajaiban akan terjadi.

Ketika penulis masih berumur 6 tahun, penulis pernah berpikir, “Papa bosan *gak* ya sudah hidup selama 40 tahun-an?”. Waktu itu ayah penulis memang masih berusia sekitar 40-an. Ketika penulis sadar penulis pernah berpikir seperti itu, penulis telah berusia 21 tahun. Dengan kata lain 15 tahun telah berselang semenjak penulis berpikir hal tersebut untuk kedua kalinya. Dari situ, penulis belajar bahwa ternyata hidup sangatlah singkat. Waktu terus bergulir tanpa pernah penulis sadari. Terus bergulir tanpa henti, meninggalkan mereka yang diam di tempat dan mengejar mereka yang terus berlari. Bukankah salah satu ensiklopedia pernah mengatakan bahwa “waktu adalah misteri terbesar di dunia ini?”.

Itu pula-lah yang tentunya penulis rasakan dalam hidup penulis. Tanpa adanya permulaan, tiba-tiba saja penulis merasa telah ada di dunia ini. Seingat penulis, pertama kali memori tentang kehidupan itu berawal ketika penulis masih berusia 2 atau 3 tahun. Terjadi begitu saja tanpa adanya niatan dan tanpa adanya persiapan.

Waktu terus bergulir dan berbagai momen telah penulis alami. Penulis masih ingat bagaimana pengalaman TK selama di Irian Jaya, bermain tanah dan ayunan sampai terkena bau walang sangit. Lalu penulis pun pindah TK ke Jakarta, TK Aisyiyah. Di TK ini, penulis belajar tentang hal-hal mendasar terkait Islam, cara solat, puasa, dan sebagainya. Penulis pun melanjutkan studi ke tingkat SD. Penulis masih ingat bagaimana waktu itu penulis mencoba untuk mengikuti tes SDN IKIP, namun ternyata dinyatakan tidak lolos. Penulis pun mencoba peruntungan ke SDN Malaka Jaya 05 Pagi, di mana penulis masih ingat begitu takutnya penulis ketika dites menebak warna-warna benda. Waktu itu penulis mengira penulis bodoh karena sulit untuk membedakan warna-warna. Belakangan, penulis baru tahu bahwa kesulitan penulis menebak warna bukan berarti penulis adalah orang bodoh, namun karena penulis mengalami buta warna parsial. Masa SD bisa jadi merupakan salah satu masa yang tidak terlupakan bagi penulis. Selain tentunya karena pelajaran di sekolah dan kehadiran teman-teman, penulis merasa kehadiran makhluk kotak bernama Playstation memultiplikasi memori indah yang penulis miliki di masa SD. Masih teringat jelas bagaimana penulis bermain Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Lunar, Suikoden I, Suikoden II, Tekken III, Tomb Raider, dan berbagai kaset lainnya. Mungkin kini penulis tidak lagi dapat memainkan *game-game* tersebut, namun setidaknya penulis masih dapat mengingat perasaan ketika penulis memainkan *game-game* tersebut melalui video di youtube. Memang, memori penulis ketika

SD tidaklah sempurna karena penulis pun harus menghadapi berbagai tantangan lainnya. Namun kehadiran teman-teman, pelajaran sekolah, dan *game-game* Playstation tersebut seolah menjadi ombak yang menghapus pahitnya tantangan tersebut.

Penulis pun melanjutkan studi ke bangku SLTP Labschool Rawamangun Jakarta. Di sini, penulis pun mencoba untuk memahami siapa jati diri penulis yang sebenarnya. Perjalanan menuju dewasa ini memberikan penulis berbagai banyak hal, baik yang positif maupun yang negatif. Terkadang memang ada beberapa hal yang kurang menyenangkan yang mau tidak mau harus penulis telan bulat-bulat. Lalu penulis pun masuk ke bangku SMA. Di sini, penulis belajar semakin banyak mengenai kehidupan. Salah satu memori yang paling menyenangkan yang penulis alami semasa SMA adalah memori ketika penulis ngekost di depan sekolah. Jalan-jalan di malam Sabtu ke Gading, Setiabudi, dan sekitarnya untuk kemudian dilanjutkan dengan “pelantikan” nampaknya menjadi agenda wajib penulis dengan teman-teman di kosan. Acara menonton American Idol di tengah minggu di kamar salah satu teman penulis pun nampaknya tidak mungkin dilupakan. Kalau boleh jujur, pengalaman *ngekost* ini adalah yang paling berkesan dari masa-masa SMA penulis. Mungkin *ngekost* ini pula-lah yang menjadi motivasi penulis untuk terus belajar dan meraih prestasi. Tanpa adanya pengalaman-pengalaman tersebut, mungkin penulis tidak akan mampu lulus SMA dengan nilai optimal dan masuk ke Program Studi HI UI.

Lain lagi ceritanya dengan dunia perkuliahan. Di sini, banyak sekali hal yang penulis alami yang menambah kekayaan pengalaman dan pengetahuan penulis. Penulis masih ingat bagaimana bangganya penulis ketika tahu penulis diterima di pilihan pertama yaitu ilmu hubungan internasional. Tidak sabar rasanya untuk melihat teman-teman satu program studi dan tidak sabar rasanya merasakan dunia baru perkuliahan. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali memori baik yang indah maupun yang buruk yang penulis alami. Ada kata-kata yang ingin sekali diucapkan namun ternyata hanya bisa terkunci di lidah, ada perasaan yang ingin sekali disampaikan tapi ternyata hanya bisa dipendam, ada pikiran yang ingin sekali direalisasikan tapi pada akhirnya hanya bisa dibayangkan. Semua itu tercampur menjadi satu dalam empat tahun masa studi penulis sejak tahun 2008.

Satu hal yang pastinya penulis tidak akan pernah lupa adalah bagaimana penulis merasa bahwa waktu berjalan sangat amat cepat di bangku kuliah ini. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun mungkin berjalan pada kecepatan yang sama, namun entah kenapa penulis merasa di bangku kuliah ini waktu berjalan (atau mungkin lebih tepatnya berlari) begitu kencangnya jauh lebih kencang ketimbang masa-masa penulis sebelum di bangku kuliah. Empat tahun berlalu sudah namun memori saat-saat penulis pertama kali berkenalan dengan dunia HI di tahun 2008 masih sangat jelas terlihat. Sepertinya empat tahun berlalu bagaikan kemarin saja.

Penulis percaya bahwa penulis saat ini dibentuk oleh pengalaman yang penulis alami di masa lalu. Oleh karena itu penulis akan mencoba mengucapkan

terima kasih kepada orang-orang yang paling berpengaruh di hidup penulis hingga masa penyelesaian skripsi ini.

Pertama, tentu saja kepada keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik di saat susah maupun senang. Keluarga penulis-lah yang membuat “*house*” menjadi “*home*”. Entahlah apa jadinya penulis tanpa keberadaan keluarga penulis. Kepada mama **Sri Puji Astuti** dan papa **Sudihardjo** yang telah tiada, terima kasih banyak atas segala bimbingan dan asuhan papa dan mama sekalian kepada penulis. Maaf kalau selama hidup papa dan mama penulis sering sekali berbuat kesalahan dan belum dapat membuat papa dan mama bangga. Terima kasih banyak pula kepada bunda **Nani Dahniarni** yang dengan ikhlas melanjutkan perjuangan mama dan papa untuk menghidupi keluarga. Terima kasih banyak kepada mas **Dhewa Edikresnha** (beserta **Dyah Kemala** selaku istri beliau) karena telah menjadi teman yang sangat baik bagi penulis di keluarga, di mana penulis bisa bebas mengekspresikan segala hal yang ada di pikiran maupun perasaan penulis sekaligus mengingatkan penulis akan pentingnya peran agama dalam kehidupan. Terima kasih banyak kepada mas **Priadhana Edikresnha**, yang meskipun terkadang agak “sok” dan “sombong”, namun sangat baik dan ramah. Terima kasih banyak atas instalasi komputer serta akses internet di rumah yang telah banyak membantu (sangat amat banyak membantu bahkan) kemudahan pengerjaan tugas-tugas kuliah penulis, dari mulai review, makalah, hingga skripsi. Entahlah bagaimana jadinya kehidupan kuliah penulis tanpa kehadiran komputer dan internet di rumah. Terima kasih banyak kepada **Zahra Fadhila**, adik penulis yang telah mengajari bagaimana menjalani hidup sehat, dari mulai memakai masker ketika berpergian hingga bagaimana menjalani program diet sehat. Terima kasih banyak kepada **Durra Zahira**, yang telah mengajari penulis bahwa tujuan hidup sangatlah penting untuk menentukan ke mana harus melangkah dan jalan mana yang harus dipilih. Terima kasih banyak kepada **Muhammad Syahir Fadhil** yang telah mengajari penulis bahwa kecerdasan setiap orang berbeda-beda, dan kecerdasan interpersonal serta interpersonal merupakan kecerdasan paling penting untuk mencapai kesuksesan hidup yang ironisnya justru sering diremehkan oleh banyak orang. Terima kasih sekali lagi kepada keluarga penulis yang telah memberikan begitu banyak perhatian dan dukungan kepada penulis yang mungkin selama ini penulis sering lihat hanya dengan sebelah mata.

Terima kasih untuk pembimbing skripsi penulis, Mbak **Ani Widyani Soetjipto** atas segala bimbingan, transfer ide, dan diskusi baik sebelum, selama, maupun sesudah pengerjaan skripsi penulis. Mbak Ani merupakan salah satu dari segelintir dosen HI di mana penulis benar-benar merasa nyaman untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Terima kasih pula untuk Mbak **Dwi Ardhanariswari** yang telah menjadi pembimbing akademik yang luar biasa sekaligus menjadi penguji ahli yang sukses “membantai” penulis di saat sidang skripsi. Tanpa Mbak Riris dan Mbak Ani, tidak mungkin sidang skripsi penulis menjadi sidang yang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penulis *such an unforgettable thesis defense*.

Terima kasih pula kepada “keluarga” penulis alias teman satu kost-an selama di SMA: **Rino Sriwijaya, Ervid Mifthah Pradipta, Gorbachez Partahi**

Bonar, Hanindhita Guritna, Haryo Dwi Prabowo, dan yang lainnya. Terima kasih atas momen-momen karaoke-an, jalan-jalan malam, “pelantikan”, buka puasa bersama, sahur bersama, menonton American Idol, makan malam (dan makan di waktu-waktu lainnya), curhat, dan segala memori luar biasa lainnya. Belum lagi kenangan ketika kita sama-sama berfoto dan mengevakuasi diri sewaktu banjir mengenangi SMA kita. Karena kalian-lah penulis bisa membangkitkan “Nasrul yang ambisius” di masa-masa SMA. Kalau tidak ada kalian, tidak mungkin penulis bisa mencapai prestasi yang optimal di akhir masa-masa SMA. Bersama kalian, penulis mengalami momen-momen yang tidak terlupakan. Terima kasih telah mewarnai masa SMA penulis dan memberikan memori yang luar biasa.

Terima kasih pula kepada teman-teman organisasi di masa kuliah, mulai dari teman-teman Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI 2010, terutama kak **Muhamad Arfandi Nasrullah, Anggun Nadia Fatimah**, dan **Anita Rosalina** yang telah menjadi pimpinan yang luar biasa dan mengajarkan banyak hal kepada penulis mengenai politik kampus dan kepemimpinan. Terima kasih pula kepada *partner* penulis **Alhamudin Maju Hamonangan Sitorus** karena melalui Anjulah penulis dapat menganalisis apa saja yang kurang dari penulis dan apa saja yang harus diperbaiki.

Terima kasih kepada teman-teman Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI 2011, terutama rekan-rekan sesama pimpinan, **Yuliniar Lutfaida** dan **Choirunnisak Fauziati** yang telah menjadi tangan kanan dan tangan kiri penulis dengan sangat luar biasa. Terima kasih pula kepada teman-teman “karaokean” dan teman-teman terdekat penulis di BPM FISIP UI 2011 seperti **Tommi, Sari, Ajeng, Sita, Selfi, Muhtar, Winda, Lutfi, Rara, Siska, Joan**, dan yang lainnya.

Terima kasih kepada segenap teman-teman HI 2008, terutama teman-teman yang telah mewarnai hari-hari penulis di FISIP UI dengan ribuan cerita dan canda tawa. Terima kasih banyak **Teuku Adrian Rahmat** yang telah menemani hari-hari penulis di tahun pertama perkuliahan dan beberapa hari di tengah-tengah tahun perkuliahan dengan jalan-jalan, menginap, mengerjakan tugas, membaca komik, mengobrol, dan sebagainya. Terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik di mana penulis bisa merasa nyaman untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih banyak **Sri Rezeki** yang telah menjadi teman di mana penulis paling merasa nyaman untuk bercerita dan berbagi banyak hal termasuk hal-hal yang paling kontroversial sekali pun. Terima kasih untuk saling tukar pikiran mengenai hal-hal remeh seperti *gebetan* hingga filosofi hidup dan Tuhan. Terima kasih banyak **Raisa Muthmaina** yang telah menjadi teman “curhat” penulis terutama di masa-masa akhir perkuliahan. Terima kasih banyak **Nico Deralima Novito** yang telah berbesar hati untuk terbuka kepada penulis mengenai beberapa hal. Terima kasih banyak **Umi Yanti Febriana Silalahi** dengan kata-katanya yang sangat luar biasa dan sangat memotivasi penulis di kala penulis merasa *down*. Terima kasih banyak **Riza Aryani** yang selalu sukses membuat penulis terkagum-kagum dengan kefasihan berbahasa Inggris dan karismanya ketika berbicara di depan umum. Terima kasih banyak kepada **Mita Yesyca** dan **Romarga Albertha Constantine Waworuntu** yang telah menjadi “saudara tiri” penulis selama berada di bawah bimbingan Mbak Ani, yang telah saling berbagi kegalauan

skripsi terutama menjelang akhir periode perkuliahan. Terima kasih banyak **Machfudz Agung Nugroho** yang telah memperkenalkan penulis ke dunia legislatif alias Badan Perwakilan Mahasiswa.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh teman-teman HI 2008 yang lain. Teman-teman *cluster* Masyarakat Transnasional yaitu **Ipeeh, Tebe, Adhy, Iqbal, Ria, dan Dafy**. Teman-teman makan siang penulis seperti **Tulus, Deny, Yonathan, Melisya, Sorang**, dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk teman-teman junior penulis di HI, terutama untuk **Halimun Muhammad, Indah Gilang Pusparani, dan Hanna Theresia Alda Siahaan** yang telah menemani makan siang bersama penulis se usai mata kuliah KJIG. Terima kasih pula **Bagus Yudoprakoso** yang telah bersedia penulis invasi kamarnya. Terima kasih **Husni Mubarak** yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga bagi penulis dalam berbagai hal.

Terima kasih banyak untuk dosen-dosen yang telah memercayakan penulis untuk menjadi asisten dosen mata kuliah mereka, Mbak **Kintan**, Mas **Pram**, Mas **Erwin**, Mbak **Suzie**, dan Mbak **Jona**. Terima kasih untuk junior-junior penulis baik angkatan 2009, 2010, maupun 2011. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sesama asisten dosen baik pada semester ganjil maupun semester genap.

Terima kasih untuk game-game playstation, terutama Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Lunar, Tekken III, Suikoden I, Suikoden II, Xenogears, Dragon Ball, dan game-game Playstation lain yang sempat penulis mainkan. Terima kasih pula untuk berbagai telenovela, sinetron (terutama sinetron di bulan Ramadhan) dan berbagai hiburan yang memperindah memori masa kecil penulis. “Melihat” kalian lagi di youtube merupakan aktivitas yang membuat terharu sekaligus membuat kangen akan masa-masa kecil penulis.

Terima kasih untuk Mbah **Google** yang selalu membantu penulis menyelesaikan tugas-tugas penulis. Tanpa kehadiranmu, mungkin penulis tidak akan bisa lulus dari Departemen HI, hihihih. ☺ *For me, you're more than just a website, you're my second lecturer.*

Pada akhirnya, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga dan teman-teman atas segala hal yang pernah penulis lakukan yang mungkin menyinggung hati kalian. Pada akhirnya penulis adalah manusia biasa yang berlumuran dosa. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan di dunia akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasrullah Noor Edikresnha
NPM : 0806352334
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Konsep Nasionalisme China di Era Globalisasi terhadap Etnik Minoritas Uighur di Xinjiang pada Tahun 2001-2010

dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 24 Juni 2012
Yang menyatakan


Nasrullah Noor Edikresnha

**Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Program Sarjana Reguler**

Nasrullah Noor Edikresnha (0806352334)

Implementasi Konsep Nasionalisme China di Era Globalisasi terhadap Etnik Minoritas Uighur di Xinjiang pada Tahun 2001-2010

(xi+77) halaman + daftar pustaka (21 buku + 22 jurnal + 32 artikel internet)

ABSTRAK

Globalisasi memang telah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, namun signifikansinya di abad ke-21 ini sangat besar. Melalui penelitian kali ini, penulis akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana pengaruh globalisasi tersebut terhadap pembentukan nasionalisme sebuah negara, yang dalam hal ini akan penulis kaitkan dengan nasionalisme China. Penulis juga akan melihat bagaimana konsep nasionalisme yang telah terpengaruh arus globalisasi ini diimplementasikan terhadap etnik minoritas Uighur di Xinjiang melalui rentang waktu 2001-2010. Untuk melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif terutama dilakukan mengenai studi literatur-literatur mengenai globalisasi, nasionalisme China, serta Uighur.

Kata kunci: globalisasi, nasionalisme, nasionalisme China, Uighur.

ABSTRACT

Name : Nasrullah Noor Edikresnha
Study Program : International Relations
Title : The Implementation of Chinese Nationalism toward
Uighur Ethnic Minority in Xinjiang from 2001-2010

Globalization has been happening for hundred of years, yet, its significance in the 21st century is indeed very huge. In this research, I would like to know deeper on how the globalization shapes the concept of nationalism of a nation-state. In this research, I would use China as an example. I also want to dig deep on how this nationalism which has been affected by globalization is being implemented on the Uyghur ethnic minority in Xinjiang from 2001 to 2010. In doing this research, I would use qualitative research method, more specifically by emphasizing the literature studies about globalization, Chinese nationalism, and Uyghur.

Keywords: globalization, nationalism, Chinese nationalism, Uyghur.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Permasalahan	4
1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	5
1.4. Tinjauan Pustaka	6
1.4.1. Nasionalisme	6
1.4.2. Kolonialisme Internal	8
1.5. Asumsi Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Teknik Pengumpulan Data	10
1.6.2. Analisa Data	11
1.7. Sistematika Penulisan	12
BAB 2. PEMBENTUKAN NASIONALISME CHINA	14
2.1. Peran Sun Yat-sen sebagai Bapak China Modern	14
2.2. Kepemimpinan Deng Xiaoping sebagai Titik Balik	21
2.2.1. Globalisasi, Teori Deng Xiaoping, dan <i>Reform and Opening</i>	21
2.2.2. Kebangkitan Peran Teknokrat dan Importasi Bentuk Negara	23
2.3. Keterkaitan antara Globalisasi, Nasionalisme, dan Bentuk Negara	25
2.4. Nasionalisme China di Abad 21	29

BAB 3. PEMBENTUKAN IDENTITAS ETNIK UIGHUR DAN IMPLEMENTASI KONSEP NASIONALISME CHINA	36
3.1. Pembentukan Identitas Etnik Uighur di China	36
3.1.1. Identitas Politik-Historis	38
3.1.2. Identitas Agama	41
3.1.3. Identitas Regional	43
3.2. Kebijakan Nasionalisme Pemerintah China	44
3.2.1. Kebijakan Transmigrasi Etnik Han	45
3.2.2. Kebijakan Otonomi Terbatas	49
3.2.3. Kebijakan Represi Langsung	50
3.3. Faktor-faktor Lain yang Memengaruhi Kebijakan Pemerintah China	54
3.3.1. Faktor Geopolitik dan Geostrategis	55
3.3.2. Faktor Ekonomi	56
3.4. Konsep Nasionalisme China: Otoritas Negara atau Pelanggaran HAM?	57
BAB 4. ANALISIS	61
4.1. Globalisasi dan Pembentukan Nasionalisme China	61
4.2. Nasionalisme Sipil Versus Etnonasionalisme	64
4.3. Kolonialisme Internal di Xinjiang	67
4.4. Nasionalisme China dan Pelanggaran HAM	68
BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	70
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dingin pada akhir abad ke-20 merupakan titik tolak baru bagi dinamika hubungan internasional. Fenomena ini telah menyisakan Amerika Serikat sebagai negara *superpower* di dunia dan meninggalkan Uni Soviet yang runtuh dan menyisakan negara-negara bekas Uni Soviet seperti Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Armenia, Tajikistan, Estonia, dan sebagainya.¹ Momen ini juga menandai runtuhnya rezim komunisme di dunia yang sebelumnya diusung-usung oleh Uni Soviet. Beberapa akademisi dan praktisi hubungan internasional pun percaya bahwa perang ideologi antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan pendukung kedua negara tersebut pun telah selesai.²

Fenomena berakhirnya Perang Dingin juga bukan hanya menandai berakhirnya perang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat yang bersamaan, gelombang globalisasi juga terus meningkat dan berkembang pesat. Ini terutama dikarenakan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menghubungkan unit-unit manusia di satu tempat ke berbagai tempat lainnya di dunia.³ Fenomena globalisasi yang membentuk adanya pasar tunggal dunia pun berpengaruh terhadap segala sektor kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, hingga budaya.⁴

China merupakan salah satu negara pascaruntuhnya Uni Soviet yang digaung-gaungkan dapat melampaui hegemoni Amerika Serikat di dunia dalam hubungan internasional. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan mengingat apabila

¹ _____, "The First Ten Years: Analysis and Lessons for Eastern Europe and Former Soviet Union", Washington DC: The World Bank, 2002 halaman xvii – xviii, dapat diakses melalui <http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/complete.pdf>.

² John T. Jost, "The End of The End of Ideology", dalam *American Psychologist*, vol 61 (7), Oktober 2006, halaman 651.

³ _____, "Roles of Information and Communication Technology in Managing Globalization at the National and Regional Levels", dalam *United Nations Economic and Social Comissions for Asia and the Pacific*, halaman 5 – 10, dapat diakses melalui http://www.unescap.org/tid/projects/globalize_hajela.pdf.

⁴ Takis Fotopoulos, "Globalization, the Reformist Lest, and the Anti-Globalization Movement", *Democracy & Nature: The International Journal of Inclusive Democracy*, volume 7(2), Juli 2001, dapat pula diakses melalui http://www.inclusivedemocracy.org/dn/vol7/takis_globalisation.htm.

kita mencoba untuk menghubungkan dengan konsep *power*, maka China memiliki potensi *power* yang besar dengan jumlah penduduk yang melebihi angka satu milyar, wilayah geografis yang amat besar, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan berbagai faktor lainnya. Ini ditambah pula dengan fakta bahwa China semakin memperkuat dirinya melalui pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat hingga mencapai dua digit dan juga pembangunan kekuatan militernya. Tidak dapat dimungkiri bahwa kebangkitan China merupakan salah satu fakta dinamika hubungan internasional di abad ke-21 ini. Bahkan beberapa cendekiawan pun memprediksi suatu saat nanti di masa depan China akan menjadi suatu kekuatan baru dalam kancah hubungan internasional dan memiliki potensi yang besar pula untuk melampaui Amerika Serikat.

Seperti yang penulis telah kemukakan sebelumnya, globalisasi pasti akan memberikan dampak kepada pembentukan identitas seseorang, masyarakat, maupun negara-bangsa. Begitu pula dengan apa yang dialami oleh China. Runtuhnya rezim Uni Soviet, kebangkitan perekonomian China yang sangat pesat, dan arus globalisasi yang terus terjadi membuat China merasa perlu untuk memiliki suatu hal yang dapat memberikan identitas nasional tertentu bagi masyarakatnya yang dapat membedakan masyarakat di China dengan masyarakat di negara lainnya sekaligus mengintegrasikan rasa persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Perlu diingat bahwa sebenarnya negara-bangsa pun memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembentukan identitas nasional masyarakat di dalam negara-bangsa tersebut. Oleh karena itu China percaya bahwa penggunaan nasionalisme untuk membentuk identitas kesatuan di antara masyarakat China pun diperlukan.⁵

Hal menarik yang harus diperhatikan adalah bagaimana usaha pemerintah China untuk mengimplementasikan konsep nasionalisme tersebut terhadap warganya. Ternyata, tidak seluruh masyarakat yang berada di China merupakan keturunan China (di sini, terminologi keturunan China atau bangsa China orang awam identikkan dengan etnik Han yang merupakan salah satu etnik di China

⁵ _____, halaman 10 – 11, dapat diakses melalui <http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/34907/6/503206.pdf>.

dengan jumlah yang paling signifikan).⁶ Beberapa etnik seperti masyarakat di wilayah Tibet dan etnik Uighur di Xinjiang ternyata tidak memiliki identitas yang serupa dengan masyarakat China kebanyakan, baik secara historis, kultural, maupun budaya.⁷ Hal ini tentu saja memberikan tantangan bagi pemerintah China bagaimana merangkul dan mengintegrasikan serta membentuk identitas bangsa China kepada etnik minoritas tersebut yang secara identitas berbeda dengan kebanyakan masyarakat China lainnya.

Berbagai cara telah pemerintah China lakukan dalam usahanya untuk mengintegrasikan Uighur ke dalam satu-kesatuan negara China. Meskipun memang Uighur di Xinjiang masih berada di bawah kedaulatan China dan di bawah otoritas pemerintah China, permasalahan yang ada saat ini tampaknya masih jauh dari target tujuan yang diharapkan. Tingkat investasi dan propaganda yang cukup tinggi tampaknya masih belum dapat mencapai hasil optimal yang harmoni, stabil, dan integratif di Xinjiang sebagaimana yang disebutkan dalam *White Papers* pemerintah China tahun 2003 dan 2009.⁸ Ini dapat terlihat dari kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu Krisis Urumqi tahun 2009. Di sini terlihat jelas belum berhasilnya kebijakan China dalam menangani gerakan etnik dan separatisme yang mendestabilisasi Xinjiang.⁹ Masalah ini tentunya menjadi perhatian yang besar bagi para akademisi, Sinolog, maupun praktisi politik.

Penting untuk mengontekstualisasi rasa ketidakpuasan yang terus berlanjut dan semakin menjadi-jadi mengingat adanya *White Paper* tahun 2009 yang membicarakan tentang perkembangan ekonomi di daerah tersebut,¹⁰ Penting pula untuk merefleksikan mengenai apa yang menyebabkan etnik minoritas tersebut menjadi kasar dan nonkooperatif ketimbang mengadopsi cara-cara yang lebih damai.

⁶ National Bureau of Statistics of China, “*Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census*[1] (No. 1)”, http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm.

⁷ Wenfang Tang dan Gaochao He, “Separate but Loyal: Ethnicity and Nationalism in China”, dalam *Policy Studies* 56, 2010, halaman 8 – 11, <http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/ps056.pdf>.

⁸ Bhavna Singh, “Ethnicity, Separatism, and Terrorism in Xinjiang: China's Triple Conundrum”, dalam *Institute of Peace and Conflict Studies Special Report*, Agustus 2010, halaman 1, http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/SR96.pdf.

⁹ Shan Wei dan Chen Gang, “The Urumqi's Riots and China Ethnic Policy in Xinjiang”, dalam *East Asian Policy*, halaman 14 – 16, http://www.eai.nus.edu.sg/Vol1No3_ShanweiChenGang.pdf.

¹⁰ Bhavna Singh, *Ibid.*, halaman 1.

Pada penelitian ini, akan dibahas secara lebih mendalam karakteristik dari berbagai faktor yang memengaruhi hubungan antara Uighur di Xinjiang dengan China. Penulis akan menyoroti bagaimanakah implementasi konsep nasionalisme China yang dipengaruhi oleh arus globalisasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang di abad ke-21 ini. Penelitian ini juga akan berusaha untuk menggali kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh China untuk menghadapi ancaman ‘tiga setan’, yaitu ekstrimisme, terorisme, dan separatisme, dan juga keterkaitan antara Xinjiang dengan kebijakan luar negeri China terkait negara-negara tetangga di sekitarnya.¹¹ Selain mengkaji masalah-masalah apa saja yang mewarnai hubungan di antara keduanya, tentu saja diharapkan di akhir penelitian ini dapat diberikan rekomendasi-rekomendasi yang berguna untuk menciptakan perdamaian di antara keduanya.

1.2 Pertanyaan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka pada penelitian kali ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang **bagaimanakah implementasi konsep ‘nasionalisme China’ di era globalisasi terhadap etnik minoritas Uighur di Xinjiang pada tahun 2001-2010?**

Untuk membuat penjelasan lebih mendalam dan saling berkaitan satu sama lain, maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan di bab-bab berikutnya tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap pembentukan identitas nasional masyarakat China yang diterapkan oleh pemerintah melalui ‘nasionalisme China’. Setelah itu penulis akan berusaha menganalisis lebih jauh lagi bagaimana pemerintah China menerapkan konsep ‘nasionalisme China’ terhadap etnik minoritas Uighur di Xinjiang dalam rentang waktu antara tahun 2001-2010. Rentang waktu ini penulis ambil melalui beberapa alasan. Pertama, rentang waktu ini merupakan masa-masa di mana arus globalisasi menjadi semakin cepat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang makin pesat pula. Kedua, rentang waktu ini juga merupakan masa-masa di mana wacana kebangkitan China sangat marak terjadi, terutama di bidang perekonomian serta

¹¹ Elizabeth Van Wie Davis, “Uyghur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, China”, Asia-Pacific Center for Security Studies, Januari 2008, halaman 3, diakses melalui http://www.apcss.org/wp-content/uploads/2010/PDFs/APCSS_UyghurMuslimSeparatismInXinjiang.pdf.

kancah China dalam dinamika hubungan internasional. Ketiga, tahun 2001 merupakan tahun penting karena pada saat inilah terjadi peristiwa 9/11. Setelah kejadian tersebut, isu terorisme dan perang melawan terorisme pun terus mencuat ke permukaan dan tidak dapat dimungkiri hal tersebut biasanya ditujukan kepada agama tertentu 'Islam'. Ironisnya, sebagian besar etnik Uighur juga beragama Islam dan bahkan identitas Islam tidak dapat dilepaskan dari masyarakat Uighur. Oleh karena itu penulis melihat seharusnya terdapat korelasi yang kuat antara faktor eksternal 9/11 ini dengan implementasi konsep 'nasionalisme China' terhadap bangsa Uighur di Xinjiang.

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penulis sebenarnya melihat ada dua tujuan utama yang ingin penulis capai dalam penelitian kali ini. Tujuan pertama adalah untuk melihat pengaruh globalisasi terhadap pembentukan nasionalisme China yang tentunya tidak terlepas dari bagaimana China merespon fenomena globalisasi yang terjadi saat ini. Penulis melihat bahwa pada dasarnya identitas nasional merupakan manifestasi dari nasionalisme. Oleh karena itu pembahasan mengenai nasionalisme dan identitas nasional tidak dapat dilepaskan satu sama lain.

Kedua, penulis juga ingin mengetahui bagaimana proses pembentukan nasionalisme China tersebut kepada masyarakatnya, terutama masyarakat minoritas seperti etnik Uighur di Xinjiang. Penulis melihat bahwa ini menarik untuk diteliti mengingat secara geopolitik etnik Uighur di Xinjiang memang masih di dalam wilayah kedaulatan China. Tapi secara historis, bahasa, kultur, dan agama, etnik Uighur ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan China, terutama etnik Han yang merupakan etnik mayoritas di China. Dengan melihat permasalahan tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh sebenarnya bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan China untuk dapat mengintegrasikan etnik Uighur tersebut dan membentuk jiwa nasionalisme etnik Uighur ke dalam nasionalisme China secara keseluruhan.

Melalui dua tujuan utama tersebut, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan ke dalam khazanah ilmu hubungan internasional kontemporer, terutama dalam hal bagaimana globalisasi berpengaruh

terhadap respon negara dalam membentuk rasa nasionalisme masyarakatnya, termasuk pula masyarakat yang mungkin menjadi minoritas negara tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah negara-negara lain dapat belajar bagaimana proses pembentukan rasa nasionalisme yang baik seharusnya dapat dilakukan, terutama proses pembentukan identitas nasional terhadap etnik minoritas yang mungkin secara historis, kultural, bahasa, dan agama berbeda dengan masyarakat lainnya di negara yang bersangkutan.

1.4 Tujuan Pustaka

1.4.1 Nasionalisme

Pembahasan mengenai nasionalisme adalah pembahasan yang cukup rumit mengingat banyak sekali tokoh tokoh politik serta akademisi yang mencoba untuk mendefinisikan nasionalisme melalui perspektif yang berbeda-beda pula. Secara umum nasionalisme bisa dikatakan sebagai ideologi politik yang menjelaskan tentang seberapa kuat identifikasi kelompok individu-individu dengan entitas politik yang didefinisikan dalam terminologi nasional, misalnya saja sebuah bangsa. Anthony D. Smith berpandangan bahwa rasa nasionalisme-lah yang menciptakan identitas nasional.¹² Ada berbagai definisi mengenai apa yang termasuk ke dalam sebuah bangsa yang berujung pada jenis-jenis nasionalisme yang berbeda-beda pula. Ada yang berkeyakinan bahwa kewarganegaraan dalam sebuah negara seharusnya terbatas bagi satu kelompok etnik, kultur, agama, atau identitas. Ada pula yang berpandangan 'multinasionalitas' di mana dalam satu negara tunggal harus memiliki ruang bagi kelompok minoritas untuk mengekspresikan dan mempraktikkan identitas mereka.¹³

Salah satu tokoh yang seringkali dijadikan rujukan ketima membahas nasionalisme ada Benedict Anderson. Menurut Anderson, nasionalisme juga dapat dipandang sebagai identitas kolektif yang tertuang ke dalam *imagined communities* yang tidak harus selalu diekspresikan dalam bahasa, ras, maupun agama, namun lebih cenderung kepada konstruksi sosial individu-individu yang merupakan

¹² Anthony D. Smith, *National Identity*, (Reno: University of Nevada Press, 1993), halaman 71.

¹³ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), halaman 16.

bagian dari bangsa tersebut.¹⁴ Nasionalisme ada yang bersifat reaksionaris di mana terdapat acuan untuk kembali pada masa lalu, ada pula nasionalisme yang bersifat revolusionaris, di mana terdapat usaha untuk mendirikan negara baru sebagai tanah air bagi etnik yang cenderung berada pada kelas bawah (*underclass*).

Beberapa pandangan tokoh lain terkait nasionalisme juga menekankan pada identitas kolektif di mana masyarakat harus otonom, bersatu, dan mengekspresikan kultur nasional tunggal.¹⁵ Nasionalisme integral mengakui bahwa sebuah bangsa merupakan unit organik, dengan sebuah hirarki sosial, kerja sama antara kelas-kelas sosial yang berbeda, dan tujuan politik yang sama. Meskipun begitu, ada pula pandangan dari kelompok nasionalis liberal yang menekankan individualisme sebagai bagian yang penting dari identitas nasional mereka.¹⁶

Untuk lebih mengoptimalkan pembentukan nasionalisme tersebut, dibentuklah simbol-simbol identitas nasional yang dianggap suci seperti bendera nasional maupun lagu kebangsaan nasional. Diharapkan simbol-simbol tersebut akan meningkatkan kedalaman emosi terhadap negaranya.¹⁷

Secara sederhana nasionalisme ini dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu nasionalisme sipil dan nasionalisme etnik (etnonasionalisme). Anthony D. Smith dalam tulisannya yang berjudul "Theories of Nationalism" bahwa nasionalisme sipil mengacu pada jenis nasionalisme di mana anggotanya memiliki relasi dalam hal tempat kelahiran atau tempat tinggal. Anggota-anggota tersebut memiliki kewarganegaraan dalam sebuah komunitas teritori politik dan terintegrasi melalui sistem legal terpadu dan juga *public culture* yang biasa termanifestasikan dalam bahasa nasional. Di nasionalisme sipil ini, halangan untuk menjadi anggota di dalamnya terbilang rendah. Biasanya seseorang bisa menjadi anggota dalam tipe nasionalisme ini apabila lahir, tinggal dalam jangka waktu tertentu, mengadopsi

¹⁴ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (New York: Verso, 1991), halaman 37–46.

¹⁵ John Hutchinson dan Anthony D. Smith, ed., *Nationalism*, (Oxford: Oxford University Press, 1994), halaman 4–5.

¹⁶ Anthony D. Smith, *Nationalism*, (Polity: 2002), halaman 17-20.

¹⁷ Michael Billig, *Banal Nationalism*, (London: Sage, 1995).

kultur serta bahasa setempat, dan sebagainya (biasanya dipakai oleh negara-negara yang menerapkan *ius soli*).¹⁸

Di sisi lain, nasionalisme etnik atau etnonasionalisme anggota-anggota di dalamnya memiliki relasi melalui keturunan mitos-mitos yang sama, dan dibedakan dengan mereka yang berasal dari kelompok lain melalui persamaan bahasa, adat-istiadat, agama, dan sejarah. Di nasionalisme etnik ini, halangan untuk masuk terbilang besar karena secara umum hanya mereka yang memiliki keturunan yang berasal dari etnik yang sama-lah yang bisa menjadi bagian dari nasionalisme etnik tertentu ini.¹⁹

1.4.2 Kolonialisme Internal (*Internal Colonialism*)

Kolonialisme internal merupakan istilah yang pertama kali digunakan pada tahun 1957 oleh Leo Marquard untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Afrika Selatan.²⁰ Penggunaan istilah ini semakin populer setelah digunakan pula oleh Pablo Gonzalez Casanova pada tahun 1965 ketika Casanova menulis artikel tentang apa yang terjadi di Meksiko.²¹ Perlu diingat bahwa istilah 'kolonialisme internal' dan 'neokolonialisme' merupakan dua terminologi yang berbeda. Kolonialisasi pada 'neokolonialisme' datangnya dari luar negara-bangsa yang bersangkutan misalnya saja bagaimana Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mengolonialisasi Negara Dunia Ketiga, sedangkan kolonialisasi dalam 'kolonialisme internal' datangnya dari internal negara-bangsa yang bersangkutan

Secara singkat, kolonialisme internal merupakan sebuah konsep yang berusaha untuk menjelaskan fenomena ketidaksetaraan atau ketimpangan antara beberapa wilayah dalam satu kedaulatan negara. Lebih jauh lagi, ketidaksetaraan atau ketimpangan ini biasanya digunakan dalam konteks pembangunan ekonomi di mana terjadi fenomena eksploitasi kelompok-kelompok tertentu yang

¹⁸ Anthony D. Smith, "Theories of Nationalism", dalam buku yang diedit oleh Michael Leifer, *Asian Nationalism*, (Routledge: London dan New York, 2000), halaman 16.

¹⁹ Anthony D. Smith, *Ibid.*, halaman 16.

²⁰ Leo Marquard, *South Africa's Colony Policy*, (Institute of Race Relations: Johannesburg, 1957), yang dikutip oleh Alubabari Desmond Dbete, "Ogoni as an Internal Colony: A Critique of Imperialism", *International Journal of Humanities and Social Science*, volume 2(3), 2012, halaman 53.

²¹ Pablo Gonzalez Casanova, "Internal Colonialism and National Development", dalam *Studies in Comparative International Development*, volume 1(4), 1965, halaman 27-37, yang dikutip dalam tulisan Jack Hicks, "On the Application of Theories of 'Internal Colonialism' to Inuit Societies", halaman 8, dapat diakses melalui <http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2004/Hicks.pdf>.

merupakan kelompok minoritas dari penduduk negara yang bersangkutan. Kelompok-kelompok tersebut bisa diklasifikasikan sesuai dengan kepentingannya (terutama melalui variabel kultural) seperti etnisitas, bahasa, dan agama. Mereka yang tereksplorasi tersebut diistilahkan sebagai “koloni internal”.²²

Apabila ada yang dikoloni, tentunya ada pula pengoloninya. Biasanya mereka yang mengoloni adalah mereka yang berada di pusat kota atau pusat pemerintahan suatu negara. Mereka yang dikoloni biasanya tereksklusi dari posisi sosial dan politik yang strategis. Tentu saja ini dikarenakan pos-pos strategis tersebut telah diisi oleh kelompok dekat dengan pusat, penguasa, atau kelompok mayoritas.²³

Meskipun begitu ternyata ada pula kritikan terhadap konsep ini. Misalnya saja kritik dari Andre Gunder Frank yang lebih jauh lagi meneorisasi kolonialisme internal sebagai bentuk ‘ketimpangan pembangunan’ (*uneven development*).²⁴ Dalam penelitian kali ini, penulis akan tetap menggunakan istilah kolonialisme internal karena penulis merasa ketimpangan yang terjadi antara masyarakat Uighur di Xinjiang dengan pemerintah China lebih dari sekedar masalah ekonomi, namun juga karena faktor identitas, konstelasi politik, isu-isu eksternal, dan sebagainya.

1.5 Asumsi Penelitian

1. Fenomena globalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan konsep nasionalisme suatu negara.
2. Tiap-tiap pemimpin negara akan berusaha dan memiliki cara masing-masing untuk menumbuhkan serta membentuk jiwa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat.
3. Pembentukan identitas nasional tersebut juga berlaku terhadap etnik minoritas yang ada di negara yang bersangkutan untuk mencegah separatisme dan membentuk integrasi masyarakat.

²² Alubabari Desmond Dbete, *Op. Cit.*, halaman 53-57.

²³ Alubabari Desmond Dbete, *Ibid.*

²⁴ Andre Gunder Frank, *Latin America: underdevelopment or revolution: essays on the development of underdevelopment and the immediate enemy*, (New York/London: Monthly Review Press, 1970), yang dikutip melalui tulisan Alubabari Desmond Dbete, *Op. Cit.*, halaman 57.

4. Pembentukan identitas nasional oleh negara tersebut bisa saja mengalami pertentangan secara internal dari masyarakatnya sendiri.

1.6 Metodologi Penelitian

Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian ini setelah mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, penulis melihat bahwa fenomena pengaruh globalisasi terhadap pembentukan nasionalisme masih merupakan fenomena baru dalam khazanah ilmu hubungan internasional pada abad ke-21. Penulis melihat hal ini menyebabkan masih sulitnya untuk mengambil pola-pola yang umum dan mapan terkait kasus yang ingin penulis bahas di penelitian ini. Kedua, melalui studi kasus ini, penulis juga ingin membangun argumentasi sebab-akibat (kausal) terkait pengaruh globalisasi terhadap usaha pembentukan nasionalisme masyarakat minoritas etnik Uighur di Xinjiang oleh China. Ini berlandaskan pada logika studi kasus itu sendiri yaitu untuk menunjukkan sebuah argumentasi sebab-akibat mengenai bagaimana *general social forces* membentuk dan memproduksi hasil dalam *setting* tertentu.²⁵ Ketiga, berdasarkan keterangan dari Neuman, penulis mendapati bahwa penelitian kualitatif juga cenderung lebih terbuka untuk menggunakan variasi bukti dan pengungkapan isu-isu baru. Atas ketiga pertimbangan tersebut, penulis pun pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian kali ini.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data serta berbagai informasi dalam penelitian kali ini, teknik utama yang akan penulis gunakan adalah melalui studi literatur (kajian kepustakaan) serta studi dokumen. Studi literatur akan penulis dapatkan melalui buku dan jurnal yang telah dipublikasikan. Melalui studi literatur ini, diharapkan dapat menemukan beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Melihat gambaran secara umum mengenai bagaimana pengaruh globalisasi terhadap dinamika pembentukan identitas nasional yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya.

²⁵ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Allyn & Bacon : Boston, 2003), halaman 33.

2. Melihat gambaran bagaimana karakteristik nasionalisme China era kontemporer yang membuatnya unik ketimbang nasionalisme di negara lain.
3. Melihat keterkaitan antara respon China terhadap globalisasi dengan implementasi konsep nasionalisme China terhadap etnik minoritas Uighur di Xinjiang
4. Melihat faktor-faktor eksternal terkait yang memengaruhi proses implementasi konsep nasionalisme China terhadap etnik Uighur.
5. Melihat respon yang diberikan masyarakat etnik Uighur terkait implementasi konsep nasionalisme China tersebut.

Adapun untuk studi dokumen, pengumpulan data dan informasi akan diperoleh melalui dokumen primer dan juga dokumen sekunder. Dokumen primer akan penulis dapatkan melalui situs-situs resmi organisasi maupun pemerintah terkait topik penelitian. Sedangkan untuk studi dokumen yang bersifat sekunder, penulis akan mengumpulkan data dari media massa, seperti situs-situs di internet, majalah, koran, televise, radio, serta media lainnya.

1.6.2 Analisa Data

Secara garis besar, analisa data yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan selengkapnya mengenai tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pada tahap reduksi data ini, penulis akan mengumpulkan informasi-informasi yang didapat melalui berbagai sumber dan mereduksinya ke dalam sebuah pola, kategori, maupun tema, yang kemudian akan diinterpretasikan dengan menggunakan skema tertentu.²⁶ Penulis akan mereduksi data yang penulis temukan ke dalam klasifikasi kategori-kategori implementasi kebijakan pemerintah China terkait konsep ‘nasionalisme China’ terhadap etnik Uighur di Xinjiang. Pengklasifikasian atau pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori ini didasarkan pada

²⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (SAGE Publications, Inc : California, 1994), halaman 154

tema, konsep, atau kemiripan sifat.²⁷ Kategorisasi dalam tahap ini masih dapat berubah seiring dengan usaha penulis untuk menemukan informasi-informasi baru dan memastikan kategorisasi telah dilakukan telah tepat.

2. Penyajian data

Menurut Sugiyono, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart*, dan semacamnya.²⁸ Adapun dari cara-cara tersebut yang paling sering dilakukan adalah dengan menyajikannya melalui teks yang bersifat naratif.²⁹ Penulis pun dalam penelitian kali ini akan banyak menggunakan analisis deskriptif untuk melakukan pengujian terhadap perangkat kategori yang didapat untuk mencari hubungan antarkategori yang muncul dan membandingkan antarkategori data.

3. Kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang penulis harapkan dapat menjawab rumusan permasalahan yang penulis ajukan pada bab I. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan berisi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas hingga menjadi lebih jelas setelah dilakukan penelitian. Temuan ini dapat pula berupa hubungan sebab-akibat (kausalitas), interaktif, hipotesis, ataupun teori.³⁰

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian kali ini akan terdiri dari lima bab. Adapun rincian mengenai isi tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

1. BAB I: pada bagian ini penulis akan terlebih dahulu memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, dan tujuan serta signifikansi penelitian.

²⁷ Neuman, *op.cit.*, halaman 420-421.

²⁸ Sugiyono, Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Alfabeta : Bandung,2006), halaman 249.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, halaman 253.

2. BAB II: pada bagian ini penulis akan menjelaskan pengaruh dari globalisasi terhadap dinamika pembentukan nasionalisme oleh pemerintah China.
3. BAB III: pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana pembentukan identitas etnik minoritas Uigur di Xinjiang dan bagaimana implementasi dari kebijakan nasionalisme China pemerintah terhadap etnik Uighur tersebut. Penulis juga akan memasukkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terutama kejadian 9/11 tahun 2001.
4. BAB IV: pada bagian ini penulis akan berusaha menganalisis secara mendalam temuan-temuan pada penelitian di dua bab sebelumnya. Penulis akan mencoba menghubungkan temuan penulis dengan mengacu pada titik tolak penggunaan kerangka konseptual yang penulis utarakan pada bab I ini yaitu nasionalisme serta kolonialisme internal.
5. BAB V: pada bagian ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan juga rekomendasi terkait isu-isu di atas ataupun isu-isu yang serupa dengan isu yang penulis bahas di sini, sehingga praktisi maupun akademisi studi Hubungan Internasional atau pun mereka yang menduduki kursi pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dapat mengambil pelajaran dari penelitian yang penulis buat ini.

BAB II

PEMBENTUKAN NASIONALISME CHINA

Pada bab ini, penulis akan membahas secara lebih mendalam mengenai bagaimana globalisasi membentuk konsep tata negara China dan konsep nasionalisme China sedemikian rupa. Berdasarkan literatur yang penulis temukan, penulis pun melihat bahwa pada dasarnya konsep nasionalisme China dan bentuk negara China saat ini merupakan hasil dari importasi produk-produk nasionalisme dan bentuk tata negara yang berasal dari luar China (terutama dari negara-negara Barat). Pemerintah China kemudian tidak serta-merta menelan produk-produk impor tersebut, namun mengolahnya sedemikian rupa, mencoba untuk mengadaptasi dan menginovasiannya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat China dan agar masyarakat China sendiri cenderung dapat menerima produk-produk Barat tersebut dengan tangan terbuka dan tanpa adanya resistensi yang berlebihan. Ini membuktikan bagaimana globalisasi memperkenalkan China terhadap konsep nasionalisme dan serta *nationhood* dan tanpa adanya globalisasi serta penyerapan produk-produk eksternal tersebut, China tidak akan menjadi China saat ini.

Untuk lebih memperjelas kalimat penulis di atas, bisa dilihat kata-kata yang dicetuskan oleh Mao Zedong sebagai berikut:

“We should not gulp any of this foreign material down uncritically, but must treat it as we do our food—first chewing it, then submitting it to the working of the stomach and intestines with their juices and secretions, and separating it into nutriment to be absorbed and waste matter to be discarded—before it can nourish us”¹

2.1 Peran Sun Yat-Sen sebagai Bapak China Modern

Sebelum penulis masuk ke dalam penjelasan mengenai pengaruh globalisasi terhadap pembentukan nasionalisme China di era kontemporer, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai betapa pentingnya peran Sun Yat-Sen dalam pendirian bentuk negara China modern yang ada saat ini. Fakta bahwa Sun Yat-Sen sendiri mendirikan China pada awal abad ke-20 bukanlah sebuah

¹ Christopher R. Hughes, *Chinese Nationalism in the Global Era*, (Routledge: London dan New York, 2006) halaman 6.

masalah mengingat pada saat itu globalisasi pun telah terjadi dengan adanya kolonialisme berbagai negara oleh negara-negara Barat dan juga perdagangan internasional yang terjadi di dunia. Oleh karena itu pembahasan penulis melihat peran Sun Yat-Sen di sini masih dapat terhitung sebagai pengaruh globalisasi terhadap pembentukan konsep negara serta nasionalisme China modern, meskipun tentunya globalisasi yang terjadi pun berbeda dengan globalisasi yang terjadi saat ini. Apabila boleh meminjam argumentasi dari Thomas L. Friedman, penulis melihat bahwa globalisasi yang terjadi pada masa Sun Yat-Sen ini merupakan globalisasi 2.0 di mana dunia mulai menyusut akibat aktivisme perdagangan internasional oleh perusahaan multinasional serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang rentangnya waktunya berada pada kisaran tahun 1800 hingga 2000.²

Ketika keberadaan serta perjuangan Sun Yat-Sen mulai didengungkan di China pada awal abad ke 20, Sun Yat-Sen percaya bahwa China pun bisa menjadi bangsa yang besar dengan belajar dari Barat dan dengan mengimpor serta mengadaptasi nilai-nilai eksternal tersebut. Sun Yat-Sen percaya bahwa sistem kenegaraan dan kebangsaan modern yang banyak di pakai di negara-negara Barat seperti Eropa merupakan sistem modern yang dapat membantu pembentukan kedaulatan rakyat sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat China pada akses serta partisipasi politik.³

Penulis melihat bahwa manifestasi nyata akan kepercayaan Sun Yat-Sen ini adalah dengan dibentuknya *Hsing Chung Hui* atau dapat ditranslasikan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Revive China Society* (meskipun dapat pula ditranslasikan menjadi *Society for Regenerating China* atau *Proper China Society*, meskipun begitu terminologi yang penulis sebutkan pertama kali adalah terminologi yang sering dipakai). Sun Yat-Sen mendirikannya pada tanggal 24 November 1894 dengan tujuan utama yaitu pencapaian kemakmuran bagi China sebagai fondasi utama untuk aktivitas revolusioner di masa yang akan datang. Pembentukannya kebetulan bertepatan dengan Perang China-Jepang setelah

² Thomas L. Friedman, *The World Is Flat: A Brief History of the 21st Century*, (New York: Farrar, Straus, Giroux, 2005), halaman 9-11, yang dikutip melalui _____, "Globalization: What Is It?", http://stevekerby.com/omde_626/globalization.htm.

³ John Atkin, "Father of Modern China", *The Builders*, halaman 151-153, dapat diakses melalui http://www.globalbirdphotos.com/ve/150_155_Father_of_Modern_China_John_Atkin.pdf.

terkuaknya serangkaian kekalahan militer China serta tereksposnya korupsi dan inkompetensi yang dilakukan oleh pemerintahan Dinasti Qing. Komunitas ini dibentuk di Hawaii atau lebih tepatnya di kota Honolulu ketika Sun Yat-Sen masih berada di pengasingan. Adapun motto utama dari komunitas ini ialah sumpah yang kurang lebih bunyinya, “*Expel Machus, revive Zhonghua, and establish a unified government*”.⁴

Hal menarik yang penulis temukan dari pendirian gerakan ini adalah fakta bahwa Sun Yat-Sen telah berusaha untuk mengambil nilai-nilai eksternal yang ada di Barat untuk kemudian beliau coba implementasikan untuk pencapaian China yang lebih baik. Penulis mencatat bahwa ketika *Revive China Society* tersebut terbentuk pada tahun 1894, hanya ada dua prinsip utama yaitu nasionalisme dan demokrasi.⁵ Adapun prinsip ketiga akhirnya baru digabungkan dengan dua prinsip sebelumnya setelah Sun Yat-Sen melakukan perjalanan ke Eropa sekitar tahun 1896 hingga 1898 dan diumumkan secara resmi pada tahun 1905 ketika Sun Yat-Sen berada di Eropa (lebih tepatnya di Brussel, Belgia). Pada tahun ini, beliau menampilkan sebuah pidato yang amat terkenal yang berjudul “*Three Principles of the People*” atau apabila ditranslasikan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Tiga Prinsip Rakyat”, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.⁶

Berdasarkan konten dari *Three Principles of the People* tersebut, penulis menemukan adanya kesamaan antara ide yang dicetuskan oleh Sun Yat-Sen dengan ideologi-ideologi yang ada di Barat. Penulis melihat bahwa nilai-nilai seperti nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat memang nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa Barat, termasuk pula konstitusi Amerika Serikat yang sering didengungkan sebagai tempat di mana Sun Yat-Sen mendapatkan inspirasi *Three Principles of the People* tersebut. Ketiga nilai tersebut memiliki elemen-elemen yang ada di dalam gerakan progresif Amerika Serikat dan juga merupakan

⁴ _____, “Dr. Sun Yat-sen Historical Trail”, *Central & Western District Council*, halaman 14-20, dapat diakses melalui http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/sysm/download/brochure_07_a.pdf.

⁵ Ceren Ergenc, “Chinese Nation-Building and Sun Yat-Sen: A Study on 1911 Revolution in China”, halaman 25, diakses melalui <http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12606376/index.pdf>.

⁶ Eric Chiyeung Ip, “Building Constitutional Democracy on Oriental Foundations: An Anatomy of Sun Yat-Sen’s Constitutionalism”, halaman 1-13, dapat diakses melalui <http://hc.rediris.es/09/articulos/pdf/16.pdf>.

pemikiran yang diusung oleh Abraham Lincoln. Sun Yat-Sen sendiri pun mengutip pernyataan dari Abraham Lincoln yang kurang lebih berbunyi “pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” sebagai suatu inspirasi terciptanya *Three Principles of the People*.⁷

Poin pertama dari prinsip yang diusung oleh Sun Yat-Sen tersebut adalah *Minzu* atau biasa ditranslasikan menjadi nasionalisme. Sun Yat-Sen percaya bahwa China harus bersatu untuk melawan kekuatan imperialisme dan cara terpenting untuk mencapai persatuan dan kesatuan tersebut adalah dengan menggunakan konsep nasionalisme China.⁸ Poin nasionalisme China dari *The Three Principles of People* ini sedikit banyak mengacu pada cara yang dapat digunakan untuk menyatukan seluruh etnisitas yang berbeda-beda yang ada di China yang secara garis besar terdiri dari lima etnik utama yang ada saat itu yaitu Han, Mongol, Tibet, Machus, dan Muslim (baik Muslim Hui maupun Muslim Uighur di Xinjiang). Apabila dilihat dari ide nasionalisme ini, dapat dikatakan bahwa nasionalisme China tidak dapat diklasifikasikan sebagai etnonasionalisme dan lebih mengacu pada konsep nasionalisme sipil seperti yang dipakai di negara-negara Barat yang mana keanggotaan di dalam nasionalisme tersebut lebih mudah—artinya selama orang tersebut tinggal di wilayah kedaulatan China maka orang tersebut sudah tergolong bangsa China terlepas dari etnisitasnya. Nasionalisme China yang berusaha mempersatukan etnisitas yang berbeda-beda tersebut juga terepresenasikan melalui bendera China yang terdiri dari lima warna ketika China resmi terbentuk menjadi sebuah republik dalam rentang waktu 1911 hingga 1928.⁹ Sun Yat-Sen percaya bahwa untuk mencapai nasionalisme China ini dibutuhkan adanya kesadaran nasional atau *national consciousness*, untuk menyatukan Han dari agresi imperialis. Sun Yat-Sen juga percaya bahwa *minzu* ini dapat didefinisikan sebagai kesamaan darah, tempat tinggal, agama, bahasa, dan adat-istiadat.¹⁰

⁷ Richard A. Epstein, “Direct Democracy: Government of the People, By the People, and For the People?”, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, volume 34 (3), halaman 819.

⁸ NIU Geping, “A Comparison of Tagore’s Nationalism and Sun Yat-sen’s The Three Principles of the People from the Perspective of Nationalism”, *Core Ethics*, volume 5, 2009, halaman 467.

⁹ _____, “Flag of China”, dapat diakses melalui http://www.chinesepulse.com/china_flag.html.

¹⁰ Ceren Ergenc, “Chinese Nation-Building and Sun Yat-sen”, halaman 93-95, dapat diakses melalui <http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12606376/index.pdf>.

Poin kedua dari *The Three Principles of People* yang dikemukakan oleh Sun Yat-Sen adalah *Minquan* atau biasa ditranslasikan menjadi demokrasi. Karena pengalaman pengasingan Sun Yat-Sen dan fakta bahwa Sun Yat-Sen belajar mengenai prinsip-prinsip ini dengan mengadopsi nilai-nilai Barat terutama Amerika Serikat, dapat dimengerti pula bahwa tentunya konsep demokrasi di sini sangat mirip dengan demokrasi ala Barat. Sun Yat-Sen mencoba untuk membagi kehidupan politik masyarakat China ke dalam dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan politik (*power of politics*) dan juga kekuasaan tata kelola (*power of governance*).¹¹

Tipe kekuasaan pertama adalah kekuasaan politik, di mana Sun Yat-Sen melihatnya sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan serta mengaspirasikan keinginan, tuntutan, serta kepentingan politik mereka yang direpresentasikan ke dalam Majelis Nasional atau *National Assembly*. Di sini Sun Yat-Sen kemudian membagi lagi tipe kekuasaan politik ini menjadi komponen-komponen yang lebih kecil yaitu eleksi, *recall*, inisiatif, dan referendum. Apabila kita coba tarik ke dalam konsep yang lebih kontemporer, mungkin sedikit banyak poin ini mirip dengan hak-hak sipil.

Tipe kekuasaan yang kedua adalah *zhiquan* atau kekuasaan tata kelola dan administrasi. Di sini, lagi-lagi penulis menemukan bahwa Sun Yat-Sen mencoba untuk mengimpor produk Barat yaitu sistem pemerintahan tiga cabang (legislatif, yudikatif, dan eksekutif), namun tidak hanya itu Sun Yat-Sen juga kemudian dengan cerdasnya mencoba untuk mengadaptasi dan melakukan inovasi untuk menyesuaikan konsep tersebut dengan karakteristik masyarakat China. Inovasi dan adaptasi tersebut beliau lakukan dengan menambahkan tiga unsur lainnya selain unsur-unsur utama yang telah penulis jabarkan pada kalimat sebelumnya, yaitu pemikiran Montesquieuan, Kontrol Yuan, dan Eksaminasi Yuan. Pada dasarnya ketiga poin tambahan tersebut berasal dari tradisi China.

Poin ketiga dari *The Three Principles of China* adalah *Minsheng* atau biasa ditranslasikan menjadi kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat. Di sini, lagi-lagi penulis melihat Sun Yat-Sen terpengaruh dari pemikiran orang Barat yaitu Henry George. Beliau mencoba untuk membagi kesejahteraan rakyat ini ke dalam

¹¹ Ceren Ergenc, *Ibid.*, halaman 95-97.

empat komponen utama, yaitu: sandang, pangan, papan, dan transportasi. Melalui usaha untuk pencapaian komponen-komponen itulah kemudian beliau membasiskan kebijakan-kebijakan seperti apa yang perlu ditempuh China untuk menyejahterakan rakyatnya. Meskipun begitu di antara poin-poin yang ada dalam *The Three Principles of China*, poin ini adalah poin yang paling kontroversial karena Sun Yat-Sen sendiri meninggal sebelum beliau benar-benar bisa memberikan kejelasan dan implementasi nyata dari prinsip yang terakhir ini. Hal inilah yang kemudian memicu polarisme antara mereka yang mendukung nasionalis China dan komunis China.¹²

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa meskipun *The Three Principles of China* ini memang merupakan sebuah pemikiran yang tergolong tua dan lama, namun fakta membuktikan bahwa pemikiran ini masih dapat ditelusuri hingga saat ini. Paling tidak peninggalan Sun Yat-Sen tersebut masih terpatri dalam kehidupan baik China maupun Taiwan. Prinsip-prinsip ini menjadi ideologi dasar Koumintang di bawah Chiang Kai-Shek dan Partai Komunis China di bawah Mao Zedong. Menarik untuk disimak bagaimana kedua belah pihak (yaitu Taiwan di bawah Koumintang dan China di bawah Partai Komunis China) berada di satu frekuensi yang sama ketika membicarakan prinsip yang pertama yaitu nasionalisme. Namun begitu keduanya mulai berada pada posisi yang berseberangan ketika sudah masuk ke dalam ranah penjelasan dan pendefinisian prinsip kedua dan ketiga. Koumintang melihat demokrasi dan kesejahteraan rakyat sebagai interpretasi dari pengadopsian model demokrasi Barat, sedangkan di lain pihak Partai Komunis China melihat demokrasi dan kesejahteraan diinterpretasikan melalui lensa Marxist dan komunis.¹³ Penulis sendiri pun melihat secara demokrasi Partai Komunis China hingga saat ini masih berseberangan dengan Sun Yat-Sen mengingat China masih merupakan negara yang otoriter. Meskipun begitu dalam prinsip kesejahteraan rakyat, penulis melihat Partai Komunis China saat ini cenderung mengarah ke gabungan antara pemikiran liberal ala Barat di bidang ekonomi dengan sistem politik Marxist-

¹² Ceren Ergenc, *Ibid.*, halaman 97-98.

¹³ Yongfei Zhao, "The Essence of Governance: The Development of Public Administration in China", halaman 19, dapat diakses melalui <http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Zhao%20Yongfei.pdf?bgsu1122991500>.

Leninist dan juga namun dengan tetap menjaga ke-China-annya dan inilah yang memicu tumbuhnya istilah seperti “*socialism with Chinese Characteristics*” atau “*authoritative capitalism*”. Penulis akan menjabarkan mengenai posisi China kontemporer lebih lanjut di bawah.

Namun begitu ternyata Sun Yat-Sen menyadari terkadang ekspektasi dengan realitas tidak selalu sejalan. Gagasan modern ala Barat tersebut ternyata sulit untuk diterapkan sepenuhnya dengan berkaca pada konteks politik China. Pengaturan politik demokratis belum berhasil memberikan kesatuan, tatanan, apalagi legitimasi. Proses partisipasi politik masyarakat pun belum berjalan maksimal dan ini berimbas kepada pembuatan kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri.¹⁴

Belajar dari pengalaman kegagalan tersebut, beliau pun berpendapat bahwa revolusi China harus terlebih dahulu berkonfrontasi dengan realitas politik China yang saat itu masih diwarnai dengan kekacauan politik dan kemunduran sosial. Untuk mencapai hal ini beliau mencoba untuk menggeser perhatian dari Eropa Barat serta Amerika Serikat menuju Partai Komunis di Rusia. Dengan berkaca dari pengalaman Rusia ini kemudian beliau membentuk strategi state-building melalui organisasi partai. Koumintang pun direformasi dan menjadi lebih terorganisasi dan tersentralisasi pada tahun 1924.¹⁵

Meskipun begitu nasib Koumintang pun mulai goyang ketika Partai Komunis China berhasil mengklaim bahwa PKC lebih nasionalis ketimbang Koumintang dalam menekan Jepang dan juga PKC dianggap lebih mampu untuk menyebarkan visi negara-bangsa kepada masyarakat China. Alhasil PKC pun berhasil masuk ke dalam kursi pemerintahan *mainland China*. Sebelumnya perlu diingat bahwa PKC sendiri pun menerima dan mewarisi pemikiran Sun Yat-Sen sekaligus menerima struktur politik partai-negara Leninis. Adapun perbedaan posisi antara PKC dengan Sun Yat-Sen ada dalam hal pembangunan ekonomi, di mana PKC berusaha mengeliminasi elemen kapitalis dan mendirikan sistem ekonomi terpusat seperti yang Uni Soviet lakukan.¹⁶

¹⁴ Yongnian Zheng, *Globalization and State Transformation in China*, (Cambridge: Cambridge University Press 2004), halaman 48-49.

¹⁵ Yongnian Zheng, *Ibid.*, halaman 49-50.

¹⁶ Yongnian Zheng, *ibid.*, halaman 50.

2.2 Kepemimpinan Deng Xiaoping sebagai Titik Balik

Hal berikutnya yang penulis rasa sangat signifikan untuk memulai pembahasan mengenai pengaruh globalisasi terhadap pembentukan konsep nasionalisme China di abad ke-21 ini tidak dapat dilepaskan dari peran Deng Xiaoping. Tanpa bermaksud untuk mengurangi rasa hormat penulis terhadap pemimpin-pemimpin sebelum Deng Xiaoping, namun penulis melihat bahwa Deng Xiaoping-lah yang merupakan tokoh di mana titik balik di mana konsep nasionalisme China memainkan peran yang cukup signifikan dan memiliki warna yang berbeda dari kepemimpinan Mao Zedong sebelumnya. Selain itu juga penulis merasa bahwa warna yang diberikan oleh Deng Xiaoping hingga kini masih terasa, terutama setelah kebijakan terkenalnya yaitu “*reform and opening*” pada saat beliau mulai memimpin kursi kekuasaan di China.

2.2.1 Globalisasi, Teori Deng Xiaoping, dan *Reform and Opening*

Apabila dimasukkan ke dalam konsep globalisasi menurut Thomas L. Friedman, globalisasi yang terjadi pada masa Deng Xiaoping berkuasa masih merupakan globalisasi 2.0, di mana yang berperan adalah negara yang membuka pasarnya, perusahaan multinasional, serta bangkitnya kemajuan teknologi dan informasi.¹⁷ Pada masa ini pula, Deng Xiaoping memperkenalkan apa yang disebut dengan “Teori Deng Xiaoping”.

Teori Deng Xiaoping ini secara sederhana dapat dipahai sebagai kumpulan ideologi-ideologi baik di bidang politik maupun ekonomi yang tentu saja sesuai dengan namanya dikembangkan oleh Deng Xiaoping ketika memimpin China. Meskipun sekilas tampak berbeda dengan Marxisme maupun pemikiran Mao Zedong, namun Deng Xiaoping mengaku bahwa teori ini lebih merupakan adaptasi dari pemikiran-pemikiran yang penulis sebutkan sebelumnya agar disesuaikan dengan kondisi baik sosial maupun ekonomi China saat itu. Teori Deng Xiaoping ini bahkan lebih jauh lagi telah menjadi salah satu acuan utama

¹⁷ Thomas L. Friedman, *Op.Cit.*, halaman 9-11.

bagi Partai Komunis China dan prinsip-prinsip di dalamnya juga diadaptasi ke dalam Konstitusi Republik Rakyat China.¹⁸

Seperti yang telah penulis tuliskan sebelumnya bahwa teori ini berusaha untuk mencakup baik aspek ekonomi maupun politik. Secara ekonomi, teori ini pada intinya berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pesat melalui model sistem ekonomi pasar. Sedangkan di ranah politik, teori ini mencoba untuk mencari cara tercapainya stabilitas politik melalui sistem politik Marxis-Leninis. Penulis melihat bahwa pada dasarnya baik aspek ekonomi maupun aspek politik tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain dengan kuat.¹⁹ Misalnya saja, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat tercapai hanya apabila terjadi stabilitas politik yang ada, bahkan ketika stabilitas politik tersebut dicapai dengan cara-cara yang mungkin terbilang otoriter oleh norma-norma internasional. Penggabungan aspek ekonomi dan politik inilah yang kemudian berujung pada istilah “*socialism with chinese characteristics*”.

Apabila penulis coba bandingkan antara aspek ekonomi dan aspek politik dalam teori ini, penulis mendapati bahwa aspek ekonomi merupakan aspek yang banyak dipengaruhi oleh fenomena globalisasi yang terjadi. Bukan berarti secara politik China tidak terpengaruh globalisasi, namun faktor globalisasi di sini sangat berperan di ranah ekonomi. Wacana yang sangat dominan terkait globalisasi dan China ialah mengenai pengglobalisasian ekonomi China yang dimulai dari kebijakan reform and opening yang membuka perekonomian China terhadap dunia internasional dan berusaha untuk mengintegrasikan China ke dalam perekonomian global.²⁰

Reform and opening ini masih merupakan manifestasi dari *socialism with chinese characteristics* yang dimulai pertama kali pada bulan Desember tahun 1978. Reformasi ekonomi ini terdiri dari dua tahap besar. Tahap pertama dimulai sekitar akhir 1970-an dan awal 1980-an yang di dalamnya terdapat dekolktivisasi pertanian, pembukaan China bagi investasi asing, dan izin yang lebih mudah bagi

¹⁸ Yang Chugui, “Deng Xiaoping Theory and the Historical Destiny of Socialism”, *The Marxist*, volume 17 (2), 2001, halaman 1-19.

¹⁹ _____, “The Era of Deng Xiaoping: Crossing the River by Feeling the Stones”, halaman 1-18, dapat diakses melalui http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/gdr/exhibits/1182/The_Era_of_Deng_Xiaoping.pdf.

²⁰ Guoqing Zhang, “China’s Reform and Opening-up & Economic Development”, <http://www.ctc-health.org.cn/file/2315en.pdf>.

para pengusaha untuk mendirikan bisnis mereka. Meskipun begitu penulis juga mencatat bahwa kebanyakan dari industri yang terbentuk masih merupakan milik negara. Sedangkan tahap kedua berlangsung pada akhir tahun 1980-an hingga 1990-an yang di dalamnya termasuk privatisasi, pengangkatan kontrol harga, kebijakan proteksionis, dan regulasi.²¹ Meskipun begitu monopoli negara di bidang perbankan dan petroleum tetap ada. Hal ini berdampak pada kemajuan perekonomian China yang sangat pesat dari rentang waktu 1978 hingga 2005. Ini pun berdampak besar-besaran terhadap karakteristik masyarakat China, di mana kemiskinan berhasil dikurangi secara masif, ketimpangan pendapatan berhasil dikurangi.

2.2.2 Kebangkitan Peran Teknokrat dan Importasi Bentuk Negara

Peran teknokrat dalam pemerintahan China mulai terasa signifikan juga pada era Deng Xiaoping. Tidak hanya di ranah pemerintahan, para teknokrat tersebut juga masuk ke pos-pos dalam Partai Komunis China dan memperkenalkan beberapa perubahan drastis. Adapun para teknokrat tersebut sedikit banyak dapat didefinisikan sebagai sekelompok ahli atau spesialis dari latar belakang pendidikan, sosial, dan ideologi yang kurang lebih serupa.²²

Dalam tulisan Yongnian Zheng, disebutkan beberapa alasan dari fenomena semakin meningkatnya peran teknokrat dalam kepemimpinan China di masa Deng Xiaoping. Pertama, ini merupakan fenomena reaksi dari kebijakan perekrutan elite politik di masa Mao Zedong. Ketika Mao berkuasa, salah satu topik utama adalah konflik antara “kelompok merah” dan “para ahli”. Mao Zedong menginisiasi gelombang-gelombang kampanye melawan kelompok intelektual dan profesional di tiga dekade pertama RRC, terutama selama Revolusi Kebudayaan. Inilah yang kemudian kontras dengan kebijakan Deng Xiaoping yang merasa bahwa kebijakan Mao ini menimbulkan kekacauan di negara dan memprioritaskan para ahli di atas kelompok merah untuk membenahi kekacauan ini. Kedua, ini juga merupakan sebuah hasil dari depolitisasi. Kekacauan politik selama prareformasi

²¹ Wang Weiguang, “China’s Reform, Opening Up, and Its Path of Development”, halaman 1-14, dapat diakses melalui <http://ilas.cass.cn/uploadfiles/ens/%7BED7B5A7A-AB19-4962-B321-007EDFD1E13F%7D.pdf>.

²² _____, “Technocrats: Minds Like Machines”, dalam *The Economist*, <http://www.economist.com/node/21538698>.

berasal dari kampanye politik Mao dan mobilisasi massa. Mobilisasi pun berujung pada politisasi kehidupan sosial. Sebaliknya dengan merekrut teknokrat ke dalam pemerintahan dan partai, maka depolitisasi pun dapat dicapai dan proses pengambilan kebijakan yang diambil pun diharapkan lebih jernih karena tidak seperti politisi yang memiliki kepentingan dan mencari kekuasaan, teknokrat cenderung lebih fokus kepada pemikiran rasional, orientasi tugas, dan pemecahan masalah.²³

Dalam merespon arus globalisasi yang semakin pesat, para teknokrat tersebut tidak memiliki banyak pilihan selain mengimpor bentuk negara tanpa terkecuali, bahkan ketika mereka mendapatkan penolakan yang cukup keras dari masyarakat yang berasal dari kelompok konservatif. Para pemimpin tersebut telah belajar cukup banyak hal dari Barat dalam usahanya untuk mendirikan kembali sistem negara secara ekonomis dan politis. Inti pertanyaan utamanya adalah mengapa para pemimpin tersebut mengimpor produk Barat secara selektif dan bagaimana bagian-bagian yang diimpor tersebut secara strategis diintegrasikan ke dalam sistem negara saat itu.²⁴ Di sini, Zheng kemudian melanjutkan argumentasinya bahwa importasi tersebut dilakukan atas pertimbangan yang cukup matang terkait bagaimana menciptakan kekuatan dan kesejahteraan China, dan bagaimana importasi selektif produk-produk Barat membantu konsolidasi rejim.²⁵

Salah satu komponen pertimbangan dari proses importasi tersebut adalah bagaimana importasi dapat dibarengi dengan inovasi yang sejalan dengan kepentingan para pemimpin serta masyarakat China. Para pemimpin teknokrat tersebut harus bisa menentukan, menyeleksi, serta menggabungkan berbagai tujuan secara bersamaan, baik itu untuk mewadahi kepentingan masyarakat, memuaskan kelompok elite yang sedang berkuasa, dan mentransformasi sistem negara. Langkah tersebut harus mempertimbangkan poin-poin keterkaitan antara aktor-aktor dan produk-produk importasi dan inovasi negara modern. Pertama, meskipun pengimporan bentuk negara merupakan respon dari globalisasi, para

²³ Yongnian Zheng, *Op.Cit.*, halaman 35.

²⁴ Christopher R. Hughes, "Globalization and Nationalism: Squaring the Circle in Chinese International Relations Theory", *Millenium: Journal of International Studies*, volume 26 (1), 1997, halaman 103-124.

²⁵ Yongnian Zheng, *Op.Cit.*, halaman 36.

pemimpin tersebut harus mencari cara menghindari potensi terjadinya revolusi karena globalisasi. Mengimpor itu sendiri sebenarnya bukan menggantikan negara yang telah ada, melainkan mereformasinya. Kedua, pasti ada semacam promotor di balik proses importasi bentuk negara terutama kalangan generasi baru elite yang ter-Westernisasi sebagai pendukung pemimpin reformis dalam proses importasi bentuk negara. Ketiga, proses importasi tersebut juga dapat mengundang protes karena ini bisa menyebabkan proses realokasi kekuasaan. Ini misalnya dapat digunakan oleh kaum intelektual nasionalisme yang mengklaim diri mereka sebagai pewaris kebudayaan dan nilai-nilai tradisional dan membuat wacana bahwa importasi tersebut dapat me-Westernisasi negara sehingga mereka mencoba untuk melakukan “perlawanan”.²⁶ Oleh karena itu di sinilah tantangan bagi para reformis teknokrat tersebut bagaimana meminimalisasi risiko politik dan merepresentasikan kepentingan yang beragam tersebut. Meskipun importasi tersebut membuat negara China lebih modern dalam artian lebih mirip dengan negara-negara barat, proses importasi tersebut juga harus melestarikan ke-China-an China (*Chineseness*)

2.3 Keterkaitan antara Globalisasi, Nasionalisme, dan Bentuk Negara

Dalam membicarakan mengenai keterkaitan antara globalisasi, bentuk negara, serta nasionalisme, Yongnian Zheng mengatakan setidaknya ada dua tema utama yang didiskusikan. Pertama, nasionalisme digunakan oleh Partai Komunis China sebagai sebuah respon terhadap menurunnya kepercayaan pada rejim Mao Zedong, dan nasionalisme siap untuk menjadi visi lainnya bagi ideologi Partai Komunis China. Kedua, *anti-foreignism* merupakan faset penting bagi nasionalisme baru China. Adanya kemunculan suara yang kuat namun berbeda yang berkata tidak untuk Barat, dan juga reaksi emosi dan kekerasan terkait pengeboman Kedutaan Besar China yang dilakukan oleh NATO (yang dipimpin AS) di Belgrado, Yugoslavia. Terlepas dari apakah nasionalisme China itu, para akademisi tersebut merujuk bahwa ini merupakan kekuatan yang berusaha untuk menekan globalisasi terutama dalam hal westernisasi. Sejak Dinasti Qing, tujuan utama dari seluruh nasionalis China adalah untuk mengembalikan kebanggaan

²⁶ Yongnian Zheng, *Op.Cit.*, halaman 36-38.

nasional, kekuatan, dan kesejahteraan di atas segalanya. Nasionalisme berperan sebagai faktor penting dalam memfasilitasi modernisasi China, dan nasionalisme ini juga dimobilisasi secara berkala oleh Kuomintang dan Partai Komunis China sejak perjuangan mereka melawan kekuatan asing dan perjuangan mereka melawan satu sama lain.²⁷

Setelah satu kebangkaman selama hampir satu dekade, nasionalisme muncul kembali pada awal tahun 1990-an. Wang Gungwu menjelaskan nasionalisme pada dekade ini memiliki banyak faset yang dapat dijelaskan melalui kalimat berikut ini.

The most common face concerns questions of polity and stresses the recovery of sovereignty, the unification of divided territory, national self-respect. Another is the civilizational face. This emphasizes moral order and the preservation, or a rediscovery, of traditional values. [And] there is also a reactionary face, which yearns to assert superiority and dominates other people, and hankers for the glorious past of a great empire.²⁸

Nasionalisme sendiri dapat didefinisikan mengandung dua elemen penting yaitu identitas dan institusi.²⁹ Nasionalisme berbicara tentang bangsa dan bagaimana gagasan bangsa dikristalisasikan dalam institusi mereka. Nasionalisme merupakan sebuah identitas karena orang-orang sadar akan kewarganegaraannya dan dapat merelasikan diri mereka dengannya. Nasionalisme juga merupakan sebuah institusi karena dapat diekspresikan ke dalam negara-bangsa. Karena tujuan dari nasionalisme China yang baru adalah untuk membangun kembali identitas nasional dan negara-bangsa, maka dapat dipahami restorasi dan globalisme dapat berjalan bergandengan dan *nation-building* berjalan dengan restorasi nasionalisme. Nasionalisme sangat kuat kaitannya dengan globalisme karena kalau tidak sebuah identitas nasional dan sebuah negara-bangsa hampir tidak

²⁷ Yongnian Zheng, *Op.Cit.*, halaman 41-42.

²⁸ Gungwu Wang, *The Revival of Chinese Nationalism*, Lecture Series 6 (Leiden: International Institute for Asian Studies, 1996), halaman 8 yang dikutip melalui tulisan Yongnian Zheng, *Op.Cit.*, halaman 42.

²⁹ Becchofer dan McCrone, *Nationalism, National Identity, and Constitutional Change*, Palgrave MacMillan, 2009, halaman 1-25.

mungkin didirikan. Ketika nasionalisme berusaha untuk menciptakan rasa identitas nasional dan mendorong kesatuan nasional, globalisme bertujuan untuk mengimpor produk negara Barat untuk menambah basis institusional bagi nasionalisme.

Dalam tulisan Zheng sendiri disebutkan bahwa faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep nasionalisme China ini, di mana nasionalisme China modern dibentuk dan dikembangkan sebagai sebuah reaksi terhadap ancaman eksternal oleh kekuatan asing. Identitas nasional berarti kesadaran diri nasional yang membutuhkan pembedaan dari komunitas nasional lainnya. Ancaman-ancaman eksternal telah memperuncing dualisme kita/mereka. Dr. Sun Yat-sen merupakan salah satu tokoh penting yang menjelaskan bagaimana identitas nasional harus dikonstruksikan dengan menunjukkan pada masyarakat bagaimana China telah terancam oleh kekuatan asing.³⁰

Di China sendiri, tidak dapat disangkal bahwa konsep modern mengenai nasionalisme dan juga negara-bangsa merupakan konsep yang diimpor dari Barat. Menyebarnya nasionalisme di China juga merupakan proses westernisasi dari negara-bangsa China. China mengimpor nasionalisme sebagian karena negara-bangsa model Eropa mengalahkan model “negara” China tradisional, dan sebagian lagi karena nasionalisme Eropa dalam makna aslinya mirip dengan Konfusianisme. Dengan kata lain, beberapa kalangan mendukung nasionalisme karena kemampuannya untuk memperkuat negara-bangsa sementara yang lain menilainya karena semangat saintifiknya, usahanya yang komersial, pemikiran politik, dan aktivitas.³¹ Misalnya saja versi Perancis dari nasionalisme menekankan kedaulatan rakyat dan kerja sama umum bagi seluruh rakyat dalam membentuk *national will* dan kepercayaan rasional terhadap persamaan manusia dan kemajuan liberal. Kaum nasionalis Perancis menilai “*liberty, equality, and fraternity*” dan juga Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara sebagai sesuatu yang sah tidak hanya bagi warga Perancis namun juga bagi seluruh manusia.³² Bagi kaum nasionalis China, tidak ada masalah untuk menerima nilai-

³⁰ Yongnian Zheng, *Op.Cit.*, halaman 43.

³¹ Yongnian Zheng, *Op.Cit.*, halaman 46-47.

³² _____, “Liberty, Equality, Fraternity”, oleh *France Embassy in US*, <http://web.archive.org/web/20070313012255/http://www.ambafrance-us.org/atoz/libeqfra.asp>.

nilai seperti itu. Bagi kaum nasionalis China, pertanyaannya adalah bagaimana negara-bangsa bisa sekuat negara-negara di Eropa supaya mereka bisa mengekspresikan dan mendukung nilai-nilai tersebut.

Meskipun begitu, bukan berarti nasionalisme China adalah nasionalisme ala Barat. China memang mengimpor nilai Barat, namun memodifikasinya sedemikian rupa seperti penjelasan penulis di awal bab ini. Ini terlihat misalnya saja dari pidato Deng Xiaoping yang intinya beliau mengatakan bahwa meskipun “*reform dan opening*” telah terjadi di China, namun ini bukan berarti hak-hak individu atau minoritas menjadi hak yang dikedepankan atau dipromosikan. Deng Xiaoping percaya bahwa hak-hak tersebut harus secara jelas tersubordinasi di bawah hak-hak mayoritas dan diinterpretasikan melalui konteks yang ada di China. Ini juga terlihat dari pidato Jiang Zemin dalam kongres PKC ke-16 di bawah.

“Keep the orientation of advanced culture firmly in hand. In contemporary China, to develop advanced culture means to develop national, scientific and popular socialist culture geared to the needs of modernization, of the world and of the future so as to enrich people's mental world and reinforce their mental strength. We must uphold Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought and Deng Xiaoping Theory as our guidelines in the realm of ideology and have the important thought of Three Represents in command of the development of socialist culture ... Promote ideological and ethical progress. Ruling the country by law and ruling the country by virtue complement each other. It is necessary to establish a socialist ideological and ethical system compatible with the socialist market economy and the socialist legal standard and consistent with the traditional virtues of the Chinese nation. We must carry out intensive publicity and education in the Party's basic theory, line and program and in the important thought of Three Represents, and guide people in fostering a common ideal for socialism with Chinese characteristics, correct world outlook, views on life and values. We must carry out the Program for Improving Civic Morality, promote patriotism and, with serving the people at the core, collectivism as the principle and honesty as a priority, intensify education in social and professional ethics and family virtues and especially intensify the ideological and ethical improvement among youth so as to guide people in their pursuit of higher ideological and ethical standards on the basis of observing the basic code of conduct. We must

strengthen and improve ideological and political work and encourage popular participation in building spiritual civilization ... The Chinese civilization, extensive and profound, and with a long history behind it, has contributed tremendously to the progress of human civilization. We will surely have a new upsurge in building socialist culture and create an even more splendid advanced culture in the great struggle of the Chinese people in the contemporary era.”³³

Penulis memang melihat bahwa tampaknya Deng Xiaoping merupakan salah satu tokoh yang mencetuskan mengenai konsep nasionalisme China yang masih dipegang hingga kini. Masih menurut tulisan Hughes, disebutkan bahwa terdapat *interface* antara preservasi esensi nasional (*ti*) dan juga penerimaan akan ‘fungsi’ asing (*yong*) seperti misalnya saja pendidikan, teknologi informasi, dan sebagainya. Deng Xiaoping di sini disebutkan telah membentuk “tiga tugas historis utama” yaitu kebijakan luar negeri, kebijakan unifikasi, dan kebijakan ekonomi. Rincian dari tiga poin tersebut adalah mengoposisi hegemoni dan berusaha untuk mencapai serta menjaga perdamaian dunia, berusaha untuk mengembalikan Taiwan ke tanah China, dan usaha untuk meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang bersamaan Deng Xiaoping juga berusaha untuk mengartikulasikan patriotisme sebagai system nilai untuk tidak membatasi batas-batas perbedaan yang sah, menciptakan dinamika diskursus nasionalis dan globalis yang juga dikembangkan oleh penerus Deng Xiaoping.³⁴

2.4 Nasionalisme China di Abad 21

Lalu bagaimana dengan nasionalisme China di abad 21 ini? penulis melihat bahwa pengaruh Deng Xiaoping masih sangat terasa dalam pembentukan nasionalisme di abad ini. Setidaknya ini dapat terlihat dari bagaimana ranah ekonomi cenderung mengalami liberalisasi sedangkan ranah politik masih berkuat di sekitar keotoriteran pemerintah China. Di sini, penulis nampaknya melihat bahwa pemerintah China cenderung pragmatis dalam melihat nasionalismenya, maksudnya adalah selama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat menyejahterakan masyarakat China, stabilitas politik pun harus

³³ _____, “Full Text of Jiang Zemin’s Report at 16th Party Congress”, dapat diakses melalui http://english.peopledaily.com.cn/200211/18/eng20021118_106985.shtml.

³⁴ Christopher R. Hughes, *Op.Cit.*, halaman 7.

tercapai dan untuk mencapai stabilitas politik tersebut terkadang cara-cara yang otoriter kerap terjadi.³⁵ Globalisasi ekonomi dan nasionalisme ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jiang Zemin dalam Kongres ke-16 Partai Komunis China di mana dalam kongres tersebut beliau berkata bahwa saat ini dunia dikarakteristikan dengan multipolaritas dan globalisasi ekonomi. Masyarakat China pun diharapkan dapat membawa rejuvenasi besar-besaran bangsa China dalam jalannya menuju sosialisme dengan karakteristik China.³⁶

Nasionalisme China yang bersifat eksternal (maksudnya bagaimana nasionalisme ini merespon isu-isu eksternal) dapat pula diambil benang merahnya dari tiga gelombang nasionalisme China pasca-Mao dan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya nasionalisme tersebut berevolusi dari keinginan untuk “belajar dari Barat” menuju “anti-Barat”. Baik di pembangunan domestik China maupun lingkungan internasional, rasa kebanggaan nasional yang terus tumbuh ini terutama dikarenakan terus meningkatnya pula kekuatan China baik secara ekonomi maupun secara militer terus-menerus namun di saat yang sama juga terdapat perlakuan yang kurang adil yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat, terutama media Barat yang seolah-olah mencoba untuk menggambarkan “demonisasi China”. Dalam beberapa kasus, sentimen anti-Barat saat ini merupakan hasil langsung dari media-media Barat. Di sini, gelombang baru ini tidak hanya ofensif namun juga reaktif dalam artian merespon perlakuan yang tidak adil dari barat pada China.³⁷

Secara eksternal, gelombang nasionalisme ini dipengaruhi oleh isu-isu yang sedang merebak pada level global. Misalnya saja di akhir tahun 1970-an dan di tahun 1980-an, nasionalisme China banyak mengambil pelajaran dari nasionalisme yang diterapkan oleh negara-negara Barat. Hubungan China dengan negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat) pun masih dapat dikatakan cukup mulus. Respon negara-negara Barat terhadap kebijakan *reform and opening* yang

³⁵ Yajun Chen, “Pragmatism in China and Chinese Philosophy”, Mei 2010, halaman 1-16, dapat diakses melalui

http://brown.edu/Programs/Nanjing/content/documents/Pragmatism_in_China_ChenYajun.pdf.

³⁶ Christopher R. Hughes, *Chinese Nationalism in the Global Era*, (New York: Routledge, 2006), halaman 2.

³⁷ Lijun Yang dan Chee Kia Lim, “Three Waves of Nationalism in Contemporary China: Sources, Themes, Presentations, and Consequences, dalam *EAI Working Paper No.155*, 2010, halaman 17-19, dapat diakses melalui <http://www.eai.nus.edu.sg/EWP155.pdf>.

dikeluarkan oleh Deng Xiaoping juga cenderung positif. Ini membuat China merasa bahwa China dapat mengambil banyak pelajaran dari Barat dan merasa bahwa negara-negara Barat dapat menjadi partner yang baik dalam pembangunan China.³⁸

Meskipun begitu penulis melihat bahwa kondisi eksternal ini berubah ketika terjadinya kasus Tiananmen di akhir tahun 1980-an, di mana media-media Barat mengkritik habis-habisan China terkait pelanggaran HAM yang dilakukannya. Hubungan antara China dengan Barat juga cenderung mengalami kerikil-kerikil misalnya saja dari pengeboman Kedutaan Besar China ketika Perang Kosovo terjadi, dan beberapa kasus lainnya. Momen ini pun menumbuhkan apa yang penulis lihat fenomena antipati China terhadap Barat dan semakin populernya terminologi *anti-foreignism* kala itu.³⁹ Penulis juga menemukan sebuah survei yang dilakukan untuk mengetahui wacana apa sajakah yang muncul dalam revivalis nasionalisme China di sekitar tahun 1990-an. Di antara, muncullah kata-kata seperti: *anti-tradisionalism, anti-Westernisation, new-authoritarianism, Confucianism, culturalism, statism, neo-conservatism, neo-leftism, developmentalism, anti-Americanism, academic nativism, post-modernism, civilisationism, populism, elitism, concerns over social justice*.⁴⁰

Sedangkan nasionalisme gelombang ketiga yang terjadi di abad 21 ini penulis lihat masih kurang lebih sama seperti sebelumnya di mana China kemudian mendapatkan kepercayaan diri yang cukup besar terhadap kebangkitan China terutama di bidang ekonomi. Meskipun begitu penulis melihat bahwa hubungan antara China dengan Barat (terutama Amerika Serikat) masih diwarnai oleh kerikil-kerikil. China memandang Amerika Serikat cenderung bias dalam melihat dan memberitakan apa yang terjadi di China. Kritik media Barat ini dapat dilihat dari bagaimana media-media tersebut biasanya mengkritik isu-isu HAM hampir setiap ada kesempatan. Ini sangat jelas terutama mengenai kasus-kasus etnik minoritas di China, misalnya saja laporan yang dikeluarkan mengenai Tibet pada tahun 2008 yang ternyata tidak akurat dan telah menimbulkan kemarahan orang-orang China. Selain itu periode ini juga menjadi momentum di mana

³⁸ Lijun Yang dan Chee Kia Lim, *Ibid.*, halaman 5-8.

³⁹ Lijun Yang dan Chee Kia Lim, *Ibid.*, halaman 9-12.

⁴⁰ Christopher R. Hughes, *Ibid.*, halaman 2.

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pun digunakan oleh masyarakat China (terutama generasi muda) untuk menyuarkan aspirasi mereka. Terkadang aspirasi tersebut juga digunakan untuk meng-*counter* pemberitaan bias oleh Amerika Serikat dan media-media Barat lainnya.⁴¹

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa secara eksternal dalam banyak hal evolusi nasionalisme China merefleksikan evolusi hubungan antara China dengan masyarakat internasional yang dipimpin oleh Barat. Di sini China seolah menganggap bahwa Barat adalah representasi dari modernitas dan Barat pun bisa dijadikan sebagai *role model* demi kemajuan China. Meskipun begitu ternyata selama proses tersebut berjalan China juga menemukan bahwa negara tersebut harus menghadapi penolakan serta bias dari Barat. Oleh karena itu perkembangan dari nasionalisme ini akan bergantung dari interaksi yang terus-menerus antara China dengan Barat. Melalui premis ini pula nasionalisme China pun tidak akan memudar meskipun arus globalisasi terus menerjang.⁴²

Lalu bagaimana dengan nasionalisme secara internal atau bagaimana konsep nasionalisme yang diterapkan oleh pemerintah China terhadap warga negaranya? Penulis melihat bahwa pada dasarnya di sini pemerintah China berusaha untuk menerapkan kesatuan identitas nasional bangsa China dan integrasi politik terhadap warganya. Untuk mencapai kebijakan ini, pemerintah berusaha menerapkan kebijakan asimilasi kultural (*cultural assimilationist policy*) terhadap masyarakat China yang bervariasi etnik serta latar belakang keturunannya sehingga identitas lokal tersebut dapat “ditenggelamkan” ke dalam identitas China.⁴³ Terkadang penenggelaman identitas lokal tersebut dapat berujung pada punahnya identitas lokal tersebut.

Kebijakan asimilasi ini sebenarnya berpijak pada anggapan China sebagai sebuah peradaban dan bukannya hanya sekedar sebuah negara-bangsa. Disebutkan bahwa dalam garis batas kultural ini tinggal orang-orang China atau sering disebut pula dengan *Han Ren* atau *Huaxia*. Kata *Hua* atau *Huaxia* sendiri sebenarnya berarti ‘orang China’ dan istilah ini mengacu kepada kebudayaan dan

⁴¹ Lijun Yang dan Chee Kia Lim, *Op.Cit.*, halaman 13-17.

⁴² Yang Lijun dan Lim Chee Kia, *Op.Cit.*, halaman 19.

⁴³ Thomas Heberer, *China and its National Minorities: Autonomy or Assimilation?*, (London: M.E. Sharpe Inc., 1989), halaman 22, yang dikutip dalam tulisan Abanti Battacharya, *Strategic Analysis*, volume 27 (3), halaman 363.

peradaban. Istilah-istilah tersebut tentu saja berlawanan dengan istilah *Yi* yang berarti “orang barbar”. Di sini, istilah Han juga mengacu kepada masyarakat berbasis agrikultur yang tinggal secara menetap, sedangkan *Yi* mengacu kepada penggembala yang hidup secara berpindah-pindah. Ketika mereka yang bukan berasal dari etnik Han kemudian mendapatkan gagasan ‘bangsa China’, mereka akan terinkorporasi ke dalam peradaban China dan dianggap sebagai bangsa China atau *Zhongguo Ren* atau *Huaxia*. Dampak dari inkorporasi ini bagi mereka yang bukan Han adalah secara esensial menerima budaya China, yang berarti budaya China kemudian dianggap sebagai bagian dari peradaban China dan apabila mereka telah menerima hal ini baru mereka bisa dianggap sebagai “bangsa China”. Konseptualisasi negara-bangsa ini didasarkan pada identitas kultural yang memberi gagasan negara peradaban (*civilizational state*) China ketimbang hanya sekedar konsep politik negara-bangsa (*nation-state*).⁴⁴ Gagasan mengenai negara peradaban ini kemudian memengaruhi konsep modern China mengenai kewarganegaraan.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai negara peradaban tersebut, maka dapat dilihat bahwa konsep nasionalisme China cenderung berbeda dari konsep nasionalisme kebanyakan negara lainnya. Walaupun China sendiri mengadopsi unsur-unsur nasionalisme dari Barat (Eropa dan Amerika Serikat), namun di sini China memiliki keunikan karena China berusaha untuk menyamaratakan kelompok etnik yang secara historis merupakan bagian dari negara China dan ini berarti China menggunakan konsep historis kultural.⁴⁶ Oleh karena itu istilah “etnik minoritas” di China bukannya menunjukkan identitas politik yang terpisah melainkan identitas kultural yang terpisah.

Pendapat Mao tersebut walaupun telah lama dicetuskan ternyata dicetuskan kembali oleh Jiang Zemin pada Kongres ke-16 Partai Komunis China pada tahun 2002, di mana dalam kongres tersebut Jiang Zemin mengatakan sebagai berikut:

⁴⁴ Peter J. Katzenstein, “China’s Rise: East Asia and Beyond”, dalam *EAI Working Paper Series 12*, halaman 2-3, April 2008, dapat diakses melalui http://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_report/2009052018244858.pdf.

⁴⁵ Abanti Battacharya, *Op.Cit.*, halaman 362-364.

⁴⁶ Heberer, *Op.cit.*, halaman 25, dalam tulisan yang dikutip Abanti Battacharya, *Ibid.*, halaman 363.

“... bringing about a great rejuvenation of the Chinese nation on its road to socialism with Chinese characteristics”.⁴⁷

Dalam literatur-literatur yang penulis temukan pun, kata-kata “*socialism with Chinese characteristics*” berulang kali disebutkan untuk mendeskripsikan bagaimana nasionalisme China ini terjadi di era globalisasi ini. Mungkin ke-khasan China ini juga terlihat dari bagaimana interaksi antara sistem politik dan ekonomi di China. Misalnya saja secara sistem pemerintah China tidaklah mengadopsi demokrasi liberal dan hingga saat ini masih cenderung otoriter. Namun secara ekonomi, pemerintah China berusaha untuk menerapkan sistem ekonomi pasar dengan bersaing secara bebas dengan negara-negara lain. Menurut penulis inilah salah satu dari keunikan China di era globalisasi ini, di mana China dapat bersaing dalam dinamika hubungan internasional melalui “caranya sendiri”.

Selain “*socialism with Chinese characteristics*”, penulis juga melihat bahwa ada dua aspek utama dalam pembentukan nasionalisme China, yaitu kepedulian yang besar terhadap perkembangan teknologi dan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini terlihat dari tulisan Christopher R. Hughes di mana di bukunya beliau menyebutkan bahwa teknonasionalisme adalah wacana yang marak terjadi di China. Di sini, penulis melihat bahwa para pemimpin China sekali lagi sadar bahwa tidak mungkin perkembangan teknologi dapat terjadi tanpa bantuan dari negara-negara maju (yang kebanyakan berasal dari Barat), meskipun begitu ini bukan berarti China harus menyembah-nyembah kemajuan yang dialami Barat. Maksudnya adalah, boleh saja belajar dari negara-negara Barat, namun jangan sampai merasa tidak percaya diri dengan bangsa sendiri. Ini terlihat misalnya dari usaha pemerintah China untuk mengirimkan pelajar-pelajarnya ke negara yang lebih maju untuk menimba ilmu yang ilmu tersebut diharapkan dapat digunakan untuk lebih memajukan China ke depannya.

Apabila penulis mencoba untuk memasukkan konsep nasionalisme yang penulis tulis di bab I, maka penulis melihat bahwa China pun sebenarnya memakai konsep nasionalisme sipil seperti yang banyak dipakai pula oleh negara-negara Barat. Namun berbeda dengan Barat yang tampaknya nasionalisme sipil berjalan bersamaan dengan demokrasi liberal, penulis tidak melihat hal yang sama

⁴⁷ Christopher R. Hughes, *Ibid.*, halaman 2.

di China. China berusaha untuk mengadopsi nasionalisme sipil tanpa mengadopsi demokrasi liberal.

Mungkin inilah yang menyebabkan bahwa ketika kita membicarakan tentang konsep nasionalisme di China, kita tidak mungkin melepaskan peran etnik Han yang merupakan mayoritas di China. Berdasarkan tulisan Hughes, penulis melihat bahwa nasionalisme di China sangat tendensius kepada etnik Han. Ini pun seolah memberikan kesan bahwa terdapat usaha untuk men-Sinicisasi China atau pandangan yang cenderung Sinosentrisme. Penulis sebenarnya melihat ini adalah sebuah ironi. Di satu sisi, pemerintah China berusaha untuk menerapkan nasionalisme politik, yaitu nasionalisme yang berdasarkan pada kedaulatan negara China tanpa memedulikan adanya nasionalisme kultural. Meskipun begitu pada praktiknya penulis juga melihat bahwa nasionalisme yang dimiliki China ternyata sangatlah erat dengan etnik tertentu, misalnya saja Han. Ini terlihat dari misalnya penggunaan Konfusianisme untuk men-China-kan konsep nasionalisme dan menarik hati masyarakat China. Penulis menyadari mungkin memang sulit untuk benar-benar menumbuhkan nasionalisme China tanpa adanya usaha untuk merelasikan nasionalisme tersebut ke dalam suatu identitas tertentu. Pemerintah China membutuhkan identitas tersebut untuk menyatukan masyarakat China dan karena etnik Han China-lah yang menjadi mayoritas, maka identitas ini pun erat kaitannya dengan identitas Han China. Inilah yang penulis lihat dapat menjadi salah satu titik tolak yang penulis lihat menuai konflik antara Uighur dengan pemerintah pusat yang penulis akan jabarkan secara lebih mendalam di bab-bab berikutnya.

BAB III

PEMBENTUKAN IDENTITAS ETNIK UIGHUR DAN IMPLEMENTASI KONSEP NASIONALISME CHINA

3.1 Pembentukan Identitas Etnik Uighur

Sebelum menjelaskan secara lebih mendetail mengenai aspek-aspek apa sajakah yang membentuk identitas etnik Uighur itu sendiri, pertama-tama penulis merasa berkewajiban terlebih dahulu untuk menjelaskan apa saja perbedaan-perbedaan perpektif dari pada akademisi mengenai pembentukan identitas itu sendiri. Berdasarkan tulisan Abanti Bhattacharya, dijelaskan bahwa ada dua pendekatan yang secara umum digunakan untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu pendekatan primordialis dan pendekatan konstruktivis.¹ Pendekatan primordialis melihat identitas etnik sebagai sesuatu fenomena yang ‘*given*’ atau ‘*natural*’. Perspektif ini melihat bahwa kelompok etnik membentuk jaringan *kinship* yang dilahirkan bersama dengan individu-individu tersebut sehingga individu-individu tadi menjadi bagian darinya. Hal inilah yang membuat individu-individu tersebut mendapatkan teritorinya dan memiliki atribut-atribut seperti bahasa, ras, agama, adat, tradisi, makanan, cara berpakaian, dan musik. Selain penanda-penanda kultural obyektif tersebut, terdapat pula penanda-penanda subyektif yang termasuk pula aspek-aspek psikologis identitas seperti ‘*self*’ dan ‘*group-related feelings*’. Ini membuktikan bagaimana keterikatan darah memiliki kekuatan bagi keterikatan etnik primordial serta emosi di dalamnya.²

Pendekatan berikutnya yang sering dipakai ialah pendekatan konstruktivis di mana dijelaskan bahwa identitas etnik merupakan sebuah konstruksi sosial dan sebuah produk dari proses yang menyatu dalam tindakan-tindakan maupun pilihan-pilihan manusia. Pendekatan konstruktivis percaya bahwa yang paling penting adalah orang-orang mendefinisikan dirinya secara berbeda baik dari segi kultural maupun fisik dengan orang-orang lainnya. Ketimbang melihat dari keturunan yang sama, konstruktivis percaya bahwa tindakan-tindakan politis yang

¹ Urmila Phadnis dan Rajat Ganguly, *Ethnicity and Nation Building in South Asia*, (Sage Publications: New Delhi, 2001), yang dikutip dalam tulisan Abanti Bhattacharya, “Conceptualising Uighur Separatism in Chinese Nationalism”, *Strategic Analysis*, volume 27 (3), Juli – September 2003, halaman 358-361.

² Abanti Bhattacharya, *Ibid.*, halaman 358.

sesuai dapat memobilisasi faktor-faktor etnik ke dalam sebuah formasi kelompok.³

Meskipun begitu, harus ditekankan bahwa kedua pendekatan tersebut tidaklah sempurna. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Misalnya saja bagaimana pendekatan primordialisme mengesampingkan fakta bahwa sangat banyak bagian dari tradisi yang merupakan hasil penemuan, dan bagaimana pendekatan konstruktivisme tidak mengindahkan kekuatan emosional dari etnikitas. Namun ketika kita mencoba memakai pendekatan yang seimbang, sebuah kelompok etnik membentuk penanda-penanda kultural baik subyektif maupun obyektif yang mungkin *inherent* atau diturunkan dan identitas-identitas etnik tersebut mengkristalisasi ke dalam sebuah formasi kelompok etnik ketika berseberangan dengan identitas-identitas lainnya. Ini berarti bahwa kelompok etnik hanya dapat dikembangkan ketika ada kontak dengan lainnya.⁴

Hal kedua yang perlu diingat pula adalah etnikitas itu sendiri bukan merupakan sesuatu fenomena yang statis. Batas-batas dari sebuah kelompok etnik terbentuk dan dinegosiasikan melalui keterkaitannya dengan perubahan-perubahan konteks sosial, politik, dan ekonomi.⁵ Pemahaman mengenai etnikitas inilah yang akan benar-benar berguna ketika kita berusaha untuk memahami kasus identitas Uighur di Xinjiang.

Berdasarkan perspektif dari baik konstruktivis maupun primordialis, di sini Battacharya pun berpendapat bahwa identitas Uighur pun secara umum dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 1) identitas agama, 2) identitas politik-historis, dan 3) identitas regional. Sebelumnya, perlu dicamkan baik-baik bahwa pada dasarnya ketiga identitas yang akan penulis tulis di bawah ini tidak berdiri sendiri secara independent melainkan beririsan satu sama lain. Oleh karena itu akan terdapat banyak irisan ketika penulis membicarakan satu aspek identitas etnik Uighur dengan aspek identitas lainnya.

³ Abanti Bhattacharya, *Ibid.*, halaman 358.

⁴ Abanti Bhattacharya, *Ibid.*, halaman 359.

⁵ Joanne N. Smith, "Making Culture Matter: Symbolic, Spatial and Social Boundaries Between Uyghurs and Han Chinese", *Asian Ethnicity*, volume 3 (2), September 2002, halaman 155.

3.1.1 Identitas Politik-Historis

Identitas pertama yang akan penulis jelaskan adalah identitas politik-historis dari etnik Uighur. Penulis melihat bahwa identitas ini merupakan identitas yang paling penting ketimbang dua poin identitas yang akan penulis jelaskan di bagian berikutnya. Penulis melihat bahwa identitas inilah yang kemudian akan membentuk identitas geografis serta identitas agama etnik Uighur tersebut sehingga ketiganya saling berkaitan satu dengan yang lain. Penulis merasa bahwa kata “politik-historis” memang perlu penulis cantumkan karena pada dasarnya faktor historis inilah yang melatarbelakangi identitas politik masyarakat Uighur. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sejarah Uighur membentuk identitas politiknya. Sebelum itu perlu diingat bahwa kronologis sejarah Xinjiang dan Uighur di Xinjiang sangatlah panjang. Oleh karena itu penjelasan yang penulis tuliskan di penelitian ini merupakan hasil simplifikasi sejarah melalui beberapa literatur.

Untuk menjelaskan secara lebih mendalam, penulis akan terlebih dahulu mengutip tulisan Owen Lattimore di bawah ini.

“The record of the Chinese in Central Asia is by no means continuous; in fact, their effective control has been estimated at only about 425 out of about 2000 years, divided into a number of periods, of which the present Chinese rule in the province of Sinkiang is the fifth major period.”⁶

Kutipan kalimat di atas setidaknya memberikan gambaran mengenai perbandingan konstelasi pendudukan wilayah Asia Tengah oleh China. Dari kutipan tersebut dapat diambil pelajaran bahwa China sendiri pun “hanya” menguasai wilayah tersebut selama kurang-lebih 425 tahun apabila kita mencoba untuk mengambil rentang waktu 2.000 tahun terakhir. Berdasarkan literatur yang penulis temukan, tidak dapat disangkal bahwa wilayah yang saat ini menjadi Xinjiang merupakan kampung halaman bagi berbagai cabang orang-orang keturunan Bangsa Turkic seperti misalnya saja Uighur, Kazak, Kyrgyz, Tatar, dan Uzbek.⁷ Di antara etnik-etnik tersebut, Uighur membentuk kelompok yang paling besar di Xinjiang. Uighur yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Jalan Sutera

⁶ Owen Lattimore, *Inner Asia Frontiers of China*, (Oxford: Oxford University Press), 1988, yang dikutip oleh Abanti Battacharya, *Op.Cit.*, halaman 359.

⁷ Graham E. Fuller dan S. Frederick Starr, “The Xinjiang Problem”, *Central-Asia Caucasus Institute*, halaman 10.

tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam pertukaran budaya antara Barat dan Timur serta pengembangan budaya dan peradaban mereka sendiri yang unik.

Penulis juga mencatat bahwa pada tahun 744 Masehi Uighur berhasil mendirikan kerajaannya sendiri yang saat ini berada di daerah Mongolia. Sayangnya kerajaan ini mengalami perpecahan akibat invasi Kyrgyz dan kemudian pecah menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Kanchow di bagian timur dan Kerajaan Karakhoja di bagian Barat. Kedua bagian ini kemudian dapat bertahan selama kurang lebih empat abad lamanya atau sekitar tahun 850 hingga 1250 masehi.⁸

Kerajaan tersebut kemudian jatuh ke tangan Mongol yang berhasil menduduki wilayah Asia Tengah pada tahun 1220 Masehi. Wilayah Asia Tengah pun dibagi ke dalam dua *khanate*, yaitu Transoxiana atau Turkistan Barat (*Western Turkistan*) di bagian barat yang saat ini kurang lebih berlokasi di sekitar Kyrgyztan dan Tajikistan serta Turkistan Timur di bagian timur yang kurang lebih saat ini berlokasi di sekitar Xinjiang.⁹

Pendudukan Mongol pun akhirnya mengalami keruntuhan dan Uighur pun pecah ke dalam beberapa wilayah kecil. Meskipun begitu ternyata Turkistan Timur masih dapat bertahan hingga tahun 1876 ketika akhirnya Manchu berhasil menginvasi Turkistan Timur. Manchu pun menganeksasi Turkistan Timur ke dalam teritorinya dan menyebutnya “Xinjiang” yang berarti ‘*New Territory*’ atau ‘*New Frontier*’ pada tanggal 18 November 1884.¹⁰

Secara historis, penulis juga mencatat bahwa identitas masyarakat Uighur juga tidak dapat dilepaskan dari ide pan-Turkisme dan pan-Islamisme.¹¹ Untuk lebih memudahkan pemahaman, penulis akan menceritakan selengkapnya pada periodisasi menjelang abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Pada paruh kedua abad ke-19, terjadi pergolakan di wilayah Xinjiang dan pergolakan ini pun berujung pada didirikannya negara teokratis Islam yang bernama Yettishar (yang

⁸ Abanti Bhattacharya, *Op. Cit.*, halaman 359.

⁹ Abanti Bhattacharya, *Ibid.*, halaman 360.

¹⁰ Abanti Bhattacharya, *Ibid.*, halaman 360.

¹¹ Joy R. Lee, “The Islamic Republic of Eastern Turkestan and the Formation of Modern Uyghur Identity in Xinjiang”, halaman 15,

http://www.uyghurpen.org/The_Formation_Of_Uyghur_Identity.pdf.

dapat diartikan sebagai negara dengan tujuh kota) dengan ibukotanya di Kashgar. Yettishar pun diterima dengan baik oleh sultan kerajaan Turki Usmani yaitu Sultan Abdulaziz. Abdulaziz pun kemudian mengakui Yaqub Beg (penguasa Yettishar saat itu) sebagai pemimpin resmi Yettishar dan membantunya dengan mengirimkan pejabat-pejabat Abdulaziz untuk membantu mendirikan pasukan-pasukan militer di wilayah Yettishar. Simbol-simbol dari Yettishar sendiri pun sangat mirip dengan Kerajaan Usmani dan ini bisa dilihat dari bagaimana Yettishar mengopi bendera Turki Usmani. Kemudian Yaqub Beg pun meresmikan status politik Yettishar sebagai protektorat Turki. Meskipun begitu pada akhirnya China berhasil menaklukkan wilayah tersebut pada tahun 1878.¹²

Meskipun begitu penulis mencatat bahwa penaklukan dari Yettishar ini tidak menghentikan penetrasi ide-ide pan-Turkic dari China. Masa-masa ketika Perang Dunia I membuktikan hal ini. Ini dilakukan terutama oleh Ahmed Kemal yang mendirikan sekolah dan mengajarkan konsep Pan-Turkic terhadap masyarakat dan dibantu dengan kyai-kyai serta kaum cendekiawan setempat. Sekitar tahun 1920-an usahanya pun membuahkan hasil dengan berhasil dibentuknya jaringan-jaringan sekolah dan institusi lainnya yang mempelajari sejarah yang sama orang-orang Turkic dan mengusung ide-ide kesatuan kultur, bahasa, dan agama dan mengadvokasi adanya kebutuhan untuk pembebasan dan pendirian negara federal Turkic yang juga termasuk dimasukkan pula teritori serta penduduk di Asia Tengah, Kazakhstan, dan seluruh kawasan Xinjiang serta Mongolia.¹³

Ide pan-Turkisme ini kemudian memasuki fase baru di era 1930-an di mana berhasil diproklamasikannya *Turkish Islamic Republic of East Turkestan* (TIRET) pada tanggal 2 November 1933 dengan Kashgar sebagai ibukotanya. Penulis juga mencatat bahwa Turki ternyata memiliki peran yang amat penting dibalik eksistensi TIRET pada masanya. Ini bisa terlihat misalnya saja dari pengiriman representasi entitas tersebut ke Turki pada awal tahun 1933 oleh para pemimpin TIRET seperti Sabit Damulla dan Muhammad Bughra. Sebaliknya, Turki pun mengirimkan berbagai kelompok orang yang ahli dalam hal politik, militer, dan para ahli lainnya ke Kashgar. Penulis mencatat bahwa representasi

¹² David Babayan, "Pan-Turkism and Geopolitics of China", *21st CENTURY*, 1 (9), halaman 14.

¹³ David Babayan, *Ibid.*, halaman 15.

yang dikirim Turki tersebut ternyata memberikan dampak yang begitu besar baik secara organisasional hingga penamaan dari TIRET itu sendiri. Para pemimpin TIRET pun percaya bahwa pemerintah Turki yang saat itu dipimpin oleh kabinet Mustafa Kemal Attaturk akan melindungi TIRET dari segala ancaman eksternal yang mungkin akan dihadapi.¹⁴

Sayangnya, ideologi pan-Turkisme (dan juga pan-Islamisme) yang dimanifestasikan melalui TIRET pun tidak bertahan lama karena direspon sangat negatif oleh pemerintah Uni Soviet dan China. TIRET pun berhasil dibubarkan setelah melalui intervensi pemerintah Uni Soviet.¹⁵

Usaha terakhir yang sempat dilakukan terkait identitas historis independensi entitas Uighur di Xinjiang ialah melalui pendirian Republik Turkestan Timur (East Turkestan Republic) pada akhir Perang Dunia II atau lebih tepatnya sekitar tahun 1944 – 1949. Republik Turkestan Timur ini sendiri sebenarnya dahulu merupakan negara dependen Uni Soviet yang saat ini berada di wilayah Xinjiang.¹⁶ Namun begitu setelah perang saudara berhasil diselesaikan dan pemerintah komunis berhasil menguasai dataran China (mainland China), pemerintah Uni Soviet pun mendukung pemerintahan komunis tersebut dan memastikan bahwa Republik Turkestan Timur berada di bawah kedaulatan China.

3.1.2 Identitas Agama

Identitas kedua yang akan penulis jelaskan di sini adalah identitas agama. Meskipun kedua identitas lain penulis jelaskan merupakan identitas yang sangat penting dan faktor Islam-pun sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor sejarah, penulis tetap melihat bahwa tidak dapat disangkal bahwa identitas agama ini bisa jadi merupakan identitas yang melekat pada etnik Uighur yang membedakannya dengan etnik-etnik lainnya di China.

Identitas Islam etnik Uighur dapat ditelusuri ketika masuknya Islam ke wilayah Asia Tengah pada abad ke-8 Masehi oleh bangsa Arab. Islam menyediakan keasadaran pemersatu dan Muslim Xinjiang mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari *Ummah* (komunitas dunia masyarakat yang

¹⁴ David Babayan, *Ibid.*, halaman 15.

¹⁵ David Babayan, *Ibid.*, halaman 15.

¹⁶ David Babayan, *Ibid.*, halaman 16.

beragama Islam) melalui ibadah-ibadah secara seperti Solat, membaca Al-Quran, memperingati hari-hari besar keagamaan, memakan makanan yang dianggap halal (diperbolehkan dalam Islam) dan meninggalkan makanan-makanan yang haram (tidak diperbolehkan), serta memakai simbol-simbol ke-Islam-an lainnya. Identitas Islam inilah yang kemudian dapat menghubungkan Uighur dengan dunia luar, dalam artian identitas Islam yang dimiliki Uighur mengoneksi Uighur dengan masyarakat Islam lainnya di luar Xinjiang sekaligus memberikan batasan identitas agama Uighur dengan pemeluk agama lainnya.¹⁷ Keterkaitan antara etnik Uighur dengan identitas Islam ini pun tidak dapat terpisahkan sehingga muncullah istilah etnoreligi.¹⁸ Masyarakat Uighur menganggap bahwa Islam merupakan bagian dari diri mereka untuk melestarikan tradisi dan budaya mereka.

Lebih spesifik lagi, penulis juga menemukan literatur yang mengatakan bahwa agama dari masyarakat Uighur tersebut adalah Muslim Sunni yang mempraktikkan mazhab Hanafi. Di Xinjiang dan beberapa kawasan di wilayah Asia Tengah sendiri sebenarnya juga sempat berkembang aliran Sufisme yang ternyata kurang harmonis. Penulis mencatat terdapat ketegangan di antara sekte-sekte Sufi tersebut di Xinjiang dalam kurun waktu abad ke-17 hingga abad ke-20.¹⁹

Secara umum kehidupan beragama Islam di oasis-oasis selatan Xinjiang, terutama Kashgar terlihat cenderung lebih konservatif ketimbang di wilayah Utara. Praktik-praktik Islam terutama bangkit kembali belum lama dan mengingat bagaimana sulit dipisahkannya agama dari seluruh aspek kehidupan umat Islam, termasuk pula politik dan pemerintahan, ini menyebabkan identitas agama Islam menjadi identitas yang dominan dalam konfrontasi etnik Uighur dengan pemerintah China. Dengan menggunakan Islam, masyarakat Uighur menolak konsep ateisme PKC dan juga tujuan PKC untuk memodernisasi dan meliberasi sosial. Meskipun begitu harus dicampak pula bahwa perasaan antimodernis

¹⁷ M. Hakan Yavuz, "The Patterns of Political Islamic Identity: Dynamics of National and Transnational Loyalties and Identities", *Central Asian Survey*, volume 14 (3), 1995, halaman 350, dalam Abanti Bhattacharya, *Op.Cit.*, halaman 361.

¹⁸ Dru C. Gladney, *Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People's Republic*, (Harvard: Harvard University Press, 1996), halaman 118, yang dikutip oleh Abanti Battacharya, *Ibid.*, halaman 361.

¹⁹ Davide Giglio, "Separatism and the War on Terror in China's Xinjiang Autonomous Region", dalam *Peace Operations Training Institute*, halaman 9, dapat diakses melalui <http://media.peaceopstraining.org/theses/giglio.pdf>.

tersebut tidaklah dipegang secara menyeluruh di Xinjiang, mengingat beberapa kelompok dari etnik Uighur sendiri diuntungkan dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang diadakan oleh pemerintah China di wilayah tersebut.²⁰

3.1.3 Identitas Regional

Identitas ketiga yang akan penulis bahas di sini berkaitan dengan lokasi di mana masyarakat Uighur itu sendiri tinggal, yaitu identitas geografis. Secara topografi, Xinjiang dikelilingi oleh pegunungan dan terdiri dari kawah sungai, padang pasir, oasis, dan sungai-sungai. Jarak antara Xinjiang dengan pusat pemerintahan (Beijing) pun sangat jauh yaitu kurang-lebih berjarak 4.000 kilometer. Kombinasi dari karakteristik geografis Uighur serta jarak antara tempat Uighur tinggal dengan pemerintahan ini pun memicu terbentuknya keterikatan Uighur dengan lokasi di mana mereka tinggal. Separatisme yang terjadi pun disebutkan Owen Lattimore sebagai fenomena “*stubborn separatism*”.²¹

Apabila (lagi-lagi) ditelusuri secara histories, penulis menemukan bahwa masyarakat Uighur yang kini tinggal di Xinjiang merupakan masyarakat yang sangat bergantung pada oasis. Mereka tinggal di oasis-oasis yang terpencar dan bergantung pada oasis tersebut untuk kehidupan agraris mereka.

Oasis ini rupanya lebih dari sekedar oasis belaka namun juga menjadi pengidentifikasian diri masyarakat Uighur. Berdasarkan literatur yang penulis temukan, masyarakat Uighur mengidentifikasikan diri melalui oasis tempat di mana mereka berasal misalnya saja Kashgar, Yarkand, Khargalik, Turpan, dan sebagainya.²² Pengidentifikasian ini masih terjadi pada akhir abad ke-19 yang dilakukan oleh Grenard dan kemudian diteliti kembali pada tahun 1980-an oleh Justin Rudelson. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa parokialisme ditambah dengan isolasi oasis dan pengaruh-pengaruh kultural sejarah Turkistan Timur masih melekat kuat pada tahun 1980-an tersebut ketika studi dilakukan.²³

²⁰ Davide Giglio, *Ibid.*, halaman 9.

²¹ Owen Lattimore, *Inner Asia Frontiers of China*, Boston: Beacon Press, halaman 151, yang dikutip oleh Abanti Bhattacharya, *Op.Cit.*, halaman 360.

²² Davide Giglio, *Op.Cit.*, halaman 9.

²³ Justin J. Rudelson, *Oasis Identities: Uyghur Nationalism along China's Silk Road*, (New York: Columbia University Press), 1997, dalam Thierry Kellner, “China: The Uighur Situation from

Meskipun begitu tidak semua sepakat dengan penelitian tersebut. Penelitian lain ternyata menyebutkan bahwa pengidentifikasian masyarakat Uighur terhadap oasis di mana mereka berasal dan juga parokialisme mulai memudar pada tahun 1990-an dan ini terutama dikarenakan perkembangan pendidikan di Xinjiang tersebut.²⁴ Selain itu penulis juga menemukan bahwa disebutkan dalam penelitian Joanne Smith di mana fragmentasi identitas Uighur terkait identitas Oasis mulai memudar dan mulai kurang dianggap penting lagi mengingat keterikatan antara identitas Uighur pada era tersebut (1990-an) lebih disebabkan karena oposisi identitas Uighur dengan identitas Han. Pada era 1990-an ini, rasa keterikatan identitas lebih berskala besar dalam artian mencakup etnik Uighur terlepas dari asal oasis mereka. Ini terutama terlihat jelas pada generasi muda Uighur apabila dibandingkan dengan generasi yang lebih tua.²⁵

3.2 Kebijakan Nasionalisme Pemerintah China

Pada intinya, penulis melihat bahwa kebijakan nasionalisme yang diusung oleh pemerintah China terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang adalah kebijakan asimilasi kultural (*cultural assimilationist*), di mana pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan etnik Uighur sebagai minoritas ke dalam kesatuan identitas nasional China yang lebih dominan. Seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya bahwa China menganut prinsip *civilizational state* untuk membedakan mana yang merupakan warga China dan mana yang bukan. Pemerintah China menganggap bahwa mereka yang berada di wilayah kedaulatan China merupakan bangsa China. Penulis mencatat ada beberapa hal yang menjadi poin utama dari asimilasi kultural ini yang menjadi manifestasi dari nasionalisme China. Penulis akan menjabarkan secara lebih mendalam melalui tiga kebijakan utama pemerintah terhadap minoritas etnik Uigur di Xinjiang. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pada dasarnya klasifikasi ini merupakan klasifikasi yang sifatnya umum, yaitu pengklasifikasian setelah melalui proses *screening* dan pengelompokkan terkait poin kebijakan-kebijakan yang hampir serupa. Adapun

Independence for the Central Asian Republics to the Post 11 September Era”, *United Nations High Commissioner for Refugees*, 2002, halaman 6.

²⁴ Penelitian ini dilakukan oleh Kostrzewa dan dikutip oleh Thierry Kellner, *Ibid.*, halaman 6.

²⁵ Joanne Smith, “Making Culture Matter: Symbolic, Spatial, and Social Boundaries between Uyghurs and Han Chinese”, *Asian Ethnicity*, September 2006, halaman 153-174.

tiga payung kebijakan utama pemerintah China adalah: 1) kebijakan *Go West*, 2) kebijakan Otonomi Terbatas, dan 3) kebijakan represi langsung.

3.2.1 Kebijakan Transmigrasi Etnik Han

Penulis melihat salah satu kebijakan signifikan dalam usaha pemerintah untuk menasionalisasi etnik Uighur di Xinjiang adalah dengan kebijakan transmigrasi etnik Han ke wilayah-wilayah yang masih belum berkembang terutama di bagian Barat China. Esensi dari kebijakan ini adalah pemerintah China mentransfer sejumlah penduduk etnik Han ke daerah Xinjiang. Migrasi penduduk etnik Han ke Xinjiang ini tentu saja dapat merubah demografi di Xinjiang itu sendiri. Penulis bahkan mencatat bahwa terdapat sekitar 250.000 warga etnik Han bermigrasi ke Xinjiang tiap tahunnya dan kurang-lebih 95% dari total penduduk Urumqi juga terdiri dari etnik Han.²⁶²⁷ Tentu saja ini menimbulkan perasaan di mana etnik Uighur tersebut seolah-olah menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Ini terlihat dari pergeseran demografi di Xinjiang di mana pada tahun 1949 etnik Han hanya membentuk sekitar 7% dari total populasi, namun sensus penduduk pada tahun 2000 menyebutkan bahwa pada tahun tersebut etnik Han telah melonjak hingga menyentuh angka 40,6% sedangkan etnik Uighur turun hingga berkisar pada angka 45,2%.²⁸²⁹ Perubahan dari komposisi demografis wilayah Xinjiang ini kemudian memiliki beberapa implikasi yang secara umum berarti deprivasi yang dirasakan oleh etnik Uighur tersebut.

Deprivasi yang pertama adalah kendala bahasa. Keberadaan etnik Han yang semakin signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas tersebut lebih jauh lagi mengaksentuasi kompleksitas dalam sisten pendidikan yang diinstitutionalisasikan di Xinjiang. Ini terlihat misalnya dari bagaimana etnik Uighur harus memilih antara pendidikan dalam bahasa China ataukah pendidikan dalam bahasa ibunya sendiri. Perbedaan bahasa yang dimanifestasikan dalam

²⁶ John Pomfret, "Go West, Young Han", Washington Post, 15 September 2000, dalam Matthew D. Moneyhon, "Taming China's 'Wild West': Ethnic Conflict in Xinjiang", halaman 11. <http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/TamingChina'sWildWest.PDF>.

²⁷ Graham E. Fuller dan S. Frederick Starr, *Op.Cit.*, halaman 16.

²⁸ _____, "China: Human Rights Concern in Xinjiang", *Human Right Watch*, <http://www.hrw.org/legacy/background/asia/china-bck1017.htm>.

²⁹ Stanley Toops, "Demographics and Development in Xinjiang after 1949", *East-West Center*, nomor 1, Mei 2004, halaman 1.

pendidikan ini ternyata menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan prospek karir di antara kedua kelompok. Mereka yang memilih mengenyam pendidikan dalam bahasa China ternyata mendapatkan lebih banyak manfaat. Penggunaan bahasa China sebagai medium dalam instruksi di sekolah-sekolah dianggap sebagai usaha untuk men-Sinifikasi secara paksa.³⁰

Deprivasi yang kedua adalah deprivasi secara ekonomi. Sebenarnya deprivasi ekonomi ini merupakan deprivasi yang sifatnya cukup rumit. Penulis mencatat bahwa kendala bahasa di sini berkontribusi terhadap deprivasi ekonomi yang dirasakan oleh etnik Uighur terkait keberadaan etnik Han di daerahnya. Etnik Han diuntungkan dengan adanya bahasa dan pelatihan-pelatihan sehingga penduduk etnik Han tersebut dapat mengontrol industri-industri besar di Xinjiang dan produksi ekonominya pun berusaha disesuaikan dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Deprivasi bahasa yang kemudian menyebabkan deprivasi ekonomi ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa penduduk Han semakin memarjinalisasi penduduk Uighur dalam usaha untuk menggerakkan perekonomian setempat. Ironisnya, di sini pemerintah pusat juga menyedot hasil kekayaan sumber daya alam Xinjiang untuk pembangunan ekonomi China di wilayah bagian timur.³¹

Memang telah ada kebijakan *Western Development Policy* oleh pemerintah pusat terhadap warga Xinjiang untuk mengurangi gap pembangunan ekonomi antara wilayah barat dan timur China. Namun penulis melihat bahwa justru pembangunan ekonomi yang ada di Xinjiang itulah yang kemudian semakin memperparah gap yang ada, di mana kini etnik Uighur justru seolah menjadi warga kelas dua secara ekonomi ketimbang etnik Han. Banyak dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dicetuskan oleh pemerintah pusat menyediakan lapangan pekerjaan cenderung bagi imigran (dan bukan bagi penduduk lokal) dan lapangan pekerjaan tersebut seringkali jatuh ke tangan etnik Han dan bukan pada etnik Uighur sebagai penduduk asli.³²

³⁰ Bhavna Singh, "Ethnic, Separatism, and Terrorism in Xinjiang", *Institute of Peace and Conflict studies*, Agustus 2010, halaman 2.

³¹ Abanti Battacharya, *Op.Cit.*, halaman 369.

³² Matthew D. Moneyhon, *Op.Cit.*, halaman 12.

Etnik Han ini juga terkadang sangat mendominasi di beberapa titik di Xinjiang, misalnya saja di Urumqi. Ironisnya lagi, Urumqi ini merupakan salah satu titik di mana secara perekonomian kondisinya jauh lebih baik ketimbang titik-titik lainnya. Di sisi lain, di Kashgar misalnya yang secara perekonomian bisa dibilang masih jauh terbelakang ternyata banyak dari penduduk Kashgar adalah etnik Uighur. Tentu saja kesenjangan ekonomi ini menimbulkan kecemburuan sosial antara etnik Uigur dengan etnik pendatang Han di Xinjiang secara umum.

Tabel 3.1 Perbandingan Komposisi Penduduk Uighur di Xinjiang³³

HOWELL AND FAN

123

Table 1. Demographic Profile of Xinjiang

	1945 ^a	1982 ^a	1996 ^a	2008 ^b
Total (million)	3.6	13.1	16.8	21.3
Han (percent)	6.2	40.3	41.1	39.2
Uyghur (percent)	82.7	45.7	50.6	46.1
Hui (percent)	2.8	4.3	4.9	4.5
Kazak (percent)	1.1	6.9	8.0	7.1
Other (percent)	7.2	2.8	2.8	3.1

^aSource: Chaudhuri, 2005.

^bSource: Compiled by authors from SBX, 2010.

Tabel 3.2 Perbandingan Pendapatan antara Wilayah Mayoritas Han dan Mayoritas Uighur³⁴

³³ Anthony Howell dan Cindy Fan, "Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and Uighur Migrants in Urumqi", *Eurasian Geography and Economics*, volume 52 (1), 2011, dapat diakses melalui <http://www.sscnet.ucla.edu/geog/downloads/597/403.pdf>.

³⁴ Abanti Battacharya, *Op. Cit.*, halaman 368.

Table-2: Economic Indicators of Major Cities of Xinjiang (1999)

Cities	Population (Million)	GDP (RMB bln)	Industrial Output (RMB bln)	Retail Sales (RMB bln)
Urumqi	1.589	24.9	22	11.1
Kashgar	3.342	6.9	1.38	1.7

Source: Xinjiang Statistical Yearbook

Accessed at <http://www.ice.it/estero2/pechino/profxinjiang.pdf> on 24-02-03

Tabel 3.3 Perbandingan Tingkat Pendidikan Xinjiang dengan Provinsi Lainnya³⁵

Table-3: Comparison of Xinjiang's Educational Level with that of Other Provinces

Regions	Provinces	No. of Universities /colleges	No. of Middle Schools	No. of Primary Schools	Illiteracy Rate
North China	Hebei	46	5,076	46,243	14.30%
Northeast China	Liaoning	62	3,517	14,386	12.13%
East China	Zhejiang	35	3,444	19,700	17.61%
Central South China	Guangdong	42	4,795	24,700	6.86%
Northwest China	Xinjiang	18	2,090	6,962	24.68%

Source: Compiled from various Internet websites

Deprivasi yang ketiga adalah deprivasi di bidang politik. Pada tahun 1950-an pemerintah China memang telah menetapkan Xinjiang sebagai daerah otonom. Meskipun begitu penulis melihat implementasi nyata dari status otonomi ini nampaknya belum benar-benar otonom. Maksudnya adalah, ada gap yang sangat besar antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi di daerah dengan status otonomi miliki. Hal ini menyebabkan etnik Uighur seolah-olah memiliki kekurangan kontrol politik bahkan di tanahnya sendiri. Memang, pemerintah China pun telah mempromosikan beberapa etnik Uighur ke dalam pos-pos senior administratif di dalam PKC. Meskipun begitu tidak dapat disangkal bahwa mayoritas dari para pemimpin Xinjiang berasal dari etnik Han. Di sini status “daerah otonom” nampaknya tidak lebih dari sekedar retorika politik belaka.

³⁵ Abanti Battacharya, *Ibid.*, halaman 369.

Bukti yang ada justru sebaliknya, bahwa etnik Han hanya memiliki tempat yang kecil untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait isu-isu yang terjadi di Xinjiang dan memiliki kapasitas yang kecil pula untuk menentukan kebijakan pemerintah setempat dan bagaimana Xinjiang ke depannya.³⁶

Deprivasi yang keempat adalah deprivasi di bidang agama. Kedua poin deprivasi di atas yaitu ekonomi dan politik pun membuat etnik Uighur frustrasi dan salah satu jalan untuk mengobati rasa frustrasi tersebut adalah dengan kembali kepada agama yaitu agama Islam sebagai agama yang tidak terlepas dari identitas etnik Uighur. Namun lagi-lagi hak etnik Uighur untuk mengekspresikan identitas agamanya terhalang karena pemerintah pusat sendiri pun tidak memberikan kebebasan bagi etnik Uighur dalam menjalankan agamanya.³⁷

Poin-poin deprivasi di atas kemudian membuat masyarakat Uighur kecewa dan kesal karena harus terjajah di tanah mereka sendiri dan tenggelam di antara orang-orang Han yang tergolong pendatang. Etnik Uighur tersebut pun mengkristalisasi identitas Uighur-nya ke dalam istilah “kami” untuk mengacu kepada sesama etnik Uighur dan “mereka” untuk mengacu pada etnik Han pendatang tersebut. Ada rasa takut di antara masyarakat Uighur itu sendiri mengenai sejauh mana identitas mereka akan benar-benar tenggelam di tengah-tengah usaha pemerintah China untuk mengasimilasi dan mengintegrasikan masyarakat Uighur melalui kebijakan nasionalisme China.³⁸

3.2.2 Kebijakan Otonomi Terbatas

Poin ini mungkin sekilas mirip dengan deprivasi politik yang penulis jabarkan sebelumnya. Tidak dapat disangkal bahwa kedua poin tersebut memiliki kemiripan dan keterikatan satu sama lain. Meskipun begitu pada poin ini yang ingin penulis tekankan adalah bagaimana relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Xinjiang dan sejauh mana pemerintah daerah Xinjiang sendiri memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan di provinsi tersebut.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah China menerapkan status otonomi daerah terhadap Xinjiang di mana komposisi demografis, identitas, serta

³⁶ Matthew D. Moneyhon, *Op.Cit.*, halaman 12.

³⁷ Matthew D. Moneyhon, *Ibid.*, halaman 12-13.

³⁸ Bhavna Singh, *Op.Cit.*, halaman 2.

historis Xinjiang sendiri memang cenderung berbeda dengan beberapa wilayah China lainnya. Tidak hanya Xinjiang, pemerintah China pun mengadopsi otonomi daerah untuk provinsi-provinsi di mana etnik minoritas berada seperti Xizang, Ningxia, Guangxi, dan Mongolia Dalam atau *Inner Mongolia*.³⁹ Hal tersebut diatur dalam konstitusi China yang terbaru yaitu konstitusi tahun 1982.⁴⁰ Dengan diadakannya daerah otonomi ini diharapkan aktivisme-aktivisme separatisme dapat dibendung dalam satu payung kesatuan China.

Namun pada kenyataannya ternyata ada kecacatan dalam otonomi daerah tersebut mengenai beberapa poin.⁴¹ Pertama, otonomi ini hanya menekankan secara dangkal pada bahasa dan cerita rakyat (*folklore*) ketimbang apa yang menjadi komponen sebuah identitas etnik seperti agama, kepercayaan, tradisi, serta sejarah. Kedua, meskipun secara *de jure* memang daerah-daerah tersebut memiliki status daerah otonomi, secara *de facto* peran pemerintah China masih sangat kuat dalam mengontrol daerah-daerah tersebut melalui pengadaan basis kekuatan militer yang cukup besar sehingga tidak seluruh prinsip-prinsip otonomi daerah benar-benar dijalankan oleh pemerintah China.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa status otonomi daerah yang melekat pada Xinjiang hanyalah sebuah *title* yang pada kenyataannya belum bisa menunjukkan signifikansi yang besar. Pemerintah China tetap mencengkeram Xinjiang sedemikian rupa dan membatasi ruang gerak pemerintah daerah Xinjiang dan masyarakat di dalamnya, terutama mereka yang merupakan etnik Uighur.

3.2.3 Kebijakan Represi Langsung

Penulis melihat poin ini sebenarnya merupakan inti dari karakteristik kebijakan nasionalisme China terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang melalui kebijakan asimilasionis. Meskipun poin ini adalah poin utama, namun tidak dapat disangkal bahwa poin ini memiliki irisan dan memiliki keterkaitan erat serta saling melengkapi dengan poin-poin sebelumnya. Pada poin ini penulis akan

³⁹ _____, "China Autonomous Region", http://www.chinatoday.com/city/china_autonomous_regions.htm.

⁴⁰ Hungdah Chiu, "The 1982 Chinese Constitution and the Rule of law", *Contemporary Asian Studies*, nomor 4 (1984), halaman 1-14, <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=mscas>.

⁴¹ Abanti Battacharya, *Op.Cit.*, halaman 365-366.

membahas kebijakan langsung pemerintah China (Beijing) terhadap warga Uighur di Xinjiang yang sifatnya bisa dikategorikan sebagai represif. Perlu diingat bahwa pada dasarnya kebijakan represif ini telah berlangsung sangat lama. Meskipun begitu kebijakan represif ini memiliki momentum yang sangat jelas terlihat pada tiga titik waktu, yaitu pascaruntuhnya Uni Soviet menjelang akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, dan juga pascaperistiwa 9/11 pada tahun 2001. Kebijakan represif pascaruntuhnya Uni Soviet terjadi karena kebangkitan rasa nasionalisme Uighur di Xinjiang setelah melihat “saudara” mereka yaitu negara-negara di Asia Tengah yang berhasil menggapai kemerdekaan dan membentuk negara-negara baru pecahan Uni Soviet. Sedangkan represi yang terjadi di tahun 2001 pascaperistiwa 9/11 merupakan momentum di mana isu terorisme digunakan pemerintah untuk melegitimasi kebijakan represinya terhadap etnik Uighur. Sesuai dengan batasan masalah penulis yang penulis kemukakan di bab I, penulis hanya akan menjelaskan secara mendalam mengenai kebijakan represif yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang pada rentang waktu tahun 2001 hingga 2010.

Penulis percaya bahwa kebijakan pemerintah China terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa eksternal yang terjadi secara global yaitu semakin merebaknya isu terorisme di dunia, terutama setelah terjadinya pengeboman menara kembar WTC pada tanggal 11 September 2001. Pada dasarnya perubahan ini dimulai dari bagaimana Amerika Serikat berusaha untuk mengonseptualisasi strategi keamanan nasionalnya terkait ancaman terorisme. Ini dapat dilihat dari bagaimana Amerika Serikat memulai sebuah kampanye antiterorisme yang disebut “*War on Terrorism*” untuk memerangi rejim Taliban dan Al-Qaeda dan juga pendirian Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*). Unikny, di sini kasus 9/11 juga dapat dijadikan negara lain untuk menghubungkan masalah domestik negara-negara tersebut dengan kampanye *War on Terrorism* dan menggunakan berbagai taktik tanpa harus takut adanya “kutukan” dari dunia internasional.⁴²

⁴² Nur Shahadah Jamil, “China’s Xinjiang Policy: An Analysis Based on the Theory of Relative Deprivation”, *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies*, volume 38 (1), 2011, halaman 153.

Salah satu pemerintah yang menggunakan isu terorisme untuk kepentingan domestiknya ialah pemerintah China. Penulis mencatat bahwa pemerintah China berusaha untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengaitkan kelompok separatis Uighur di Xinjiang yaitu ETIM dengan Al-Qaeda dan Taliban. Langkah pemerintah ini pun berhasil menempatkan perjuangan Uighur untuk mencapai kemerdekaan ke dalam konteks internasional. Padahal, bukti yang nyata keterkaitan antara ETIM dengan jaringan Al-Qaeda maupun Taliban juga belum benar-benar ada. Di sini, pemerintah China berusaha menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dengan menawarkan dukungan terhadap kampanye *War On Terrorism* melalui koalisi pasukan untuk menginvasi Afghanistan selama serangan tersebut tidak ditargetkan kepada penduduk sipil. Selain itu pemerintah China juga sepakat untuk berbagi informasi dengan Amerika Serikat dan meyakinkan Pervez Musharraf untuk turut serta dalam kampanye *War on Terrorism* terhadap kelompok Taliban di Afghanistan. Pemerintah China juga memperluas aksinya dengan memonitor akun-akun Bank di Hong Kong dan mainland China yang diduga memiliki keterkaitan dengan para teroris dan juga menutup perbatasannya dengan Afghanistan untuk menghindari masuknya pasukan Taliban ke Xinjiang. Tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintah China telah menggunakan isu terorisme ini untuk melancarkan strategi dan kebijakannya terhadap Xinjiang.⁴³

Ternyata penggunaan isu *War on Terrorism* ini juga berdampak kepada persepsi dunia internasional mengenai kebijakan represif China terhadap minoritas Uighur di Xinjiang. Sebelum peristiwa 9/11, dunia internasional benar-benar mengkritik kebijakan China ini. Namun setelah munculnya kampanye tersebut, respon dari dunia internasional pun cenderung melunak kepada China. Bahkan pada tahun 2002 pemerintah China kemudian memperluas definisi terorisme kepada mereka yang memiliki “pemikiran separatis”.⁴⁴ Bahkan menurut Amnesty International, pemerintah China pun memperluas definisi dari terorisme

⁴³ Nur Shahadah Jamil, *Op.Cit.*, halaman 153.

⁴⁴ Joshua Kurlantzick, “Repression and Revolt In China’s Wild West”, *Current History*, volume 103 (674), September 2004, halaman 264, yang dikutip melalui Nur Shahadah Jamil, *Op.Cit.*, halaman 154.

ini hingga mencapai istilah “terorisme spiritual” atau *spiritual terrorism*.⁴⁵ Tentu saja dampak nyata dari longgarnya definisi terorisme ini semakin melonggarkan pemerintah China dalam mengambil kebijakan yang lebih semena-mena.

Pemerintah China pun kemudian memperluas usaha meredam aktivisme Uighur di Xinjiang melalui kerja sama dengan pemerintah berbagai negara, terutama Amerika Serikat yang merupakan pengusung kampanye *War on Terrorism* dan juga pemerintah negara-negara di Asia Tengah yang secara geografis sangat berdekatan dengan Xinjiang. Kerja sama antara pemerintah China dengan Amerika Serikat ini misalnya terlihat dari Menteri Keamanan Publik (*Minister of Public Security*) di masa itu yaitu Zhou Yongkang yang mencoba meyakinkan duta besar Amerika Serikat untuk China yaitu Clark Randt untuk mendukung pemerintah China melawan teroris Uighur melalui kerja sama yang lebih terorganisasi antara kedua pemerintahan. Sedangkan untuk kerja sama dengan negara-negara Asia Tengah sendiri pemerintah China menggunakan Shanghai Cooperation Organization dan cara-cara ekonomi lainnya. Menarik untuk disimak mengingat seperti penjelasan penulis sebelumnya yaitu bangkitnya identitas serta aktivisme etnik Uighur tidak terlepas dari koneksi masyarakat Uighur di Xinjiang dengan masyarakat di negara-negara Asia Tengah yang notabene berasal dari keturunan yang mirip dan beragama Islam pula. Namun di sisi lain pemerintah negara-negara Asia Tengah tersebut justru cenderung lebih mendukung pemerintah China dalam usahanya untuk memberantas aksi terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama. Tentu saja kerja sama ini bukanlah semata-mata karena itikad baik, namun dikarenakan pula oleh kepentingan ekonomi negara-negara tersebut dengan China.⁴⁶

Hal menarik pula yang penulis temukan terkait faktor eksternal yang dijadikan “legitimasi” pemerintah China untuk merepresi etnik Uighur di Xinjiang adalah bukan hanya isu *War on Terrorism* namun juga isu perubahan politik di Asia Tengah. Ini dapat dilihat misalnya dalam kasus Revolusi Tulip di Kyrgyztan tahun 2005 di mana pada kasus ini berhasil digulingkan Presiden Askar Akayev

⁴⁵ _____, “Document – People’s Republic of China: Uighurs Fleeing Persecution as China Wages Its ‘War on Terror’”, <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/021/2004/en/4ada86b9-d5cd-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/asa170212004en.html>.

⁴⁶ Nur Shahadah Jamil, *Op. Cit.*, halaman 154.

yang telah menduduki kursi pemerintahan Kyrgyztan sejak negara tersebut didirikan. Menarik untuk dilihat bahwa penulis mencatat sejak tahun 1990-an pemerintah China secara terus-menerus telah menginjeksikan pengaruhnya pada kabinet Akayev untuk mengontrol Uighur di Kyrgyztan secara ketat. Peristiwa Revolusi Tulip ini tentu saja mengkhawatirkan pemerintah China karena Uighur di Kyrgyztan kini memiliki akses serta kebebasan yang lebih luas untuk mencapai kemerdekaan dan ditakutkan hal serupa juga berpotensi terjadi bagi etnik Uighur di Xinjiang.⁴⁷

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah China ini mengancam Uighur baik dalam hal *mortal threats* (ancaman terkait keamanan dan rasa aman) maupun *cultural threat* (ancaman terkait kultur atau identitas etnik Uighur tersebut).⁴⁸ Penulis melihat fakta bahwa hampir seluruh etnik Uighur beragama Islam kemudian digunakan pemerintah untuk melakukan kebijakan represif berupa dikecangkannya hak-hak masyarakat Uighur untuk menjalankan agamanya secara total. Ini terlihat misalnya saja dari larangan sholat, larangan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, ditutupnya beberapa masjid yang di Xinjiang, dan berbagai kebijakan represif lainnya. Apabila dipikirkan kembali secara logika, sebenarnya hal ini cukup wajar mengingat identitas “Islam” terkadang dipakai beberapa kelompok Uighur untuk melakukan gerakan separatismenya. Oleh karena itu pun pemerintah menggunakan identitas Islam etnik Uighur sebagai instrumen pelegitimasi kebijakan.

3.3 Faktor-faktor Potensial Lain yang Memengaruhi Kebijakan China

Pada dasarnya, faktor-faktor yang penulis sebutkan di atas adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan konsep nasionalisme dan identitas nasional yang berusaha diterapkan pemerintah China untuk mengatasi perbedaan identitas antara Uighur dengan bangsa China secara umum (terutama etnik Han). Di sini, penulis mencoba untuk memasukkan faktor-faktor lainnya yang penulis rasa memiliki keterkaitan dengan bagaimana kebijakan nasionalisme China diterapkan terhadap minoritas Uighur di Xinjiang pada periode 2001 hingga 2010. Adapun faktor-

⁴⁷ Nur Shahadah Jamil, *Op.Cit.*, halaman 154.

⁴⁸ Abanti Battacharya, *Op.Cit.*, halaman 367-371.

faktor lainnya tersebut adalah faktor geopolitik dan geostrategis serta faktor ekonomi.

3.3.1 Faktor Geopolitik dan Geostrategis

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa secara geopolitik dan geostrategis provinsi Xinjiang merupakan daerah yang sangat strategis sekaligus rentan. Ini dikarenakan Xinjiang berbatasan langsung dengan delapan negara lainnya. Apabila dikaitkan dengan kondisi geografis sendiri, maka ada tiga hal utama yang dikemukakan Bhavna Singh yang menjadi refleksi kebijakan pemerintah China di Xinjiang. Pertama, adanya tuntutan yang semakin tinggi mengenai pemerintahan yang transparan di Asia Tengah dan tuntutan ini memiliki potensi untuk berujung pada *spillover effect* ke Xinjiang yang pada akhirnya dikhawatirkan akan dapat semakin memicu radikalisme separatisme lebih jauh lagi. Kedua, besarnya jumlah warga etnik Uighur di negara-negara tetangga seperti misalnya Kyrgyztan dikhawatirkan dapat memberikan ancaman terorisme potensial yang kemudian dapat merusak jaringan infrastruktur ekspansionis seperti jalan raya, jalan kereta api, dan pipa dan ancaman tersebut dapat membahayakan program *Western Development Policy* China di kawasan tersebut. Ketiga, sama seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa antara Uighur dengan masyarakat di negara-negara Asia Tengah terdapat keterikatan yang besar baik dalam kemiripan bahasa, kemiripan sejarah dan keturunan, hingga kemiripan agama. Pemerintah China pun merasa khawatir bahwa ikatan-ikatan tersebut dapat memicu tendensi separatisme yang lebih besar (dan poin ini telah terbukti bahwa di era 1990-an ketika kebangkitan etnonasionalisme Uighur muncul).⁴⁹

Untuk menangani poin-poin geopolitik dan geostrategis di atas, ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh pemerintah China berdasarkan argumentasi dari Bhavna Singh. Cara-cara yang ingin penulis jabarkan di sini masih berkaitan dengan kedekatan lokasi geografis dan bukan cara-cara yang sifatnya jarak jauh (seperti misalnya kerja sama antara China dengan Amerika Serikat). Cara pertama adalah melalui peningkatan peran dan fungsi Shanghai

⁴⁹ Bhavna Singh, *Op.Cit.*, halaman 8.

Cooperation Organization sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tengah.⁵⁰ Organisasi ini dipercaya dapat menyediakan keamanan serta meredam ancaman Muslim fundamentalis di beberapa negara anggota melalui kerja sama dengan negara-negara tetangga terkait kontraterorisme.

Cara kedua yang dilakukan China adalah dengan menjalin interaksi dengan negara-negara di Asia Selatan seperti India dan Pakistan masih dalam usaha untuk membenteng terorisme.⁵¹ Pada tahun 2003 China dan Pakistan menjalin kerja sama untuk membatasi elemen-elemen radikal yang ada baik di Xinjiang maupun di Pakistan. Ini termanifestasi melalui keberhasilan pembunuhan terhadap Hasan Mahsum selaku pemimpin ETIM oleh militer Pakistan pada Oktober 2003 dan ini menjadi momentum semakin eratnya kerja sama di antara keduanya karena persamaan dari karakteristik utama masalah serta kedekatan geografis. Selain itu kunjungan Asif Ali Zardari ke Beijing pada bulan Juli 2010 juga menandakan dibentuknya kesepakatan mengenai cara pembendungan terorisme yang ada di teritori negara bersangkutan.

Selain melakukan kerja sama dengan China, penulis juga mencatat bahwa pemerintah China pun berusaha menjalin hubungan dengan India. Ini tidak kalah penting mengingat China juga berbatasan langsung dengan India di daerah Ladakh.⁵²

Lebih jauh lagi, Bhavna Singh pun mengatakan bahwa isu konflik etnik Uighur di Xinjiang dapat memengaruhi konteks keamanan Asia Tengah secara lebih besar.⁵³ Di satu sisi strategi China terkait Xinjiang dapat dimanfaatkan bagi China untuk menggenggam Asia Tengah dan memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Namun apabila hal tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, potensi destabilisasi juga akan sangat rentan terjadi.

3.3.2 Faktor Ekonomi

Faktor kedua yang akan penulis bahas adalah faktor ekonomi, terutama terkait dengan kepentingan keamanan energi China untuk pertumbuhan ekonominya.

⁵⁰ Bhavna Singh, *Ibid.*, halaman 8-9.

⁵¹ Bhavna Singh, *Ibid.*, halaman 9.

⁵² Bhavna Singh, *Ibid.*, halaman 9.

⁵³ Bhavna Singh, *Ibid.*, halaman 9.

Xinjiang merupakan daerah yang sangat kaya akan minyak bumi, gas bumi, dan uranium yang apabila dapat digunakan secara optimal maka sumber daya tersebut akan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi China.⁵⁴ Fakta bahwa China saat ini merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling besar di dunia pun tentunya membutuhkan sumber energi yang sangat besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi tersebut dan ini menyebabkan keamanan energi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kebijakan pemerintah China di Xinjiang.

Seperti yang telah penulis sebutkan pula di atas bahwa Xinjiang merupakan tempat terdapatnya pipa penghubung yang menghubungkan Xinjiang dengan area industri negara-negara Asia Tengah dan menghubungkan Xinjiang pula dengan kota-kota di wilayah timur China.⁵⁵ Xinjiang sendiri pun berada di lokasi yang strategis untuk memfasilitasi perdagangan minyak dan gas bumi.

Apabila penulis coba kaitkan fakta ini dengan kebijakan yang selama ini pemerintah China implementasikan terhadap etnik Uighur di Xinjiang, sudah jelas bahwa pemerintah berusaha mati-matian untuk mengintegrasikan mereka yang berada di Xinjiang ke dalam kedaulatan pemerintah China dan berusaha sebisa mungkin untuk meredam separatisme karena adanya kepentingan ekonomi. Apabila wilayah Xinjiang berhasil melepaskan diri, China pun akan kehilangan sumber daya alamnya yang sangat melimpah dan ini akan berdampak pada keamanan energi China ke depannya yang sangat dibutuhkan untuk menopang pesatnya perekonomian China saat ini.

3.4 Konsep Nasionalisme China: Otoritas Negara atau Pelanggaran HAM?

Pertanyaan berikutnya yang ingin penulis tanyakan adalah, apakah memang nasionalisme China merupakan otoritas pemerintah China terkait negaranya, ataupun justru kebijakan tersebut patut dipertanyakan kembali apabila dilihat dari segi kemanusiaan? Berdasarkan literatur yang penulis temukan, ternyata kebijakan China tersebut tidak sejalan dengan perangkat-perangkat aturan yang mengatur tentang HAM baik di ranah domestik maupun di ranah internasional.

⁵⁴ Davide Giglio, *Op. Cit.*, halaman 7-8.

⁵⁵ Davide Giglio, *Op. Cit.*, halaman 8.

Secara domestik, China telah melanggar apa yang tertera dalam Pasal 33 tahun 1984 di dalam Konstitusi China, di mana disebutkan bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan secara adil dan setara.⁵⁶ Pasal dalam konstitusi ini pun telah didukung oleh perangkat-perangkat China yang telah diratifikasi oleh China misalnya saja *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Selain itu juga pasal 4 Konstitusi China telah menyediakan pula tentang prinsip-prinsip fundamental nondiskriminatif dan juga kesetaraan bagi seluruh warga negara. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui tulisan di bawah ini.⁵⁷

“The state protects the lawful rights and interests of the minority nationalities and upholds and develops the relationship of equality, unity and mutual assistance among all of China's nationalities. Discrimination against and oppression of any nationality are prohibited; any acts that undermine the unity of the nationalities or instigate their secession are prohibited. The state helps the areas inhabited by minority nationalities speed up their economic and cultural development in accordance with the peculiarities and needs of the different minority nationalities. Regional autonomy is practised in areas where people of minority nationalities live in compact communities; in these areas organs of self-government are established for the exercise of the right of autonomy. All the national autonomous areas are inalienable parts of the People's Republic of China. The people of all nationalities have the freedom to use and develop their own spoken and written languages, and to preserve or reform their own ways and customs.”⁵⁸

Dari kalimat di atas, dapat diketahui bahwa apa yang selama ini pemerintah China lakukan jelas menyalahi apa yang seharusnya pemerintah China lakukan berdasarkan apa yang tertulis dalam hukum negara mereka. Seharusnya pemerintah China bisa melindungi dan menghormati identitas lokal etnik Uighur dan bukannya merepresi mereka. Pemerintah China bahkan juga belum berhasil

⁵⁶ _____, “Chapter Two: Fundamental Rights and Duties of the Citizens”, International Human Right Treaties and Document Database, dapat diakses melalui <http://www.hkhrm.org.hk/english/law/const03.html>.

⁵⁷ M.Rayla, “The Pain of A Nation: The Invisibility of Uyghurs in China Proper”, dalam *The Equal Rights Review*, volume 6, 2011, halaman 50.

⁵⁸ _____, “Chapter One: General Principle”, International Human Right Treaties and Document Database, dapat diakses melalui <http://www.hkhrm.org.hk/english/law/const02.html>.

menegakkan apa yang menjadi hak-hak dasar fundamental bagi etnik Uighur seperti hak mendapatkan rasa aman, dan sebagainya.

Contoh lain juga misalnya terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang perekrutan tenaga kerja di China.⁵⁹ Dalam peraturan ini dikatakan melalui pasal 3 bahwa segala pekerja berhak untuk menentukan pekerjaan apa yang mereka inginkan dan sistem perekrutan dalam lapangan kerja pun tidak boleh diskriminatif baik dalam hal ras, jender, atau kepercayaan.⁶⁰ Sedangkan seperti yang telah penulis jelaskan di atas, lagi-lagi pemerintah China belum berhasil menegakkan hal ini mengingat etnik Uighur sendiri sering mengalami diskriminasi dalam hal mendapatkan pekerjaan bahkan di tanah mereka sendiri yaitu di Xinjiang. Etnik Uighur ini cenderung tersisihkan dari etnik Han dan banyak etnik Uighur tersebut yang hidup miskin karena lapangan pekerjaan pun terbatas.

Apabila penulis mencoba untuk membawa kasus Uighur ini ke dalam konteks yang lebih besar yaitu perangkat hukum internasional, penulis lagi-lagi melihat begitu banyak kekurangan dari konsistensi penegakkan hukum pemerintah China terhadap etnik minoritas Uighur di Xinjiang. Salah satu perangkat hukum internasional yang menjadi basis utama penegakkan HAM adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Apabila penulis coba kaitkan dengan implementasi konsep nasionalisme China di Uighur, ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah namun tidak dilaksanakan dengan baik. Perlu diingat bahwa UDHR bisa dibilang menjadi payung hukum bagi perangkat hukum lainnya yang mengatur tentang sendi-sendi HAM secara lebih spesifik seperti misalnya saja *International Convention on the Elimination of Racial Discrimination* (ICERD), *UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities* (UNDM), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), *Convention Against Torture and other Cruel, Inhumane, or Degrading Treatment or Punishment* (CAT).⁶¹

⁵⁹ M.Rayla, *Op.Cit.*, halaman 51.

⁶⁰ _____, "Employment Promotion Law of the People's Republic of China", dapat diakses melalui www.hsph.harvard.edu/.../china.labor2.07.pdf.

⁶¹ M.Rayla, *Op.Cit.*, halaman 51.

Dari nama-nama perangkat hukum yang langsung berhubungan dengan HAM itu saja, maka dapat ditarik benang merah terkait dipertanyakannya konsistensi pemerintah China dalam menegakkan hukum-hukum tersebut. Sebagai bagian dari sistem internasional, pemerintah China tetap berkewajiban melaksanakan perangkat hukum internasional tersebut di dalam kebijakannya. Ternyata pemerintah China belum memperhatikan permasalahan ini dalam kebijakan nasionalisme China-nya terhadap etnik minoritas seperti Uighur di Xinjiang. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh M.Rayla, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi China untuk menegakkan hukum tersebut, yaitu: 1) adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat lokal, 2) kurangnya definisi legal yang jelas mengenai apa itu diskriminasi, 3) kurangnya sistem pengawasan atau monitoring yang sistematis dan efektif serta penilaian terhadap implementasinya di lapangan, 4) kapasitas institusional yang kurang bagus.⁶²

⁶² M.Rayla, *Ibid.*, halaman 51.

BAB IV

ANALISIS

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis secara mendalam temuan-temuan dalam literatur yang penulis baca untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang penulis ajukan pada bab I. Untuk membuat alur berpikir yang mengalir lancar, penulis langsung mencoba untuk menghubungkan bagian analisis ini dengan kerangka konseptual yang penulis tawarkan pada bab I. Penulis pertama-tama akan menjelaskan mengenai masalah nasionalisme yaitu bagaimana globalisasi memengaruhi dinamika pembentukan nasionalisme China saat ini. Kedua, penulis juga akan menjelaskan bagaimana nasionalisme yang telah terbentuk dari proses interaksi dengan globalisasi tersebut diimplementasikan terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang dan bagaimana terjadinya inkompatibilitas antara nasionalisme yang diusung oleh pemerintah China dengan nasionalisme yang diusung oleh etnik Uighur di Xinjiang. Ketiga, penulis juga akan menjelaskan mengenai hubungan antara pusat (pemerintah China di Beijing) dengan Uighur di Xinjiang melalui konsep kolonialisme internal untuk memahami kasus yang ada secara lebih komprehensif.

4.1 Globalisasi dan Pembentukan Nasionalisme China

Penulis melihat bahwa nasionalisme adalah bagian dari proses pembentukan identitas nasional seseorang, yaitu perasaan *sense of belonging* atau perasaan keterikatan antara orang tersebut dengan negara-bangsa yang ia tempati saat ini. Pengaruh globalisasi terhadap pembentukan nasionalisme memang bermacam-macam, terutama kaitannya dengan status serta peran suatu negara. Apabila penulis mencoba untuk menggariskannya dalam sebuah spektrum, maka ada argumentasi yang mengatakan bahwa globalisasi melemahkan peran negara karena batas-batas negara yang seolah semakin “kabur” karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Namun di spektrum lain, dikatakan pula bahwa peran negara di era globalisasi ini sangatlah besar mengingat bisa jadi negara merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional yang turut mendorong terjadinya globalisasi sehingga negara pula-

lah yang kemudian menjadi aktor yang akan bertanggung jawab dalam merespon globalisasi tersebut. Bagaimana suatu negara memandang dan merespon terhadap arus globalisasi yang menerjang ini tentunya akan memengaruhi bagaimana negara tersebut bereaksi terhadapnya, termasuk pula bagaimana konsep negara tersebut mengenai pembentukan nasionalisme negara yang bersangkutan.

Berdasarkan literatur yang penulis temukan dan telah penulis jabarkan secara lebih mendalam pada bab I, penulis pun dapat menganalisis bahwa pembentukan konsep nasionalisme China ternyata sangat dipengaruhi oleh globalisasi atau faktor-faktor eksternal yang berada di luar China. Apabila penulis boleh mengerucutkan kembali argumentasi penulis tadi, maka penulis pun menemukan bahwa pembentukan nasionalisme China ini sedikit banyak dipengaruhi oleh negara-negara Barat, lebih tepatnya bagaimana pandangan China terhadap negara-negara Barat, bagaimana pula negara-negara Barat memandang China, dan bagaimana pula China merespon pandangan seperti itu. Dengan kata lain penulis pun melihat bahwa dalam pembentukan suatu identitas, termasuk pula identitas nasional dan rasa nasionalisme ini sedikit banyak tidak muncul dalam vakuum, namun hal ini muncul karena adanya interaksi dengan pihak-pihak eksternal. Untuk lebih gampangnya penulis ingin menggunakan analogi dalam level individu yaitu apa yang membentuk diri kita dan bagaimana kepribadian kita juga sebenarnya ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul dan berinteraksi. Hal yang sama pula dapat diterapkan untuk menjelaskan tentang nasionalisme China ini.

Sebagai sebuah negara, China pun banyak belajar dari Barat serta mengadopsi sistem tata kenegaraan modern dalam artian China memakai sistem kenegaraan yang kurang lebih sama dengan apa yang dipakai di Barat dan banyak negara-negara lainnya di dunia. Sama halnya dengan konsep ketatanegaraan, nasionalisme pun banyak yang pemimpin China pelajari dari Barat, dari mulai Sun Yat-Sen hingga Hu Jintao. Di sini, penulis melihat bahwa pada dasarnya China melakukan importasi bentuk nasionalisme yang berasal dari Barat. Berdasarkan penjelasan penulis pada bab II tadi, memang tidak dapat disangkal bahwa pada era reformasi dan keterbukaan beberapa puluh tahun lalu, China memang berharap dapat belajar banyak dari Barat. Seperti yang kita lihat bahwa

China mengirim pula orang-orangnya untuk sekolah dan belajar dari Barat dengan harapan ide-ide mereka serta pengalaman mereka mengenai Barat dapat membantu mereka untuk mengembangkan negara China secara lebih modern. Dalam konteks ini, penulis pun melihat terjadi importasi atau pengambilan nilai-nilai Barat untuk turut membangun konsep kenegaraan serta nasionalisme di China.

Meskipun begitu, ternyata China bukan berarti hanya sekedar mengimpor nilai-nilai tersebut, namun China juga melakukan sebuah inovasi dari nilai-nilai yang berasal dari luar tersebut. Maksudnya adalah, dalam tahap untuk mengimplementasikan nilai tersebut secara lokal atau domestik, pemerintah dan para pemimpin China tidak langsung menelan nilai-nilai tersebut bulat-bulat. Di sini, penulis melihat adanya usaha yang cerdas untuk “mengglokalisasi” nilai-nilai tersebut agar dapat lebih diterima oleh masyarakat lokal dan agar China juga memiliki karakteristik uniknya sendiri yang menjadi identitas China dan yang menjadi pembeda antara China dengan negara-negara Barat secara khusus dan dengan negara-negara lainnya secara umum. Glokalisasi di sini sederhananya dapat berarti bagaimana China dapat melokalisasi nilai-nilai yang dianggap global atau nilai-nilai dominan yang berasal dari eksternal untuk kemudian dapat disesuaikan dan diterapkan secara lokal. Ada inovasi nilai-nilai di dalamnya. Proses glokalisasi ini misalnya dapat terlihat dari bagaimana pemimpin dan pemerintah China masih menggunakan konsep “konfusianisme” seperti ideologi negara ketika Yan Shikai berkuasa, atau bagaimana konfusianisme juga dipakai oleh Sun Yatsen yang menjaga aversi kuat kepada kosmopolitanisme dan kepercayaan pada bangkitnya tradisi China di sepanjang hidupnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mao yang berusaha untuk menyeimbangkan importasi investasi dan langkah-langkahnya dari Barat dan pada saat yang sama juga menyerukan pembangunan sosialisme dengan karakteristik China dan juga peradaban spritiual sosialis, dan berusaha pula untuk mencegah tendensi penyembahan akan sesuatu yang berasal dari luar. Para pemerintah dan pemimpin China berusaha untuk mereduksi sosialisme ke dalam sebuah simbol kesetiaan patriotik, sementara ortodoksi teknologi dan pasar dikenalkan sebagai panduan kebijakan.

Meskipun begitu, penulis nampaknya melihat masih ada kekurangan dalam konsepsi nasionalisme yang diusung China tersebut. Penulis melihat bahwa konsepsi nasionalisme tersebut memang mengimpor dari nilai-nilai yang ada di Barat dan melokalisasi nilai-nilai tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat lokal. Sayangnya, di sini bias masyarakat mayoritas dan minoritas nampaknya masih tetap ada. Nilai-nilai seperti konfusianisme misalnya, memang adalah nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat China, namun terbatas pada etnik mayoritas Han saja. Tampaknya konfusianisme tidak terlihat pada etnik minoritas seperti yang dianut oleh masyarakat di Tibet maupun Xinjiang. Oleh karena itu terjadilah kesenjangan identitas dari apa yang dipegang dan dianut oleh masyarakat mayoritas dengan apa yang dipegang dan dianut oleh masyarakat minoritas. Mungkin dengan lokalisasi nilai-nilai yang diimpor dari Barat tersebut pemerintah dan para pemimpin China tadi berhasil membuat masyarakat China secara umum dapat menerima dan meresapi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun tidak begitu dengan etnik-etnik minoritas tadi yang mungkin merasa ada penolakan bahkan terhadap nilai-nilai yang dianggap “lokal” oleh para pemerintah dan pemimpin China tersebut. Beberapa literatur yang penulis temukan mengatakan proses dari implementasi nasionalisme ini sangatlah Sinosentris, atau mungkin tepatnya Han-sentris sebagai etnik mayoritas.

4.2 Nasionalisme Sipil Versus Etnonasionalisme

Berdasarkan studi literatur yang penulis temui, maka penulis pun melihat bahwa nyata-nyata ada benturan antara konsepsi identitas nasional yang diusung oleh pemerintah dan bagaimana etnik Uighur melihat identitas mereka sendiri. Dalam kasus ini, penulis percaya bahwa konsepsi identitas nasional yang diusung oleh pemerintah China jelas tidak satu frekuensi dengan identitas Uighur. Ini tentu saja bisa dipahami apabila kita mencoba melihat dari identitas Uighur yang sangat berbeda dari mayoritas bangsa China pada umumnya, terutama etnik Han yang merupakan etnik mayoritas membentuk lebih dari 90% dari total populasi China. Identitas etnik Uighur sendiri bisa ditelusuri melalui latar belakang historis yang membentuk identitas politik, tempat di mana mereka tinggal yang kemudian membentuk identitas geografis, dan kepercayaan atau agama yang mereka anut (di

mana mayoritas beragama Islam) yang membentuk identitas agama. Faktor-faktor yang penulis sebutkan pada dasarnya adalah faktor-faktor yang menciptakan rasa keterikatan identitas sesama orang Uighur—bagaimana cara mereka melihat diri mereka sendiri dan bagaimana orang lain memandang mereka.

Di sisi lain, pemerintah berusaha keras untuk menciptakan rasa identitas nasional terhadap penduduk China. Pemerintah memiliki konsepsi mereka sendiri mengenai identitas nasional yang mungkin berbeda dengan Barat. Mereka mencoba untuk mengimplementasikan konsep ini dengan menciptakan kebijakan terhadap masyarakat mereka, termasuk pula etnik minoritas Uighur. Sayangnya, penulis menyadari bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak terlalu mulus. Orang-orang Uighur belum bisa benar-benar membangun rasa identitas nasional yang ingin diproliferasikan pemerintah terhadap warganya. Sebaliknya, orang-orang Uighur tersebut justru membangkitkan rasa identitas etnik mereka sendiri dan lebih jauh lagi mengambil langkah nyata untuk dengan mendirikan semacam gerakan nasionalis Uighur yang kurang lebih bisa dikatakan sebagai bentuk etnonasionalisme, di mana perasaan nasionalisme tumbuh rasa etnikitas yang membedakan Uighur dengan etnik-etnik lainnya di China.

Penulis pun ingin berargumentasi bahwa pada dasarnya penulis melihat gerakan nasionalis yang dilakukan oleh etnik Uighur ini tidak hanya dikarenakan oleh konsepsi identitas nasional yang tidak pantas yang ingin diimplementasikan oleh pemerintah China terhadap warganya. Penulis juga merasa bahwa bisa jadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah China-lah yang membuat kondisinya justru memburuk. Represi, marjinalisasi, dan bentuk-bentuk opresi yang dilakukan pemerintah terhadap etnik Uighur bisa jadi yang membangun rasa solidaritas di antara etnik Uighur itu sendiri yang kemudian berujung pada rasa identitas yang semakin meningkat sebagai etnik Uighur.

Penulis memang sadar bahwa pemerintah China membentuk Xinjiang sebagai salah satu daerah otonomi yang dikenal dengan nama *Xinjiang Uighur Autonomous Region* (XUAR). Meskipun begitu penulis juga melihat terdapat kecacatan dan kelemahan yang tampaknya “sengaja dibuat” oleh pemerintah itu sendiri. Secara *de jure* memang daerah itu masih merupakan otonomi daerah, namun secara *de facto* nampaknya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah

pusat melebihi apa yang seharusnya menjadi ranah pemerintah daerah. Berdasarkan literatur yang penulis temukan, pemerintah juga masih memperlakukan kontrol yang sangat ketat terhadap daerah tersebut tidak hanya dengan sekedar menyediakan militer di sana, namun juga sedikit demi sedikit meningkatkan pengaruh pemerintah pusat di daerah tersebut. Ini tampak misalnya saja dari kebijakan untuk mentransmigrasikan masyarakat etnik Han ke wilayah Xinjiang tersebut sehingga meskipun pada awalnya Uighur merupakan etnik mayoritas di Xinjiang, seiring dengan berlalunya waktu arus masuknya Han ke Xinjiang sedikit demi sedikit mengubah komposisi demografis di Xinjiang itu sendiri. Selain itu juga penulis melihat pemerintah China mengambil langkah lebih jauh lagi dengan cerdiknya menggunakan metode pendidikan, bahasa, kesempatan ekonomi, dan hal-hal yang lebih lunak lainnya untuk bagaimana caranya membuat etnik Uighur tersebut semakin termarginalisasi lebih jauh lagi. Karena mereka hanya memiliki ruang gerak yang sangat terbatas di tengah-tengah masyarakat dan juga karena posisinya berdasarkan stratifikasi sosial, etnik Uighur semakin menjadi rentan dan pemerintah pusat pun semakin memegang kendali atas daerah tersebut.

Kemudian penulis pun mencoba untuk menghubungkan studi kasus Uighur di China dan kerangka konseptual yang penulis gambarkan pada Bab I sebelumnya. Kelompok etnik Uighur menggunakan rasa identitas etnik yang semakin menguat sebagai sumber untuk melancarkan gerakan nasionalis Uighur dan menunjukkan pada pemerintah China terkait eksistensi mereka dan keinginan serta kepentingan mereka dan juga menciptakan dukungan serta simpati dari berbagai penjuru bumi—terutama sesama diaspora etnik Uighur yaitu orang-orang Uighur yang tidak tinggal di China—terkait kondisi mereka yang teropresi dan termarginalkan. Di lain pihak, pemerintah China juga berusaha untuk menciptakan kebijakan-kebijakan untuk menciptakan identitas nasional dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat China yang berasal dari etnik mana pun. Ini pun tampaknya berkaitan erat dengan kepentingan partai yang berkuasa di China untuk melegitimasi tindakannya. Kedua kepentingan tersebut saling beradu dan berbenturan satu sama lain dan membentuk apa yang disebut dengan konflik etnonasional yang dalam konteks ini ada di antara Uighur

dengan pemerintah China. Penulis berargumentasi bahwa konflik ini tidak hanya sekedar benturan identitas, namun juga karena faktor-faktor lainnya yang turut memperuncing seperti misalnya kondisi perekonomian Uighur. Sejak pemerintah berusaha untuk merepresi Uighur dari ranah politik dan ekonomi, bisa jadi gerakan nasionalis tersebut muncul karena ketidakpuasan yang dirasakan etnik Uighur terhadap pemerintah pusat yang gagal untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap etnik Uighur. Oleh karena itu, ini pun berujung pada kompleksitas masalah yang rumit dan lebih dalam ketimbang apa yang mungkin kita bayangkan pertama kali. Ketimbang melakukan sebuah apresiasi dan perengkulan terhadap etnik Uighur ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah China justru lebih cenderung kepada bentuk pelanggaran HAM.

4.4 Kolonialisme Internal di Xinjiang

Seperti namanya, kolonialisme internal menjelaskan terjadinya fenomena seolah-olah sebuah daerah di dalam wilayah kedaulatan domestik suatu negara dijadikan “koloni” pemerintah pusat negara yang bersangkutan. Dengan kata lain daerah tertentu tersebut digunakan untuk kepentingan kemajuan daerah lainnya terutama daerah pusat atau daerah-daerah strategis lainnya. Apabila penulis mencoba untuk menjelaskan kasus Uighur di China melalui konsep kolonialisme internal ini, penulis akan mendapatkan benang merah yang cukup kuat. Pertama, Xinjiang—seperti yang penulis katakan tadi—memiliki cadangan minyak yang luar biasa yang bahkan menandingi cadangan minyak di Arab Saudi. Pemerintah China tentu saja tidak akan menyia-nyaiakan fakta ini dan tidak mungkin akan melepaskan Xinjiang begitu saja karena Xinjiang merupakan daerah yang bisa “dieksploitasi” sumber daya alam minyaknya demi kepentingan China. Kedua, penulis melihat bahwa strategi yang dilakukan pemerintah China untuk mentransmigrasikan etnik Han ke Xinjiang ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: 1) untuk mengasimilasikan etnik Uighur dengan bangsa China Han secara umum, dan 2) untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam di Xinjiang sekaligus memastikan bahwa sumber daya alam yang dieksploitasi tersebut benar-benar masuk ke dalam keuntungan pemerintah pusat. Ini terlihat dari bagaimana literatur yang penulis temukan menyatakan bahwa banyak dari pemilik perusahaan-

perusahaan serta bisnis di Xinjiang diduduki oleh etnik Han. Lebih jauh lagi, ternyata banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut yang mensyaratkan kemampuan berbahasa China pada mereka yang ingin dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Tentu saja ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis. Di satu sisi masyarakat Uighur telah terdiskriminasi dengan kenyataan bahwa banyak dari pemilik modal di daerah tersebut adalah etnik Han. Di sisi lain keinginan mereka untuk meningkatkan strata sosial mereka terhalang perbedaan kultur dan linguistik yang ada. Pemerintah China mungkin berpikir bahwa dengan adanya kebijakan seperti ini maka etnik Uighur akan “dipaksa” untuk dapat berbahasa China sehingga asimilasi pun dapat berjalan.

Seakan tidak cukup dengan kenyataan bahwa terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial di daerah Xinjiang antara etnik Uighur dan etnik Han, kesenjangan secara umum pun terjadi di antara wilayah Barat dan Timur China. Wilayah Barat China seperti Xinjiang dan Tibet merupakan wilayah yang dapat dibilang sangat terbelakang pembangunan dan pertumbuhan ekonominya apabila dibandingkan dengan wilayah Timur China, terutama di garis pantai Timur China seperti Shanghai, Beijing, dan seterusnya. Kesenjangan sosial dan ekonomi ini memang pemerintah China berusaha untuk redamkan dengan pendirian kebijakan “*Western Development Policy*” yang sesuai namanya kebijakan ini berusaha untuk membangun wilayah-wilayah Barat di China dan memajukan roda perekonomian di wilayah tersebut dengan membangun infrastruktur, investasi, dan sebagainya. Namun sejauh yang penulis lihat, nampaknya *Western Development Policy* ini belum mencapai target yang optimal mengingat kesenjangan yang ada sangatlah besar. Pertumbuhan ekonomi sebanyak dua digit di China nampaknya belum dapat mencerminkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih sangat jauh antara wilayah Barat dan Timur. Kalau boleh sedikit kasar, nampaknya pertumbuhan ekonomi China ini belum berjalan bersamaan dengan pembangunan ekonomi.

4.5 Nasionalisme China dan Pelanggaran HAM

Penulis juga melihat bahwa kebijakan nasionalisme China ini pada praktiknya lebih banyak memberikan represi dan diskriminasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang ketimbang memberikan sebuah empowerment. Dari perangkat hukum internasional seperti UDHR maupun domestik seperti konstitusi China itu sendiri, sudah jelas terlihat bagaimana kebijakan pemerintah China ini tidak konsisten dengan perangkat-perangkat hukum yang telah dibuat. Penulis melihat inti dari diskriminasi ini ada pada kurang diakuinya identitas lokal etnik Uighur dan bagaimana pemerintah China seolah memaksakan untuk memberikan “identitas baru” pada etnik tersebut yang mana “identitas baru” sebagai bangsa China tersebut dapat mengerosi identitas-identitas lokal yang telah lama melekat dalam diri masyarakat Uighur. Ini belum lagi terkait hak-hak esensial lainnya seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, hak untuk hidup aman, hak untuk dapat mengekspresikan identitas kulturalnya, dan hak-hak fundamental lainnya.

Penulis lantas melihat wajar apabila banyak sekali pergolakan serta usaha-usaha pemberontakan yang muncul akibat kebijakan ini. Semakin direpresi, terkadang orang justru akan semakin memberontak dan aksi-aksi separatisme ini bisa jadi merupakan manifestasi dari rasa frustrasi masyarakat Uighur karena terus mengalami diskriminasi dan represi pemerintah China.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Globalisasi kini memang telah jadi fenomena yang tidak terelekan. Meskipun secara esensi globalisasi sendiri telah terjadi ratusan tahun yang lalu, globalisasi yang ada di abad ke-21 ini begitu cepat dan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan dari mulai individu hingga bangsa dan negara. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi serta terbentuknya sistem pasar dunia menyebabkan mau tidak mau tiap-tiap negara harus menjalin relasi dengan negara lain dan ikut serta dalam arus globalisasi.

Dalam penelitian kali ini, pertanyaan utama yang ingin penulis jawab adalah bagaimana implementasi konsep nasionalisme China di era globalisasi terhadap minoritas etnik Uighur di Xinjiang pada periode 2001-2010. Melalui penelitian kali ini, penulis telah menemukan temuan-temuan utama yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut sekaligus memberikan kontribusi ide baru dalam khazanah ilmu sosial dan ilmu politik secara umum dan khazanah ilmu hubungan internasional secara khusus.

Temuan pertama penulis adalah ternyata memang benar bahwa globalisasi memberikan pengaruh terhadap bagaimana suatu negara mengonsepsikan kebangsaan dan kenegaraannya. Dari penjelasan di bab II penulis dapat diambil poin utama bahwa pada dasarnya bentuk negara serta bentuk nasionalisme China saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan ini sangat terlihat pada saat pembentukan negara China modern oleh Sun Yat-Sen yang banyak mengambil prinsip-prinsip yang berasal dari Barat. Importasi dan inovasi mungkin adalah kata yang tepat bagaimana pemimpin-pemimpin China saat ini berusaha untuk memasukkan produk dan nilai eksternal agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat China dan implementasikan dalam konsep nasionalisme China. Selain itu juga ternyata penulis menemukan bahwa pemimpin China berusaha untuk membuat China mejadi sebuah negara-peradaban atau *civilizational state* yang membedakan China dengan bangsa-bangsa lainnya. negara-peradaban China inilah yang coba pemerintah China terapkan terhadap

seluruh penduduk yang tinggal di kedaulatan China terlepas dari etnisitas serta identitas lokal mereka.

Temuan kedua penulis adalah sebenarnya nasionalisme China ini sedikit banyak mengambil unsur nasionalisme sipil yang banyak dipakai di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun begitu nasionalisme sipil ini agaknya diadaptasi oleh pemerintah China sedemikian rupa sehingga terdapat elemen-elemen baru dari nasionalisme China yang mungkin tidak ada dalam esensi dasar nasionalisme sipil. Penulis melihat bahwa nasionalisme China tersebut memang mengakui bahwa mereka yang tinggal di dalam kedaulatan China saat ini merupakan bagian dari bangsa China terlepas dari etnisitas, bahasa, keturunan, agama, dan identitas lokal lainnya. Namun ketika pemerintah China berusaha untuk mengimplementasikan nasionalisme China tersebut kepada etnik minoritas (dalam penelitian ini dispesifikasi lagi menjadi Uighur), nampaknya memang sulit untuk tidak mengikutsertakan identitas dominan yang ada di China itu sendiri. Maksudnya adalah, meskipun pemerintah China berusaha untuk mengimplementasikan sesuatu yang dianggap universal untuk mencapai kesatuan nasional bangsa China, tidak dapat disangkal bahwa pengaruh Han sebagai etnik mayoritas sangat berperan di sini. Hal ini dipandang sebagai bentuk Han-sentrisme atau Sinifikasi dari etnik-etnik minoritas termasuk etnik Uighur yang ada di Xinjiang.

Temuan ketiga penulis adalah rasa keterikatan etnik Uighur tersebut nampaknya semakin menguat pascaruntuhnya Uni Soviet di akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Selain karena etnik Uighur tersebut sadar secara konsepsi identitas mereka cenderung berbeda dari bangsa China kebanyakan (yang merupakan gabungan dari identitas historis-politik, agama, dan geografis seperti yang penulis telah jabarkan di bab I), fakta bahwa banyak negara-negara di kawasan Asia Tengah yang berhasil memerdekakan diri dari Uni Soviet pun nampaknya berkontribusi terhadap apa yang penulis sebut sebagai etnonasionalisme Uighur. Hal ini sebenarnya cukup logis mengingat apabila dilihat dari sudut pandang identitas etnik Uighur tersebut lebih dekat dengan masyarakat di negara-negara Asia Tengah baik secara historis-politik, agama,

bahasa, maupun geografis ketimbang bangsa China yang dominan yang tinggal di pantai timur China.

Temuan keempat penulis adalah ternyata pemerintah China sadar akan hal ini dan kemudian berusaha untuk mengintegrasikan etnik Uighur ke dalam payung kebijakan asimilasi kultural atau cultural assimilationist policy yang penulis klasifikasikan komponennya ke dalam tiga bagian yaitu migrasi etnik Han ke wilayah Xinjiang, otonomi terbatas, dan represi langsung. Pada awalnya intensi dari pemerintah China memang untuk mengintegrasikan etnik Uighur tersebut dan mencegah mereka melakukan aksi separatisme dan mencegah pecahnya negara kedaulatan China. Ternyata penulis melihat kebijakan pemerintah China tersebut justru berujung pada pelanggaran HAM karena etnik Uighur tersebut mengalami diskriminasi, opresi, dan represi besar-besaran akibat kebijakan asimilasi kultural pemerintah China.

Temuan kelima penulis adalah faktor eksternal ternyata turut memengaruhi dinamika kebijakan China terhadap Uighur. Kebijakan China yang represif ini terlihat jelas pascaruntuhnya Uni Soviet yaitu di tahun 1990-an. Selain itu juga isu terorisme setelah kejadian 9/11 pun turut membuat pemerintah China melabel aktivisme-aktivisme separatis sebagai bagian dari aksi terorisme. Ini tentu saja berdampak pada bagaimana dunia internasional memandang kebijakan China tersebut. Apabila dahulu dunia internasional benar-benar mengecam China, kejadian 9/11 dan pelabelan “terorisme” pada etnik Uighur seolah melunakkan kecaman dunia internasional tersebut.

Temuan keenam penulis adalah pada akhirnya penulis melihat nasionalisme China ini merupakan kebijakan yang ironis. Di satu sisi pemerintah China berusaha untuk membentuk suatu identitas kesatuan bangsa China, namun di sisi lain pemerintah China justru melanggar HAM fundamental dari kelompok Uighur tersebut dengan tidak menjalankan perangkat-perangkat hukum yang ada baik di ranah domestik maupun di ranah internasional. Banyak HAM fundamental dari etnik Uighur tersebut yang tidak bisa ditegakkan, seperti hak untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, hak untuk bebas diskriminasi dalam banyak aspek kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak-hak lainnya.

Penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hubungan internasional melalui sudut pandang yang berbeda. Sekilas, mungkin penelitian penulis ini terlihat begitu domestik mengingat di sini aktor-aktor yang penulis bahas masih berada dalam satu wilayah kedaulatan negara, yaitu pemerintah China dengan etnik Uighur di Xinjiang. Meskipun begitu penulis melihat bahwa pada dasarnya di sini aktor-aktor tersebut juga dipengaruhi oleh situasi apa yang terjadi dalam dunia internasional. Misalnya saja konsep nasionalisme China itu sendiri yang ternyata tidak lepas dari importasi produk dan nilai-nilai yang berasal dari luar China (eksternal) dan bagaimana interaksi antara China dengan negara-negara lain juga turut membentuk konsep nasionalisme tersebut. Sedangkan untuk Xinjiang sendiri ternyata penulis melihat bahwa kebangkitan nasionalisme etnik Uighur di Xinjiang (etnonasionalisme) tidak dapat dilepaskan dari rasa keterikatan antara Uighur di Xinjiang dengan negara-negara di Asia Tengah dan fakta bahwa negara-negara di Asia Tengah tersebut dapat memerdekakan diri mereka dari Uni Soviet pun memperkuat kembali kebangkitan etnonasionalisme tersebut. Dengan kata lain penulis melihat bahwa globalisasi apalagi di era globalisasi 3.0 di mana bahkan interaksi secara global dapat terjadi di level masyarakat membuat kabur batas-batas mana yang termasuk ke dalam hubungan internasional dan mana yang bukan. Bukankah *what personal is international dan what international is personal*? Bukankah apa yang terjadi di level internasional pasti akan berpengaruh ke level individu dan begitu pula individu bukankah mereka juga dapat berkontribusi terhadap dinamika hubungan internasional?

Penulis sadar bahwa dalam menjawab permasalahan Uighur di Xinjiang ini, tidak ada jawaban yang pasti dan tidak ada jawaban yang benar-benar *rigid*. Tampaknya metode *trial and error* pun tidak masalah untuk coba diterapkan selama metode tersebut telah mengalami proses pengkajian dan penelitian yang cukup matang, bukan *trial and error* yang cenderung asal-asalan dan tidak bertanggung jawab. Namun sebagai seorang peneliti yang telah mengkaji kaus ini, nampaknya penulis pun sedikit banyak memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi bagaimana menjawab permasalahan ini. Perlu diingat bahwa rekomendasi ini berdasarkan hasil penelitian penulis. Rekomendasi ini

sifatnya sangat kontekstual, sehingga bisa jadi penelitian lain yang memakai perspektif yang berbeda akan menghasilkan rekomendasi yang berbeda pula.

Pertama, penulis percaya bahwa pada dasarnya banyak sekali konflik yang diakibatkan oleh masalah perut dan banyak konflik di mana pemenuhan perut bisa menjadi solusi yang jitu. Melihat dari kondisi Xinjiang secara umum dan kondisi etnik Uighur di Xinjiang secara khusus, penulis melihat adanya disparitas dalam kemampuan ekonomi yang besar. Kesenjangan tersebut terjadi berlapis-lapis, misalnya saja kesenjangan antara wilayah Barat dan Timur China, lalu kesenjangan antara etnik Uighur dan etnik Han di Xinjiang itu sendiri. Penulis melihat bahwa meskipun Uighur merupakan kelompok etnik yang telah menempati Xinjiang dalam waktu yang sangat lama, tampaknya keberadaan mereka semakin lama semakin rentan dengan kebijakan transmigrasi yang pemerintah China terapkan di mana kini komposisi etnik Han sudah sangat besar dan semakin mendominasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif di Xinjiang. Pemerintah China memang telah memiliki kebijakan *Western Development Policy* untuk membangun wilayah Barat (termasuk Xinjiang) namun sayangnya kebijakan ini tampaknya belum mencapai hasil yang optimal. Perlu dipikirkan kembali bagaimana caranya untuk menyejahterakan etnik Uighur itu sendiri sehingga etnik tersebut tidak menjadi etnik terjajah di tanah sendiri. Program matrikulasi untuk meratakan pendapatan dan pendidikan untuk meningkatkan status sosial etnik Uighur nampaknya diperlukan.

Kedua, secara politik, nampaknya esensi dari otonomi daerah perlu dikembalikan lagi. Berdasarkan literatur yang penulis temukan, memang secara *de jure* pemerintah China memberikan status otonomi daerah pada Xinjiang. Namun pada praktiknya, peran serta pengaruh dari pemerintah pusat sangatlah besar. Lalu patut dipertanyakan lagi, apa gunanya memberikan otonomi daerah tersebut apabila pada akhirnya pemerintah daerah harus tetap “*manut*” kepada pemerintah pusat? Apabila pemerintah daerah Xinjiang benar-benar diberikan otoritas sebagaimana layaknya otonomi daerah bekerja, penulis melihat ada kemungkinan peluang di mana pemerintah daerah tersebut dapat mendeteksi keinginan dan kebutuhan etnik Uighur di Xinjiang secara lebih komprehensif dan mendetail dan kebutuhan-kebutuhan pun dapat dipenuhi. Di sini, level implementasi nyata perlu

diperhatikan mengingat sebenarnya pemerintah memang telah mencoba memperhatikan kebutuhan dari etnik Uighur di Xinjiang, meskipun begitu implementasi dari peraturan yang disepakati tersebut belum berjalan maksimal.

Ketiga, nampaknya pemenuhan kebutuhan kultural pun perlu diperhatikan. Kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan identitas ke-Uighur-an perlu ditegakkan. Misalnya saja diizinkan etnik Uighur untuk menjalankan ibadahnya secara maksimal dengan aman tanpa adanya rasa takut bahwa mereka akan mengalami diskriminasi atau opresi, dan sebagainya. Mungkin pemerintah China merasa takut apabila hal-hal seperti itu diperbolehkan, maka identitas ke-Uighur-an pun dapat terbentuk dan dapat “mengintegrasikan” Uighur untuk melawan China. Namun penulis sendiri berpendapat setidaknya itu dapat membuat etnik Uighur menjadi lebih hormat kepada pemerintah China karena pemerintah China mencoba untuk menghargai identitas Uighur dan melindungi identitas unik etnik Uighur. Dengan cara seperti ini seharusnya etnik Uighur tersebut dapat lebih mengerti dan mau untuk tetap bergabung ke dalam kesatuan nasional China.

Keempat, sebenarnya China juga dapat memanfaatkan momentum kebangkitan China ini untuk memastikan tidak ada yang memisahkan diri daerah kedaulatan China. Namun China perlu menggunakannya momentum ini dengan rapi. Pertumbuhan perekonomian yang pesat perlu dibarengi pula dengan pembangunan dan pemerataan ekonomi di berbagai penjuru negeri. Fakta bahwa Xinjiang memiliki sumber daya alam minyak yang melimpah pun dapat menjadi faktor utama untuk tetap mempertahankan Xinjiang.

Kelima, berkaitan dengan HAM dan perangkat hukum yang ada, nampaknya kebijakan dari nasionalisme China ini patut dikaji kembali sisi kemanusiannya. Idealnya, sebuah kebijakan harus berlandaskan perangkat hukum yang telah dibuat dan disepakati bersama baik di level domestik maupun di level internasional sehingga ada konsistensi antara ekspektasi dengan realita. Namun konsistensi ini justru dipertanyakan di China mengingat banyak kebijakan nasionalisme itu yang menyimpang. Memang sulit dan mungkin terdengar sedikit utopis, tapi penulis melihat justru di sinilah tantangannya bagaimana caranya

menyatukan etnik minoritas seperti Uighur ke dalam kesatuan bangsa China tanpa harus melenyapkan identitas lokal yang menjadi ciri khas etnik-etnik tersebut.

Pada akhirnya, penulis pun melihat bahwa ketimbang cara-cara yang represif, pemerintah China mungkin sebaiknya melirik cara-cara yang lebih *soft* dan merangkul. Perlu diingat bahwa keinginan untuk memisahkan diri ada karena ketidakpuasan akan kinerja pemerintah pusat. Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah China pun adalah bagaimana memuaskan hasrat etnik Uighur tersebut dan beberapa cara yang menurut penulis sangat mungkin untuk dilakukan adalah dengan penghormatan terhadap keunikan identitas Uighur dan dengan “mengenyangkan” perut etnik Uighur tersebut.

Penulis mengakui dalam penelitian ini masih terdapat berbagai keterbatasan yang ada. Misalnya saja penulis belum menjelaskan secara lebih mendalam mengenai gerakan di Uighur itu sendiri, apakah memang seluruh etnik Uighur menginginkan adanya independensi dari tangan China, atautkah mereka yang berkoar-koar akan independensi adalah mereka yang haus akan kekuasaan. Penulis juga melihat bahwa di antara Uighur itu sendiri belum terjadi visi yang sama, apakah hanya sekedar mendapatkan pengakuan atautkah mereka ingin benar-benar menjadikan tanahnya sebagai negara baru yang merdeka. Padahal perbedaan visi tersebut tentu saja memengaruhi misi dan detil aktivisme yang dilakukan oleh kelompok etnik Uighur. Selain itu penulis tidak menyangkal bahwa mungkin salah satu kelemahan dalam penelitian ilmu hubungan internasional adalah kurangnya data empiris untuk lebih menegaskan dan menjelaskan argumentasi si peneliti. Penelitian yang penulis ambil ini pun sebenarnya hanya berasal dari studi literatur dan penulis pun tidak langsung turun lapangan ke Xinjiang ataupun mewawancara orang-orang yang berasal dari etnik Uighur. Tentu saja ini bisa menimbulkan bahaya dalam hal akurasi mengingat bisa saja bahan-bahan yang penulis pakai untuk menjabarkan dan menganalisis adalah bahan-bahan memiliki unsur-unsur bias (misalnya saja ditulis oleh orang-orang dari Barat yang memiliki sentimen yang agak negatif pada China) sehingga ini pun tentunya akan sangat memengaruhi hasil penelitian penulis.

Untuk ke depannya, penulis merekomendasikan agar penelitian mengenai konflik antara Uighur di Xinjiang dengan pemerintah bisa lebih diperdalam. Ini

dapat dicapai misalnya dengan meneliti faktor-faktor yang dapat memicu konflik lainnya. Misalnya saja bagaimana pengaruh keberadaan Uighur diaspora terhadap pembentukan identitas etnik Uighur dan apa sajakah aktivisme yang dilakukan oleh Uighur diaspora tersebut. Selain masalah identitas, nampaknya isu-isu yang lebih strategis pun bisa dikaji misalnya saja isu geopolitik dan geostrategis wilayah Xinjiang, apakah itu dalam internal Xinjiang itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainnya baik di dalam maupun di luar China. Selain itu juga perbandingan dengan kasus serupa lainnya baik di dalam (seperti misalnya kasus Tibet) maupun di luar China pun nampaknya diperlukan, setidaknya untuk memperkaya pemahaman kita akan kerangka berpikir hubungan antara mayoritas dan minoritas dalam suatu negara. Mengingat identitas pun adalah sebuah topik yang masih tergolong baru di ilmu hubungan internasional dan sejauh ini pun penulis belum melihat adanya satu konsep atau teori yang benar-benar mapan, penulis pun merekomendasikan mungkin untuk ke depannya fenomenan hubungan antara Uighur dengan pemerintah China ini bisa dikaji menggunakan konsep atau teori lain yang berkaitan. Ini dimaksudkan agar kajian Uighur di China bisa dipandang melalui berbagai perspektif, cara, dan titik tolak yang berbeda-beda sehingga hasil penelitian pun dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Becchofer dan McCrone. 2009. *Nationalism, National Identity, and Constitutional Change*. Palgrave MacMillan.
- Billig, Michael. 1995. *Banal Nationalism*. London: Sage.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Frank, Andre G. 1970. *Latin America: underdevelopment or revolution: essays on the development of underdevelopment and the immediate enemy*. New York/London: Monthly Review Press.
- Friedman, Thomas L. 2005. *The World Is Flat: A Brief History of the 21st Century*. New York: Farrar, Straus, Giroux.
- Gladney, Dru C. 1996. *Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People's Republic*. Harvard: Harvard University Press.
- Heberer, Thomas. 1989. *China and its National Minorities: Autonomy or Assimilation?* London: M.E. Sharpe Inc.
- Hughes, Christopher R. 2006. *Chinese Nationalism in the Global Era*. London dan New York: Routledge.
- Hutchinson, John dan Anthony D. Smith, ed. 1994. *Nationalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Lattimore, Owen. 1988. *Inner Asia Frontiers of China*. Oxford: Oxford University Press.
- Leifer, Michael. 2000. *Asian Nationalism*. Routledge: London dan New York.
- Marquard, Leo. 1957. *South Africa's Colony Policy*. Johannesburg: Institute of Race Relations.
- Neuman, W. Lawrence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn & Bacon.
- Phadnis, Umila dan Rajat Ganguly. 2001. "Ethnicity and Nation Building in South Asia." New Delhi: Sage Publications.

- Rudelson, Justin J. 1997. *Oasis Identities: Uyghur Nationalism along China's Silk Road*. New York: Columbia University Press.
- Smith, Anthony D. 1993. *National Identity*. Reno: University of Nevada Press.
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, Anthony D. 2002. *Nationalism*. Polity.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wang, Gungwu. 1996. *The Revival of Chinese Nationalism*, Lecture Series 6, Leiden: International Institute for Asian Studies.
- Zheng, Yongnian. 2004. *Globalization and State Transformation in China*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

- Battacharya, Abanti. 2003. "Conceptualising Uyghur Separatism in Chinese Nationalism." *Strategic Analysis* 27 (3).
- Casanova, Pablo Gonzalez. 1965. "Internal Colonialism and National Development." *Studies in Comparative International Development* 1(4).
- Chiu, Hungdah. 1984. "The 1982 Chinese Constitution and the Rule of law." *Contemporary Asian Studies* 4.
- Chugui, Yang. 2001. "Deng Xiaoping Theory and the Historical Destiny of Socialism." *The Marxist*. 17 (2).
- Dbete, Alubabari D. 2012. "Ogoni as an Internal Colony: A Critique of Imperialism." *International Journal of Humanities and Social Science* 2(3).
- Esptein, Richard A. "Direct Democracy: Government of the People, By the People, and For the People?" *Harvard Journal of Law & Public Policy* 34 (3).
- Fotopoulos, Takis. 2001. "Globalization, the Reformist Lest, and the Anti-Globalization Movement." *Democracy & Nature: The International Journal of Inclusive Democracy* 7(2).

- Howell Anthony, dan Cindy Fan. 2011. "Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and Uighur Migrants in Urumqi." *Eurasian Geography and Economics* 52 (1).
- Hughes, Christopher R. 1997. "Globalization and Nationalism: Squaring the Circle in Chinese International Relations Theory." *Millenium: Journal of International Studies* 26 (1).
- Jamil, Nur Shahadah. 2011. "China's Xinjiang Policy: An Analysis Based on the Theory of Relative Deprivation." *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies* 38 (1).
- Jost, John T. 2006. "The End of The End of Ideology." *American Psychologist* 61(7).
- Katzenstein, Peter J. 2008. "China's Rise: East Asia and Beyond." *EAI Working Paper Series* 12.
- Kurlantzick, Joshua. 2004. "Repression and Revolt In China's Wild West." *Current History* 103 (674).
- Rayla, M. 2011. "The Pain of A Nation: The Invisibility of Uyghurs in China Proper." *The Equal Rights Review* 6.
- Niu, Geping. 2009. "A Comparison of Tagore's Nationalism and Sun Yat-sen's The Three Principles of the People from the Perspective of Nationalism." *Core Ethics* 5.
- Smith, Joanne N. 2002. "Making Culture Matter: Symbolic, Spatial and Social Boundaries Between Uyghurs and Han Chinese." *Asian Ethnicity*. 3 (2).
- Smith, Joanne. 2006. "Making Culture Matter: Symbolic, Spatial, and Social Boundaries between Uyghurs and Han Chinese." *Asian Ethnicity* 3(2).
- Tang, Wenfang dan Geochao He. 2010. "Separate but Loyal: Ethnicity and Nationalism in China." *Policy Studies* 56.
- Toops, Stanley. 2004. "Demographics and Development in Xinjiang after 1949." *East-West Center* 1.
- Wei, Shan dan Chen Gang. "The Urumqi's Riots and China Ethnic Policy in Xinjiang." *East Asian Policy* 1(3).

- Yang, Lijun dan Chee Kia Lim. 2010. "Three Waves of Nationalism in Contemporary China: Sources, Themes, Presentations, and Consequences", *EAI Working Paper No.155*.
- Yavuz, M. Hakan. 1995. "The Patterns of Political Islamic Identity: Dynamics of National and Transnational Loyalties and Identities". *Central Asian Survey* 14 (3)

Artikel Internet

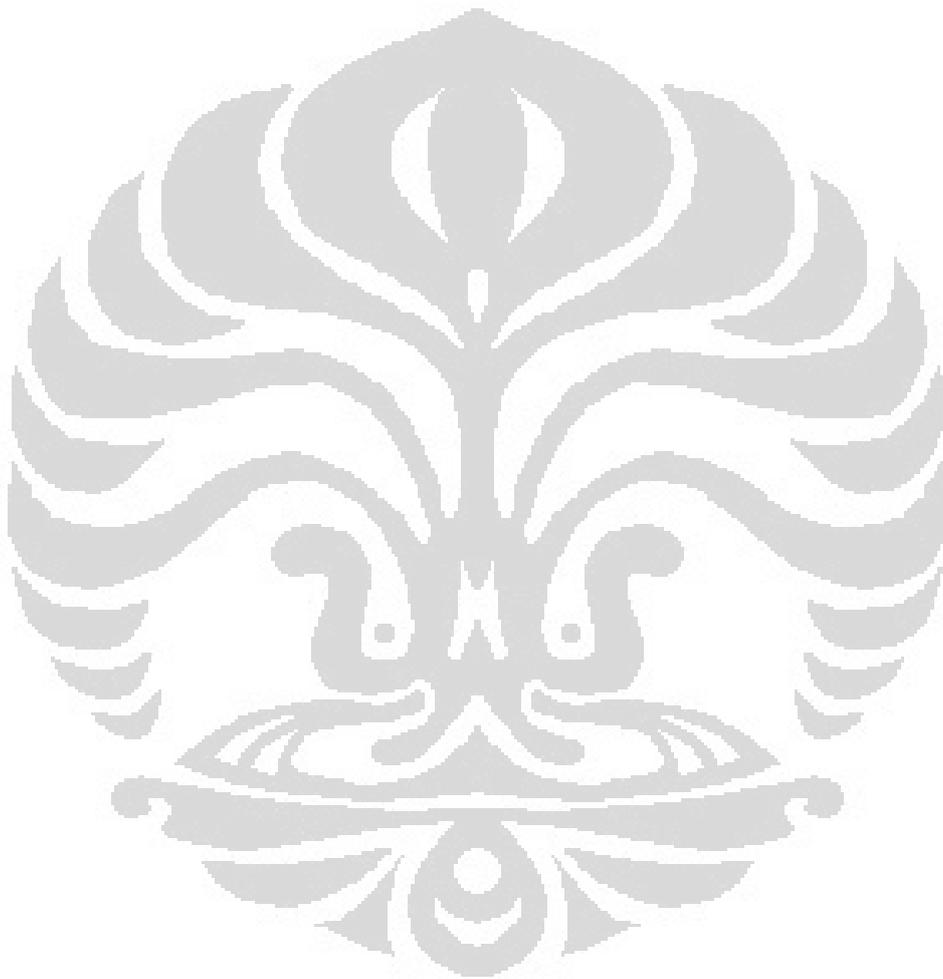
- _____. 2002. "The First Ten Years: Analysis and Lessons for Eastern Europe and Former Soviet Union." Washington DC: The World Bank.
<http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/complete.pdf>.
- _____. "Chapter Two: Fundamental Rights and Duties of the Citizens." International Human Right Treaties and Document Database.
<http://www.hkhrm.org.hk/english/law/const03.html>.
- _____. "Chapter One: General Principle." International Human Right Treaties and Document Database."
<http://www.hkhrm.org.hk/english/law/const02.html>.
- _____. "Employment Promotion Law of the People's Republic of China."
www.hsph.harvard.edu/.../china.labor2.07.pdf.
- _____. "Roles of Information and Communication Technology in Managing Globalization at the National and Regional Levels." United Nations Economic and Social Comissions for Asia and the Pacific.
http://www.unescap.org/tid/projects/globalize_hajela.pdf.
- _____. "Chapter 2: Chinese Nationalism."
<http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/34907/6/503206.pdf>.
- _____. 2010. "Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census[1] (No. 1)." National Bureau of Statistics of China.
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm.
- _____. "China Autonomous Region".
http://www.chinatoday.com/city/china_autonomous_regions.htm.

- _____. “Document – People’s Republic of China: Uighurs Fleeing Persecution as China Wages Its ‘War on Terror’”,
<http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/021/2004/en/4ada86b9-d5cd-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/asa170212004en.html>.
- _____, “Globalization: What Is It?”.
http://stevekerby.com/omde_626/globalization.htm.
- _____. “Dr. Sun Yat-sen Historical Trail.” Central & Western District Council. Atkin, John. “Father of Modern China”. The Builders.
http://www.globalbirdphotos.com/ve/150_155_Father_of_Modern_China_John_Atkin.pdf.
- _____. “The Era of Deng Xiaoping: Crossing the River by Feeling the Stones.” http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/gdr/exhibits/1182/The_Era_of_Deng_Xiaoping.pdf.
- _____. “Flag of China”. http://www.chinesepulse.com/china_flag.html.
- _____. “Technocrats: Minds Like Machines.” *The Economist*
<http://www.economist.com/node/21538698>.
- _____. “Liberty, Equality, Fraternity.” France Embassy in US
<http://web.archive.org/web/20070313012255/http://www.ambafrance-us.org/atoz/libeqfra.asp>.
- _____. “Full Text of Jiang Zemin’s Report at 16th Party Congress.”
http://english.peopledaily.com.cn/200211/18/eng20021118_106985.shtml.
- _____. “China: Human Rights Concern in Xinjiang.” *Human Right Watch*.
<http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/china-bck1017.htm>.
- Chen, Yajun. 2010. “Pragmatism in China and Chinese Philosophy.”
http://brown.edu/Programs/Nanjing/content/documents/Pragmatism_in_China_ChenYajun.pdf.
- Davis, Elizabeth Van Wie. 2008. “Uyghur Muslim Ethnic Separatism in Xinjiang, China.” Asia-Pacific Center for Security Studies.
http://www.apcss.org/wp-content/uploads/2010/PDFs/APCSS_UyghurMuslimSeparatismInXinjiang.pdf.

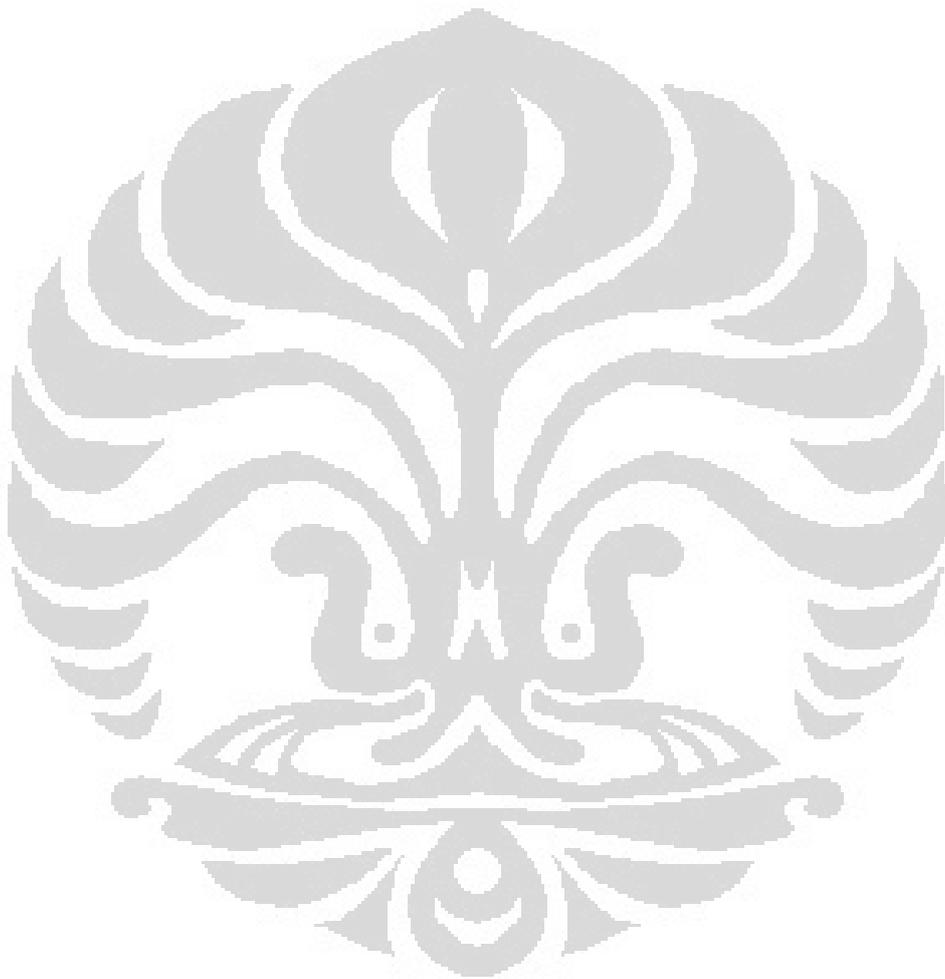
- Ergenc, Ceren. "Chinese Nation-Building and Sun Yat-Sen: A Study on 1911 Revolution in China."
<http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12606376/index.pdf>.
- Fuller, Graham E. dan S. Frederick Starr. "The Xinjiang Problem." Central-Asia Caucasus Institute.
http://www.silkroadstudies.org/docs/publications/OLD/xinjiang_final.pdf.
- Giglio, Davide. "Separatism and the War on Terror in China's Xinjiang Autonomous Region." Peace Operations Training Institute.
<http://media.peaceopstraining.org/theses/giglio.pdf>.
- Hicks, Jack. "On the Application of Theories of 'Internal Colonialism' to Inuit Societies." <http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2004/Hicks.pdf>.
- Ip, Eric Chiyeung. "Building Constitutional Democracy on Oriental Foundations: An Anatomy of Sun Yat-Sen's Constitutionalism."
<http://hc.rediris.es/09/articulos/pdf/16.pdf>.
- Kellner, Thierry. 2002. "China: The Uighur Situation from Independence for the Central Asian Republics to the Post 11 September Era." United Nations High Commissioner for Refugees.
http://dev.ulb.ac.be/sciencespo/dossiers_membres/kellner-thierry/fichiers/kellner-thierry-publication45.pdf.
- Lee, Joy R. "The Islamic Republic of Eastern Turkestan and the Formation of Modern Uyghur Identity in Xinjiang."
http://www.uyghurpen.org/The_Formation_Of_Uyghur_Identity.pdf.
- Moneyhon, Matthew D. "Taming China's 'Wild West': Ethnic Conflict in Xinjiang."
<http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/TamingChina'sWildWest.PDF>.
- Pomfret, John. 2000. "Go West, Young Han." Washington Post. 15 September.
- Singh, Bhavna. 2010. "Ethnicity, Separatism, and Terrorism in Xinjiang: China's Triple Conondrum." Institute of Peace and Conflict Studies.
http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/SR96.pdf.
- Weiguang, Wang. "China's Reform, Opening Up, and Its Path of Development." diakses melalui <http://ilas.cass.cn/uploadfiles/ens/%7BED7B5A7A-AB19-4962-B321-007EDFD1E13F%7D.pdf>.

Zhang, Guoqing. "China's Reform and Opening-up & Economic Development."
<http://www.ctc-health.org.cn/file/2315en.pdf>.

Zhao, Yongfei. "The Essence of Governance: The Development of Public Administration in China." <http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Zhao%20Yongfei.pdf?bgsu1122991500>.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Tabel Komposisi Etnisitas di Cina

Population of China according to ethnic group 1953-2010 [3]

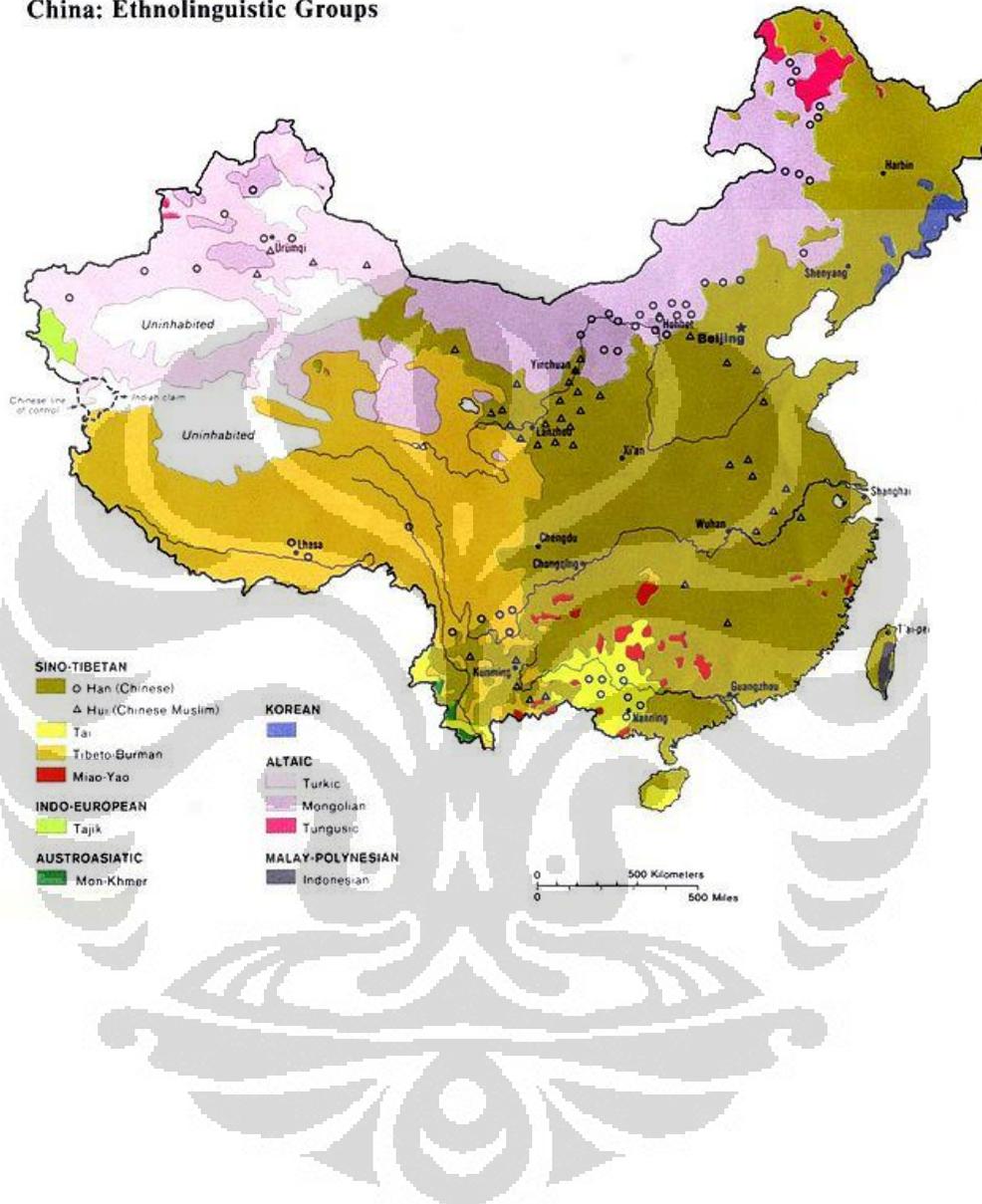
Ethnic group	Language family	census 1953		census 1964		census 1982		census 1990		census 2000		census 2010	
		Number	%	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
Han	Chinese	547,283,057	93.94	651,296,368	94.22	936,703,824	93.30	1,042,482,187	91.96	1,159,400,000	91.59	1,225,932,641	91.51
Minority groups		35,320,360	6.06	39,883,909	5.78	67,233,254	6.70	91,200,314	8.04	106,430,000	8.41	113,792,211	8.49
Zhuang	Tai-Kadai	6,611,455	1.13	8,386,140	1.21	13,441,900	1.32	15,489,630	1.37	16,178,811	1.28		
Manchu	Tungusic	2,418,931	0.42	2,695,675	0.39	4,299,950	0.43	9,821,180	0.87	10,682,263	0.84		
Hui	Chinese	3,559,350	0.61	4,473,147	0.64	7,207,780	0.71	8,602,978	0.76	9,816,802	0.78		
Miao	Hmong-Mien	2,511,339	0.43	2,782,088	0.40	5,017,260	0.50	7,398,035	0.65	8,940,116	0.71		
Uyghurs	Altaic (Turkic)	3,640,125	0.62	3,996,311	0.58	5,917,030	0.59	7,214,431	0.64	8,399,393	0.66		
Tujia	Tibeto-Burman					284,900	0.03	5,704,223	0.50	8,028,133	0.63		
Yi	Tibeto-Burman	3,254,269	0.56	3,380,960	0.49	5,492,330	0.54	6,572,173	0.58	7,762,286	0.61		
Mongols	Altaic (Mongolic)	1,462,956	0.25	1,965,766	0.28	3,402,200	0.34	4,806,849	0.42	5,813,947	0.46		
Tibetans	Tibeto-Burman	2,775,622	0.48	2,501,174	0.36	3,821,950	0.38	4,593,330	0.41	5,416,021	0.43		
Buyi	Tai-Kadai	1,247,883	0.21	1,348,055	0.19	2,103,150	0.21	2,545,059	0.22	2,971,460	0.23		
Korean	Korean	1,120,405	0.19	1,339,569	0.19	1,783,150	0.18	1,920,597	0.17	1,923,842	0.15		
Others		6,718,025	1.15	7,015,024	1.01	16,244,634	1.61	16,531,829	1.46	20,496,926	1.62		
Total mainland China		582,603,417		694,581,759		1,008,175,288		1,133,682,501		1,265,830,000		1,339,724,852	

Lampiran 2 Tabel Komposisi Etnisitas di Xinjiang pada Sensus Penduduk Tahun 2000

Major ethnic groups in Xinjiang by region, 2000 census. ^[notes 1]				
P = Prefecture; AP = Autonomous prefecture; PLC = Prefecture-level city; DACLC = Directly administered county-level city. http://www.tianshannet.com/news/content/2011-05/06/content_5792193.htm				
	Uyghurs	Han	Kazakhs	others
Xinjiang	45.2%	40.6%	6.7%	7.5%
Ürümqi PLC	12.8%	75.3%	2.3%	9.6%
Karamay PLC	13.8%	78.1%	3.7%	4.5%
Turpan Prefecture	70.0%	23.3%	<0.1%	6.6%
Kumul Prefecture	18.4%	68.9%	8.8%	3.9%
Changji AP + Wujiaqu DACLC	3.9%	75.1%	8.0%	13.0%
Bortala AP	12.5%	67.2%	9.1%	11.1%
Bayin'gholin AP	32.7%	57.5%	<0.1%	9.7%
Aksu Prefecture + Aral DACLC	71.9%	26.6%	<0.1%	1.4%
Kizilsu AP	64.0%	6.4%	<0.1%	29.6%
Kashgar Prefecture + Tumushuke DACLC	89.3%	9.2%	<0.1%	1.5%
Khotan Prefecture	96.4%	3.3%	<0.1%	0.2%
Ili AP ^[notes 2]	16.1%	44.4%	25.6%	13.9%
– Kuitun DACLC	0.5%	94.6%	1.8%	3.1%
– former Ili Prefecture	27.2%	32.4%	22.6%	17.8%
– Tacheng Prefecture	4.1%	58.6%	24.2%	13.1%
– Altay Prefecture	1.8%	40.9%	51.4%	5.9%
Shihezi DACLC	1.2%	94.5%	0.6%	3.7%

Lampiran 3 Persebaran Pengguna Bahasa di China

China: Ethnolinguistic Groups



Lampiran 4 Lokasi Xinjiang di Cina

